Dr. Aman, M.Pd.

SEJARAH INDONESIA

MASA KEMERDEKAAN

1945–1998

SEJARAH INDONESIA MASA KEMERDEKAAN

1945–1998

SEJARAH INDONESIA MASA KEMERDEKAAN

1945–1998

Dr. AMAN, M.Pd.

PENERBIT OMBAK
www.penerbitombak.com

2015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

Sejarah merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi pada masa sebelumnya dan memberikan dampak pada kehidupan mendatang. Rangkaian peristiwa yang diceritakan secara kronologis akan menjadi sebuah kisah bermanfaat bagi siapa pun yang mempelajarinya. Namun, apabila kisah-kisah tersebut diceritakan sepotong demi sepotong, tidak akan memberikan arti dan pesan. Bahkan, potongan-potongan tersebut akan ditinggalkan berserakan seperti halnya sampah.

Untuk menjadi sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu perjalanan panjang dan perjuangan yang cukup melelahkan. Namun, para pahlawan kita tidak gentar. Semangat juang dan kerja kerasnya mampu menghasilkan sebuah kemenangan yang lebih dikenal dengan *Proklamasi Kemerdekaan Indonesia*. Sejarah Indonesia masa kemerdekaan menjadi sebuah kisah yang menarik untuk dipelajari baik di bidang akademik maupun masyarakat secara umum. Melalui buku yang berjudul *Sejarah Indonesia Masa Kemerdekaan 1945–1998* ini diharapkan dapat memudahkan para pembaca untuk mempelajari lebih dalam terkait peristiwa-peristiwa yang terjadi pra dan pasca-kemerdekaan Indonesia.

Buku ini terdiri dari 7 bab yang berisi seputar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sampai dengan jatuhnya rezim Orde Baru. Penjelasan buku ini dimulai dari hadirnya Jepang di Indonesia dan seputar Perang Dunia II. Diuraikan pula secara singkat tentang organisasi-organisasi bentukan Jepang yang digunakan untuk menjaring kekuatan bangsa Indonesia guna berpartisipasi dalam medan tempur Perang Dunia II, sampai dengan Jepang menyerah kepada sekutu sekaligus menjadi celah bagi bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan secara sederhana, sebelum sekutu datang. Peristiwa seputar proklamasi

menjadi bagian yang menarik, karena diuraikan secara mendalam dari latar belakang peristiwa Rengasdengklok sampai tanggapan daerah terhadap proklamasi. Hampir di seluruh wilayah Indonesia memberikan respons terhadap kemerdekaan Indonesia, yaitu Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Bandung, Surabaya, Bali, Biak, Kalimantan, Makassar, Palembang, Gorontalo, Sumbawa, dan sebagainya.

Proklamasi Kemerdekaan memang merupakan keberhasilan yang diidam-idamkan bangsa Indonesia sejak lama, namun titik puncak tersebut bukanlah akhir dari perjuangan bangsa. Pasca-kemerdekaan, Indonesia masih dihadapkan sekelumit peristiwa yang cukup menggoyahkan para pemimpin bangsa. Lagi-lagi negara yang sudah merdeka tersebut harus kedatangan tamu asing yang tidak lain adalah sekutu. Kehadiran sekutu yang diboncengi oleh NICA memberi ancaman bagi negara yang baru saja lahir. Sederetan peristiwa berdarah yang membelenggu tanah air kemudian ditumpas, baik dengan jalan gencatan senjata maupun diplomasi. Sisa-sisa didikan militer Jepang mampu memberikan kekuatan bagi bangsa Indonesia untuk melawan kejamnya tentara NICA yang ingin kembali menguasai Indonesia. Upaya demi upaya terus dilakukan oleh para pejuang, hingga akhirnya Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan.

Sebagai negara baru, Indonesia belum memiliki konstitusi yang kuat untuk memberikan ketahanan bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Gejolak pemerintahan dan keadaan sosial-ekonomi yang buruk memberi warna gelap bagi sejarah Indonesia periode 1950–1965. Pergantian kabinet yang terjadi silih berganti memberikan gambaran betapa lemahnya pemerintahan masa itu. Indonesia masih perlu mencari jati diri untuk menjadi sebuah negara yang eksistensinya diakui secara internasional. Keadaan pemerintahan yang masih labil memberikan pengaruh pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Kemiskinan dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah membuat goyah sebagian pemimpin daerah di wilayah nusantara. Berbagai gerakan separatisme menjadi pemandangan yang tidak terelakkan lagi, seperti pemberontakan APRA, DI/TII, Andi Aziz, RMS, dan sebagainya.

Pada saat itu, bangsa Indonesia benar-benar disibukkan dengan urusan kenegaraan dan penyelesaian sengketa di berbagai wilayah. Ditambah lagi, Indonesia harus menyelesaikan PR terkait dengan Irian Barat.

Sengketa antara Indonesia dengan Belanda terkait Irian Barat masih hangat diperbincangkan, hingga pada 1961 PBB turun tangan mengatasi permasalahan tersebut. UNTEA di bawah Dewan Keamanan PBB mengambil alih kekuasaan di Irian Barat untuk sementara waktu, sebelum diadakannya Pepera. Kemudian pada 14 Juli−2 Agustus 1969 dilaksanakan Pepera untuk mengetahui sejauh mana keinginan rakyat Irian Barat. Selain persengketaan di Irian Barat, gejolak dalam pemerintahan Indonesia juga belum mereda. Dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mengawali kembalinya Indonesia ke UUD 1945 dengan sistem Demokrasi Terpimpin. Soekarno yang tampil sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintah segera mengisi kekosongan kabinet dengan mengangkat Juanda sebagai Perdana Menteri.

Demokrasi Terpimpin yang merupakan gagasan dari Soekarno tidak luput dari penyimpangan berdasarkan konsep awalnya dan adanya sentralisasi kekuasaan. Pembubaran Masyumi, pembatasan partai politik, memasyarakatkan NASAKOM dan RESOPIM pada akhirnya akan membawa petaka bagi pemerintahan Indonesia. Selain itu, Indonesia masih dihadapkan permasalahan ekonomi yang cukup dilematis. Minimnya kas negara, terjadinya inflasi ekonomi, dan blokade yang dilakukan Belanda menambah penderitaan bagi bangsa Indonesia. Upaya perbaikan ekonomi terus dilakukan oleh pemerintah, seperti mengadakan pinjaman nasional, *planing board*, *plan Kasimo*, gunting Syafruddin, dan upaya menembus blokade melalui jalur politik dan perdagangan. Banyaknya program perbaikan ekonomi yang dilakukan, menunjukkan betapa besarnya perjuangan pemerintah untuk memajukan kesejahteraan rakyat.

Dalam bidang politik, Demokrasi Terpimpin menarik berbagai pihak untuk bergelut dalam pemerintahan sehingga berakibat pada situasi politik yang labil. Tampilnya PKI dalam kepemerintahan memunculkan kecumburuan dan kekhawatiran banyak kalangan. Dalam situasi demikian,

tampilnya kekuatan politik Angkatan Darat tidak dapat dihindarkan. Akhirnya kekacauan politik memuncak dengan meletusnya *Gestapu 1965* yang telah mendorong runtuhnya pemerintahan Soekarno. Berbagai aksi demonstrasi dilancarkan oleh kumpulan organisasi massa yang terintegrasi dalam Front Pancasila. Adapun tuntutan yang dilancarkan oleh Front Pancasila lebih dikenal dengan nama TRITURA.

Pemerintahan Soekarno tidak lagi memiliki wibawa di hadapan masyarakat, meskipun telah dilakukan upaya memperbaiki citra kepemimpinan, salah satunya dengan membentuk Barisan Soekarno. Keadaan politik yang memburuk, mendorong tampilnya sosok pemimpin yang baru sebagai angin segar bagi kehidupan masyarakat. Dikeluarkannya Supersemar seolah memberikan legalitas bagi Soeharto untuk segera mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka menciptakan stabilitas nasional. Kepemimpinan Soeharto tersebut secara perlahan mampu menggeser Soekarno, hingga ia harus kehilangan kekuasaannya. Tampilnya Soeharto dalam panggung politik merupakan awal dibukanya lembaran Orde Baru yang berlangsung sampai tahun 1998. Hadirnya Orde Baru memberikan warna yang berbeda dalam kehidupan politik. Keinginan Soeharto untuk mengembalikan politik Indonesia yang berpedoman pada UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen merupakan landasan pemerintahan Orde Baru.

Bagian akhir dalam buku ini menjelaskan tentang eksistensi Indonesia di mata dunia melalui kerja sama regional maupun internasional, meliputi ASEAN, KAA, GNB, dan PBB. Indonesia memiliki andil yang cukup dalam penyelenggaraan ASEAN maupun KAA. Hal ini sejalan dengan kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif. Namun, Indonesia juga pernah keluar dari keanggotaan PBB, yakni pada saat konfrontasi dengan Malaysia.

Selengkapnya mengenai buku ini, silakan membaca pada setiap babnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.

BAB I
PENDAHULUAN

Pengaruh perang dunia II bagi bangsa Indonesia dapat dilihat sejak tahun 1942. Indonesia adalah salah satu wilayah yang menjadi target perluasan negara Jepang. Akibatnya bangsa Indonesia diduduki oleh penguasa militer Jepang. Selama 3,5 tahun Indonesia berada di bawah penjajahan Jepang. Akibat penjajahan Jepang tersebut bangsa Indonesia mengalami tekanan politik dan penderitaan ekonomi dan sosial. Perginya penjajah Belanda diganti oleh Jepang justru membawa penderitaan yang lebih hebat bagi bangsa Indonesia. Tetapi karena Perang Dunia II, bangsa Indonesia mendapat keuntungan dengan kondisi kekalahan Jepang. Menjelang kekalahan Jepang dalam PD II, Jepang telah membentuk BPUPKI dan PPKI yang sangat besar artinya bagi persiapan membentuk negara Indonesia.

Perang dunia II juga berpengaruh besar bagi bangsa Indonesia. Pengaruh yang sangat penting adalah pendudukan Jepang terhadap Indonesia. Nafsu menjadi pemimpin Asia Timur Raya mendorong Jepang untuk meluaskan kekuasaan sampai di Indonesia. Gerak pasukan Jepang masuk ke Indonesia dan mengalahkan Belanda. Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang tanggal **8 Maret 1942** di Kalijati, Subang Jawa Barat. Dari tahun 1942-1945 bangsa Indonesia berada di bawah pemerintahan Jepang. Penjajahan Jepang selama 3,5 tahun mempunyai pengaruh bagi kehidupan politik, sosial, dan ekonomi bangsa Indonesia.

Pada tanggal *8 Desember 1941*, Jepang menyerang pangkalan militer AS di Pearl Habour. Pada saat itu Indonesia masih dikuasai Belanda. Jepang terus masuk ke negara-negara Asia dari berbagai pintu. Pada tanggal ***11 Januari 1942***, Jepang berhasil mendaratkan pasukannya di pulau **Tarakan** Kalimantan Timur . Tanggal 12 Januari, komandan pasukan Belanda menyerah. Tanggal 24 Januari, Jepang menduduki kota minyak Balikpapan. Selanjutnya Jepang menduduki kota-kota lainya di Kalimantan. Di Sumatera, Jepang menduduki Palembang tanggal *16 Februari 1942*. Selanjutnya Jepang mengarahkan penyerangan ke Pulau Jawa. Mulai awal bulan Maret, Jepang telah mendaratkan pasukan-pasukannya di beberapa pelabuhan Jawa. Batavia berhasil dikuasai 5 Maret 1942. Gubernur Jendral Hindia Belanda *Tjarda van Starkenbourgh* telah mengungsi ke Bandung sejak akhir Februarui 1942. Jepang tinggal mengarahkan serangan ke Bandung. Jepang menyerang Bandung dari arah utara. Setelah melalui pertempuran sengit, akhirnya Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang tanggal **8 Maret 1942** di Kalijati, Subang Jawa Barat. Serah terima ditandatangani *Letnan Jenderal Ter Poorten* (Panglima Angkatan Perang Belanda) kepada *Letnan Jenderal Imamura* (pimpinan pasukan Jepang).

Secara politik terjadi pergantian pemerintahan di Indonesia. Belanda yang kalah perang melawan Jepang akhirnya digantikan kedudukannya sebagai penjajah di Indonesia. Setelah penyerahan ***8 Maret 1942,*** secara resmi bangsa Indonesia di bawah kekuasaan Jepang. Selanjutnya Jepang melakukan pembagian daerah pemerintahan di Indonesia. Pemerintahan Jepang berbeda dengan Hindia Belanda. Pada jaman penjajahan Jepang, Indonesia diperintah oleh pemerintahan militer yang terbagi dalam 3 daerah pemerintahan, yakni: (1) *Pemerintahan Angkatan Darat* (Tentara XXV) untuk Sumatera, dengan pusatnya di Bukittinggi; (2) *Pemerintahan Angkatan Darat* (Tentara XVI) untuk Jawa dan Madura dengan pusatnya di Jakarta; (3) *Pemerintahan Angkatan Laut* (Armada Selatan II) untuk daerah Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku dengan pusatnya di Makasar.

Jepang sangat ketat mengawasi berbagai organisasi pergerakan kebangsaan Indonesia. Jepang membentuk berbagai organisasi sosial dan politik untuk mempermudah pengawasan. Jepang juga memanfaatkan berbagai organisasi bentukannya untuk tujuan membantu Jepang dalam menghadapi Perang Dunia II. Beberapa organisasi bentukan pemerintah Jepang misalnya Gerakan Tiga A, Pusat Tenaga Rakyat (Putera), Jawa Hokokai, dan Masyumi. Jepang juga membentuk berbagai organisasi militer dan semi militer pada tahun 1943. Beberapa organisasi militer dan semi militer tersebut di antaranya Seinendan (Organisasi Barisan Pemuda), Fujinkai (himpunan kaum wanita). Keibodan (barisan *pembantu polisi*), Heiho (prajurit pembantu tentara Jepang), dan Pembela Tanah Air (PETA)merupakan pasukan bersenjata yang memperoleh pendidikan militer secara khusus dari Jepang.

Berbagai organisasi yang tumbuh pada masa pendudukan Jepang berada di bawah kontrol sangat keras. Mereka dipaksa tunduk pada berbagai aturan yang ditetapkan oleh Jepang. Untuk menyikapi hal ini para tokoh pergerakan melakukan siasat seperti yang dilakukan Bung Karno dan Bung Hatta. Mereka tetap mau bekerjasama dengan Jepang, tetapi secara diam-diam melakukan penggalangan kekuatan untuk meneruskan perjuangan pergerakan kebangsaan. Melalui Putera misalnya, Bung Karno selalu menggalang koordinasi dengan berbagai kaum pergerakan. Pengaruh politik terjadi perubahan drastis ketika Jepang semakin terdesak oleh Sekutu. Jepang berusaha menarik simpati sebaik mungkin bagi bangsa Indonesia denganmemberikan janji kemerdekaan. Akhirnya dibentuklah BPUPKI dan PPKI sebagai keseriusan Jepang akan memberikan kemerdekaan. Tetapi sebelum Jepang memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, Jepang telah mengalami kekalahan dalam PD II.

Dalam menjalankan pemerintakan di daerah pendudukan termasuk Indonesia, Jepang menggunakan sistem pemerintahan *berdikari*. Berdikari dapat diartikan sebagai berdiri sendiri, artinya

pemerintah pusat tidak banyak peranannya dalam upaya pemenuhan kebutuhan pasukan di daerah pendudukan. Dengan demikian, pemerintahan militer Jepang di Indonesia mempunyai keleluasaan untuk menerapkan sistem penjajahan. Jepang tidak hanya menguras tenaga rakyat Indonesia. Pengerukan kekayaan alam, dan harta benda yang dimiliki bangsa Indonesia jauh lebih kejam dari Belanda. Semua usaha yang dilakukan di Indonesia harus menunjang keperluan perang Jepang. Usaha-usaha tersebut adalah (1) Jepang mengambil alih seluruh asset ekonomi Belanda, dan mengawasi langsung pengusahaannya; (2) Usaha perkebunan dan industri harus mendukung utnuk keperluan perang, seperti tanaman *jarak* untuk minyak pelumas; (3) Rakyat wajib menyerahkan bahan pangan besar-besaran kepada Jepang. Jepang memanfaatkan *Jawa Hokokai*, dan intansi-instansi pemerintah lainnya. Keadaan inilah yang semakin mendorong kesengsaraan rakyat; (4) Dalam masa panen, rakyat wajib melakukan setor padi, sehingga mereka hanya membawa pulang padi sekitar 20% dari panenan. Inilah yang membawa musibah kelaparan, dan penyakit busung lapar di Indonesia. Banyak penduduk makan umbi-umbian liar, yang sebenarnya hanya pantas untuk makanan ternak.

Kondisi sosial bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang sangat memprihatinkan. Untuk membantu perang dan melancarkan aktivitas Jepang, diperlukan bantuan tenaga yang lebih besar. Jepang melakukan rekruitmen anggota romusha *(tenaga kerja paksa)* yang dikerahkan untuk membangun jalan, kubu pertahanan, rel kereta api, jembatan, dan sebagainya. Romusha paling besar adalah dari Jawa, yang dikirim ke luar Jawa, bahkan sampai di Malaya, Burma, dan Siam. Sebagian besar romusha adalah penduduk yang tidak berpendidikan. Meraka terpaksa melakukan kerja rodi ini dikarenakan takut pada Jepang. Dalam bekerja, mereka layaknya sebagai binatang. Makanan tidak terjamin, kesehatan sangat minim, sementara pekerjaan sangat berat. Ribuan rakyat Indonesia meninggal akibat romusha. Mendengar nasib romusha yang sangat menyedihkan, banyak pemuda yang meninggalkan kampungnya. Mereka takut akan dijadikan romusha. Akhirnya, banyak desa yang sebagian besar didiami kaum perempuan, orang tua, dan anak-anak.

Kejahatan Jepang yang sangat menyakitkan adalah pemaksaan wanita-wanita untuk menjadi *Jugun Ianfu*. Jugun Ianfu adalah wanita yang dipaksa Jepang untuk menjadi pelacur. Mereka di bawa ke pos-pos Jepang, atau medan pertempuran Jepang, guna memenuhi nafsu binatang tentara Jepang. Akibat eksploitasi ekonomi dan tenaga bangsa Indonesia menyebabkan kemiskinan dan penyakit sosial merajalela. Kondisi kesehatan sebagian besar rakyat Indonesia memprihatinkan karena kekurangan gizi. Gelandangan dan pengemis ditemukan di berbagai tempat. Demikianlah akibat perang dunia dan pendudukan Jepang di Indonesia selama tahun 1942-1945. Di balik penderitaan

bangsa Indonesia yang sangat mengenaskan, kita akhirnya memperoleh keberhasilan dalam mencapai kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia tentu bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Strategi dan usaha perjuangan para pendahulu kita yang gigih dan penuh kesabaran merupakan bukti nyata upaya memberikan warisan kepada kita.

BAB II
DI SEPUTAR PROKLAMASI KEMERDEKAAN

A. Peristiwa Menjelang Proklamasi

1. Titik Tolak

Dalam Sidang Istimewa *Teikoku Ginkai* (Parlemen Jepang) ke-85 tanggal 7 September 1944 di Tokyo, *Perdana Menteri Koiso* mengumumkan bahwa daerah *Hindia Timur* (Indonesia) diperkenankan untuk merdeka kelak dikemudian hari. Hal ini dilatarbelakangi oleh semakin terdesaknya Angkatan Perang Jepang oleh pasukan Amerika, terlebih dengan jatuhnya *kepulauan Saipan* ke tangan Amerika. Pada tanggal 1 Maret 1945 *Letnan Jenderal Kuma Kici Harada* mengumumkan pembentukan *Dokuritsu Junbi Cosakai* atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Panitia Kemerdekaan. Tindakan ini merupakan langkah kongkret pertama bagi pelaksanaan janji Koiso. Terpilih sebagai *Kaico* atau ketua *dr. Radjiman Wediodiningrat.*

Pada tanggal 7 agustus 1945, Panglima Tentara Umum Selatan *Jenderal Terauchi* meresmikan pembentukan *Dokuritsu Junbi Linkai* atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada saat ini pula *Dokuritsu Junbi Cosakai* dinyatakan bubar. Terpilih sebagai ketua PPKI *Ir.Soekarno* dan *Drs. Moh. Hatta* sebagai wakil ketua. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, pasukan udara Sekutu menjatuhkan bom masing-masing di *kota Nagasaki* dan *Horosima***.** Hal ini mendorong Jepang untuk segera mengambil keputusan penting. Pada tanggal 12 Agustus 1945, *Jenderal Besar Terauci* menyampaikan kepada tokoh pergerakan yang diundang yaitu *Ir.Soekarno, Drs. Moh. Hatta,* dan *dr. Radjiman Wediodiningrat* bahwa pemerintah kemaharajaan telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tangal 24 Agustus 1945 yang pelaksanaannya dilakukan oleh PPKI.

2. Peristiwa Rengasdengklok: Pro Kontra Proklamasi

Rengasdengklok adalah salah satu kota kecamatan di Kabupaten Karawang Jawa Barat. Ke kota inilah Ir. Sukarno dan Drs. Moh Hatta pernah dibawa secara paksa oleh

kelompok pemuda revolusioner yang menghendaki kemerdekaan Indonesia untuk segera dikumandangkan. Peristiwa heroik ini dipicu oleh adanya perbedaan faham antara golongan tua yang moderat, dengan golongan pemuda yang revolusioner dalam pelaksanaan proklamasi.

a. Golongan Tua

Mereka yang dicap sebagai golongan tua adalah para anggota PPKI yang diwakili oleh *Sukarno* dan *Hatta*. Mereka adalah kelompok konservatif yang menghendaki bahwa pelaksanaan proklamasi harus melalui PPKI sesuai dengan prosedur maklumat Jepang, yakni pada tanggal 24 Agustus 1945. Alasan mereka adalah bahwa meskipun Jepang telah kalah, namun kekuatan militernya di Indonesia harus diperhitungkan demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Kembalinya Tentara Belanda ke Indonesia, diangap lebih berbahaya dari pada sekedar masalah tanggal waktu pelaksanaan proklamasi itu sendiri.

b. Golongan Muda

Menanggapi sikap konservatif golongan tua, golongan muda yang diwakili oleh para anggota *PETA* dan *mahasiswa* merasa kecewa. Mereka tidak setuju terhadap sikap golongan tua, dan menganggap bahwa PPKI adalah bentukan Jepang. Oleh karena itu, mereka menolak jika proklamasi dilaksanakan melalui PPKI. Sebaliknya mereka menghendaki terlaksananya proklamasi kemerdekaan adalah dengan kekuatan sendiri, terbebas dari pengaruh Jepang. *Sutan syahrir* termasuk tokoh pertama yang mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Sikap golongan muda secara resmi diputuskan dalam rapat yang diselenggarakan di Pegangsaan Timur Jakarta pada tangal 15 Agustus 1945. Hadir dalam rapat ini Chairul Saleh, Djohar Nur, Kusnandar, Subadio, Subianto, Margono, Armansyah, dan Wikana. Rapat yang dipimpin *Chairul Saleh* ini memutuskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan masalah rakyat Indonesia sendiri, bukan menggantungkan kepada pihak lain.

Keputusan rapat kemudian disampaikan oleh *Darwis* dan *Wikana* kepada Soekarno dan Hatta di Pegangsaan Timur No.56 jakarta, dan mendesak mereka untuk memaklumatkan Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus 1945. Jika tidak diumumkan pada tanggal tersebut, golongan pemuda menyatakan bahwa akan terjadi pertumpahan darah. Namun demikian, Soekarno tetap bersikap keras pada pendiriannya bahwa proklamasi harus

dilaksanakan melalui PPKI, dan oleh karena itu PPKI harus segera menelenggarakan rapat. Pro kontra yang mencapai titik puncak inilah yang telah mengantarkan terjadinya peristiwa Rengasdengklok.

c. Suksesi Peristiwa Rengasdengklok

Di tengah suasana pro dan kontra, golongan pemuda memutuskan untuk membawa Soekarno dan Hatta ke luar Jakarta. Pilihan ini diambil berdasarkan kesepakatan rapat terakhir golongan pemuda pada tanggal 16 agustus 1945 di Asrama Baperpi, Cikini, Jakarta yang dimaksudkan untuk menjauhkan Soekarno Hatta dari pengaruh Jepang.

Untuk melaksanakan pengamanan Soekarno dan Hatta, golongan pemuda memilih *Shodanco Singgih*, guna menghindari kecurigaan dan tindakan militer Jepang. Untuk memuluskan jalan, proses ini dibantu berupa perlengkapan Tentara Peta dari *Cudanco Latief Hendraningrat*. Soekarno dan Hatta kemudian dibawa ke Rengasdengklok, yang merupakan sebuah kota Kawedanan di sebelah Timur Jakarta. Kota Rengasdengklok dipilih dengan alasan perhitungan militer. Ketika anggota Peta Daidan Purwakarta dan Daidan Jakarta mengadakan latihan bersama, terjalin hubungan yang baik di antara mereka. Di samping itu Rengasdengklok letaknya strategis bagi pengamanan karena letaknya yang terpencil sekitar 15 km dari Kedunggede, Karawang pada Jalan Raya Jakarta-Tegal. Oleh karena itu pemantauan sangat mudah dilakukan oleh tentara Peta yang mengawasi setiap gerak langkah tentara Jepang baik yang datang dari arah Bandung, Jawa Tengah, maupun Jakarta, karena pastilah mereka harus melewati Kedunggede terlebih dahulu.

Di Jakarta, dialog antara golongan muda yang diwakili oleh *Wikana* dan golongan tua *Ahmad Subardjo* mencapai kata sepakat bahwa Proklamasi Kemerdekaan harus dilaksanakan di Jakarta, dan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Golongan pemuda kemudian mengutus *Yusuf Kunto* untuk mengantar Ahmad Subardjo ke Rengasdengklok dalam rangka menjemput Soekarno dan Hatta. Kepada golongan pemuda, Ahmad Subardjo memberi jaminan bahwa Proklamasi Kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945, dan selambat-lambatnya pukul 12.00. Dengan jaminan itu, *Cudanco Subeno*, Komandan Kompi Peta Rengasdengklok, bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta untuk kembali ke Jakarta dalam rangka mempersiapkan kelengkapan untuk melaksanakan Proklamasi Kemerdekaan.

d. Perumusan dan Pengesahan Teks Proklamasi

Peristiwa Rengasdengklok telah mengubah jalan pikiran Soekarno Hatta, dimana mereka telah menyetujui bahwa Proklamasi Kemerdekaan harus segera dikumandangkan. Sukarno dan Hatta tiba di Jakarta pada pukul 23.00, dan setelah singgah di rumah masing-masing mereka langsung menuju rumah kediaman Laksamada Maeda. Hal ini dilakukan karena pertemuan Soekarno dengan Mayjen Nishimura dalam rangka membahas Proklamasi kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak membuahkan hasil. Soekarno baru sadar bahwa berbicara dengan penjajah tidak ada gunanya. Nishimura melarang Soekarno dan Hatta untuk melaksanakan rapat PPKI dalam rangka melaksanakan Proklamasi Kemerdekaan.

Pertemuan di rumah Laksamana Maeda dianggap tempat yang aman dari ancaman tindakan militer Jepang, karena Maeda adalah Kepala Kantor Penghubung Angkatan Laut di daerah kekuasaan Angkatan Darat. Di kediaman Maeda itulah rumusan teks proklamasi disusun. Hadir dalam pertemuan itu Sukarni, Mbah Diro, dan BM.Diah dari golongan pemuda yang menyaksikan perumusan teks proklamasi. Semula golongan pemuda menyodorkan teks proklamasi yang keras nadanya, dan karena itu rapat tidak menyetujui. Berdasarkan pembicaraan antara Soekarno, Hatta, dan ahmad Soebardjo, diperoleh rumusan teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno yang berbunyi:

Proklamasi
Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Djakarta, 17-8-'05
Wakil-wakil bangsa Indonesia

Kalimat pertama merupakan masukan dari Ahmad Soebardjo yang berarti pernyataan dari kemauan bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Sedangkan kalimat terakhir merupakan gagasan Hatta yang merupakan suatu pernyataan pengalihan kekuasaan ***(transfer of sovereignty).***

Setelah teks proklamasi selesai disusun, muncul permasalahan tentang siapa yang harus menandatangani teks tersebut. Hatta mengusulkan agar teks proklamasi itu ditandatangani oleh seluruh yang hadir sebagai wakil bangsa Indonesia. Namun dari

golongan muda Sukarni mengajukan usul bahwa teks proklamasi tidak perlu ditandatangani oleh semua yang hadir, tetapi cukup oleh Soakarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia, dan Soekarno-lah yang nantinya membacakan teks proklamasi tersebut. Usul tersebut didasari bahwa Soekarno dan Hatta merupakan *dwi-tunggal* yang pengaruhnya cukup besar di mata rakyat Indonesia. Usul Sukarni kemudian dterima, dan Soekarno meminta kepada *Sayuti Melik* untuk mengetik naskah proklamasi tersebut, disertai perubahan-perubahan yang disetujui bersama.

Terdapat tiga perubahan pada naskah tersebut dari yang semula berupa tulisan tangan Soekarno, dengan naskah yang telah diketik oleh Sayuti Melik. Perubahan-perubahan itu adalah:

1) Kata 'tempoh" diubah menjadi "tempo"
2) Konsep "wakil-wakil bangsa Indonesia" diubah menjadi "atas nama bangsa Indonesia", dan
3) Tulisan "Djakarta 17-08-'05", diubah menjadi "Djakarta, hari 17 boelan 8 Tahoen '05".
4) Setelah selesai diketik, naskah teks proklamasi tersebut ditandatangani oleh Soekarno-Hatta, dengan bunyinya yakni:

Proklamasi
Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Djakarta, hari 17 boelan 8 Tahoen '05
Atas nama bangsa Indonesia

Soekarno – Hatta

B. Proklamasi Kemerdekaan 1945

Tujuan dari perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan adalah tercapainya Indonesia Merdeka. Proklamasi, adalah suatu simbol yang sangat penting artinya bagi bangsa Indonesia. Karena dari situlah bangsa Indonesia baru akan dapat menata diri untuk diakui keberadaannya oleh dunia internasional. Terlihat dengan jelas bagaimana semangat para

pemuda dan seluruh rakyar Indonesia dalam rangka mewujudkan Indonesia yang telah bebas dari belenggu penjajahan.

1. Persiapan Pembacaan Teks Proklamasi

Setelah selesai merumuskan dan mengesahkan teks proklamasi, pagi harinya tanggal 17 agustus 1945 para pemimpin nasional dan para pemuda kembali ke rumah masing-masing untuk mempersiapkan penyelenggaraan pembacaan teks proklamasi. Rakyat dan tentara Jepang menyangka bahwa pembacaan proklamasi akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Jepang telah mengetahui rencana pembacaan proklamasi, sehingga tentara Jepang memblokade lapangan Ikada. Bahkan Barisan Pemuda telah berdatangan ke lapangan Ikada dalam rangka menyaksikan pembacaan teks proklamasi. Pemimpin Barisan Pelopor Sudiro juga datang ke lapangan Ikada dan melihat pasukan Jepang dengan senjata lengkap menjaga ketat lapangan itu. Sudiro kemudian melaporkan keadaan itu kepada Muwardi, Kepala Keamanan Soekarno dan mengetahui bahwa proklamasi akan diikrarkan di rumah Soekarno Jalan Pegangsaan Rimur 56 Jakarta.

Halaman rumah Soekarno sudah dipadati oleh massa menjelang pembacaan teks proklamasi. Dr Muwardi memerintahkan kepada Latief Hendraningrat untuk menjaga keamanan pelaksanaan upacara. Dalam hal ini Latif dibantu oleh Arifin Abdurrahman, untuk mengantisipasi gangguan tentara Jepang. Terlihat suasana sangat sibuk. Suwiryo, Wakil Walikota Jakarta meminta kepada Wilopo untuk mempersiapkan perlengkapan yang diperlukan. Wilopo kemudian meminjam mikrofon dan beberapa pengeras suara ke toko elektronik milik Gunawan. Tidak mengalami kesulitan dalam hal ini Gunawan kemudian meminjamkannya.

Untuk keperluan tiang bendera, Sudiro memerintahkan kepada S.Suhud, Komandan Pengawal Rumah Soekarno untuk mencari tiang bendera. Suhud mendapatkan sebatang tiang bambu dari belakang rumah dan menanamnya di dekat teras, dan kemudian diberi tali. Ia lupa bahwa di depan rumah ada dua tiang bendera dari besi yang tidak terpakai . Ini dapat dimafhumi barangkali mengingat suasana yang panik dalam waktu itu. Di tempat lain Fatmawati mempersiapkan bendera yang dijahit dengan tangan dan ukuran yang tidak standar.

Sementara suasana semakin panas, para pemuda mengehendaki agar pembacaan teks proklamasi segera dilaksanakan, karena mereka sudah tidak sabar lagi dan memang

sudah menunggu sejak pagi. Mereka mendesak Muwardi agar mengingatkan Soekarno mengingat hari semakin siang. Namun Soekarno menolak jika ia harus melaksanakannya sendiri tanpa Hatta. Suasana menjadi tegang karena Muwardi terus mendesak Soekarno untuk segera membacakan teks proklamasi tanpa harus menunggu kehadiran Hatta. Untunglah lima menit sebelum pelaksanaan upacara Hatta datang dan langsung menemui Soekarno untuk segera melaksanakan upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia.

2. Pelaksanaan Upacara Proklamasi Kemerdekaan

Upacara dipimpin oleh Latief Hendraningrat dan tanpa protokol. Latief segera memimpin barisan dan menyiapkan untuk berdiri dengan sikap sempurna. Soekarno kemudian mempersiapkan diri dan mendekati mikrofon. Sebelum membacakan teks proklamasi, Soekarno membacakan pidato singkat yang isinya adalah sebagai berikut.

a. Perjuangan melawan kolonial telah cukup panjang dan memerlukan keteguhan hati.
b. Cita-cita perjuangan itu adalah kemerdekaan Indonesia.
c. Indonesia yang berdaulat harus mampu mennetukan arah dan kebijakannya sendiri, menjadi negara yang diakui oleh bangsa-bangsa lain di dunia.

Setelah itu kemudian Soekarno membacakan teks proklamasi yang diketik Sayuti Melik. Setelah selesai, pidato ditutup dengan kalimat: "demikainlah saudara-saudara!" Kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita ! Mulai saat ini kita menyusun negara kita 1 Negara merdeka, negara Republik Indonesia Merdeka, kekal dan abadi. Insya allah, Tuhan memberkati kemerdekaan Indonesia" (Notosusanto, 1990: 94).

Acara berikutnya setelah pembacaan selesai adalah pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh Latief dan Suhud secara perlahan-lahan. Bendera merah putih dinaikan dan diiringi lagu Indonesia raya yang secara spontan dinyanyikan oleh para hadirin. Selesai pengibaran bendera upaca ditutup dengan sambutan Wakil Walikota Suwiryo dan Muwardi. Dengan demikian selesailah upaca proklamasi kemerdekaan, dan merupakan tonggak berdirinya negara Republik Indonesia yang berdaulat.

3. Penyebaran Berita Proklamasi

Kelompok pemuda yang cukup berperan dalam penyebarluasan berita proklamasi adalah kelompok Sukarni. Kelompok ini bermarkas di Bogor Lama (sekarang Jalan Dr. Sahardjo SH) yang berusaha mengatur strategi untuk mengatur penyebarluasan berita proklamasi. Seluruh alat komunikasi yang tersedia dipergunakan, seperti pengeras suara,

pamplet, dan bahkan mobil-mobil dikerahkan ke seluruh kota Jakarta. Propaganda ini dimaksudkan pula untuk mengerahkan massa agar hadir dalam pembacaan teks proklamasi di Pegangsaan Timur 56 Jakarta.

Setelah proklamasi dikumandangkan, berita proklamasi yang sudah tersebar di seluruh penjuru kota Jakarta, segera disebarluaskan ke seluruh Indonesia. Pada hari itu juga teks proklamasi sudah diserahkan oleh Syahrudin, wartawan Domei kepada kepala kantor bagian radio WB. Palenewen untuk disiarkan. Palenewen kemudian meminta F.Wuz seorang penyiar, agar menyiarkan berita proklamasi tiga kali berturut-turut. Tetapi, baru saja dua kali berita disiarkan, masuklah orang Jepang yang mengetahui siaran berita lewat udara, dan memerintahkan agar penyiaran dihentikan. Tetapi Penelewen tetap memerintahkan Wuz untuk tetap menyiarkan berita proklamasi, bahkan terus diulangi setiap setengah jam sampai pukul 16.00. Akibatnya, pimpinan tentara Jepang di Jawa memerintahkan untuk meralat berita tersebut dan mengatakannya sebagai kekeliruan. Kemudian pada hari senin tanggal 20 agustus 1945 pemancar radio itu disegel oleh Jepang dan karyawannya dilarang masuk.

Disegelnya pemancar radio pada kantor berita Domei, tidak menghalangi tekad para pemuda untuk menyebarkan berita proklamasi. Para pemuda membuat pemancar baru dengan bantuan sejumlah teknisi radio, Sukarman, Sutanto, Susilahardja, dan Suhandar. Alat-alat pemancar dibawakan dari kantor berita Domei secara sembunyi-sembunyi kepada rumah Palenewen, dan sebagian ke Menteng 31. Walaupun dengan susah payah, akhirnya jadilah pemancar baru di Menteng 31 dengan kode panggilan DJK I. Pemancar inilah yang banyak berperan dalam menyiarkan berita proklamasi.

Penyebaran berita proklamasi tidak terbatas melalui udara, tetapi juga melalui pers dan slebaran-slebaran kertas. Dalam hal ini, peran buruh kereta api sangat besar dalam membawa berita proklamasi melalui surat-surat slebaran. Pada tanggal 20 Agustus 1945, hampir seluruh harian di Jawa memuat berita proklamasi dan UUD Negara Republik Indonesia yang baru saja dibentuk. Selanjutnya berita proklamasi dengan cepat tersebar ke seluruh penjuru tanah air, yang segera pula mendapat sambutan dari rakyat.

C. Pembentukan Kepemerintahan Republik Indonesia

Dengan dikumandangkannya Proklamasi Kemerdekaan 1945, dilihat dari segi hukum tata negara, berarti bahwa bangsa Indonesia telah memutuskan ikatan dengan tatanan hukum sebelumnya, baik tatanan Hindia Belanda maupun tatanan hukum pendudukan

Jepang. Dengan lain kata bangsa Indonesia mulai saat itu telah mendirikan tatanan hukum yang baru yaitu tatanan hukum Indonesia, yang berisikan hukum Indonesia, yang ditentukan dan dilaksanakan sendiri oleh bangsa Indonesia (Joeniarto, 2001: 7).

Sehari setelah proklamasi dikumandangkan, para pemimpin bekerja keras membentuk lembaga kepemerintahan sebagaimana layaknya suatu negara merdeka. Dalam kesempatan ini, PPKI menyelenggarakan rapat pada tanggal 17 Agustus 1945, sebagai rapat yang pertama setelah proklamasi kemerdekaan. Atas inisiatif Soekarno dan Hatta, mereka merencanakan menambah 9 orang sebagai anggota baru yang terdiri dari para pemuda seperti Chairul Saleh dan sukarni. Namun karena para pemuda menganggap bahwa PPKI bentukan Jepang, akhirnya para pemuda meninggalkan tempat.

1. Pengesahan UUD 1945

Rapat pertama PPKI dilaksanakan di *Pejambon* Jakarta. Sebelumnya Soekarno dan Hatta meminta Ki Bagus Hadikusumo, KH.Wachid Hasjim, Mr. Kasman Singodimedjo, Mr.Teuku Mohammad hassan, untuk mengkaji perihal rancangan pembukaan UUD sebagaimana tercantum dalam *Piagam Jakarta* yang dinuat oleh *BPUKI* pada tanggal 22 Juni 1945, khususnya berkaitan dengan kalimat *"Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya"*. Hal ini perlu dikaji karena pemeluk agama lain merasa keberatan jika kalimat itu dimasukan dalam UUD. Akhirnya setelah dilakukan pembicaraan yang dipimpin oleh Hatta, dicapai kata sepakat bahwa kalimat tersebut dihilangkan dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Rapat pleno kemudian dimuali pada pukul 11.30 di bawah pimpinan Soekarno dan Hatta. Dalam membicarakan UUD ini rapat berlangsung lancar, yakni sekitar dua jam rapat telah berhasil menyepakati bersama rancangan Pembukaan dan UUD Negara Republik Indonesia. Rancangan yang dimaksud adalah *Piagam Jakarta* yang dibuat oleh BPUPKI, dan dengan sedikit perubahan disahkan menjadi UUD yang terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh yang terdiri dari 37 Pasal, 4 Pasal Aturan Peralihan dan 2 Ayat Aturan Tambahan disertai dengan penjelasan. Dengan demikian Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dalam hidup bernegara dengan menentukan arahnya sendiri.

2. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Dalam rapat untuk memilih presiden dan wakil presiden, tampil *Ottoiskandardinata* yang mengusulkan bahwa pemilihan dilakukan secara *mufakat*. Ia sendiri mengajukan Soekarno dan Hatta masing-masing sebagai presiden dan wakil presiden. Tentunya hal ini sesuai dengan UUD yang baru saja disahkan. Dalam musyawarah untuk mufakat, secara *aklamasi* peserta sidang menyetujui dan menetapkan *Soekarno* dan *Hatta* sebagai presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia, diiringi dengan lagu kebangsaan *Indonesia Raya*.

3. Pembagian wilayah Indonesia

Rapat PPKI tanggal 19 agustus 1945 memutuskan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi di seluruh bekas jajahan Hindia Belanda. Kedelapan provinsi tersebut adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Borneo (Kalimantan), Maluku, Sulawesi, Sunda Kecil (Nusatenggara), Sumatera, dan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta.

4. Pembentukan Kementerian

Setelah rapat menetapkan wilayah, Panitia Kecil yang dipimpin oleh *Mr.Ahmad Soebardjo* menyampaikan laporannya. Diajukan oleh Panitia Kecil tersebut adanya 13 kementerian. Sidang kemudian membahas usulan tersebut dan menetapkan perihal kementerian sebagai berkut.

a. Departemen Dalam Negeri
b. Departemen Luar Negeri
c. Departemen Kehakiman
d. Departemen Keuangan
e. Departemen Kemakmuran
f. Departemen Kesehatan
g. Departemen Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan
h. Departemen Sosial
i. Departemen Pertahanan
j. Departemen Perhubungan
k. Departemen Pekerjaan Umum

Kemudian rapat memutuskan adanya 12 departemen dan 1 kementerian negara.

5. Pembentukan Komite Nasional Indonesia

Tanggal 22 Agustus 1945 PPKI kembali menyelenggarakan rapat pembentukan *KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat)* yang akan mengantikan PPKI. Soekarno dan Hatta

mengangkat 135 orang anggota KNIP yang mencerminkan keadaan masyarakat Indonesia. Seluruh anggota PPKI kecuali Soekarno dan Hatta menjadi anggota KNIP yang kemudian dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945. Adapun susunan pengurus KNIP adalah sebagai berikut.

Ketua KNIP : Mr. Kasman Singodimejo
Wakil Ketua I : Sutarjo Kartohadikusumo
Wakil Ketua II : Mr.J.Latuharhary
Wakil Ketua III : Adam Malik

Adapun tugas dan wewenang KNIP adalah menjalankan fungsi pengawasan dan berhak ikut serta dalam menetapkan GBHN.

6. Membentuk Kekuatan Pertahanan dan Keamanan

Berdasarkan keputusan rapat pada tanggal 22 agustus 1945 yang telah menetapkan berdirinya KNIP dan BKR, maka pada tanggal 23 Agustus Presiden soekarno mengesahkan secara resmi berdirinya BKR sebagai badan kepolisian yang bertugas menjaga keamanan. Kebanyakan angota BKR terdiri dari mantan anggota PETA, KNIL, dan Heiho. Terpilih sebagai pimpinan BKR pusat adalah Kaprawi.

Dalam perkembangannya, kebutuhan untuk membentuk tentara tidak dapat diabaikan lagi setelah Sekutu membebaskan para serdadu Belanda bekas tawanan Jepang dan melakukan tindakan-tindakan yang mengancam pertahanan dan keamanan. Soekarno kemudian memanggil mantan Mayor KNIL Oerip Soemihardjo dari Yogyakarta ke Jakarta dan diberi tugas mebentuk tentara nasional. Berdasarkan maklumat presiden RI, maka pada tangal 5 Oktober berdirilah TKR (Tentara Keamanan Rakyat). Terpilih sebagai pimpinan TKR Soepriyadi (tokoh perlawanan tentara PETA terhadap Jepang di Blitar). Atas dasar maklumat itu, Oerip Soemihardjo segera membentuk Markas Besar TKR yang dipusatkan di Yogyakarta.

Dalam perkembangannya, TKR (Tentara Keamanan Rakyat) berubah menjadi TKR (Tentara Keselamatan Rakyat) pada tanggal 7 Januari 1946. Nama itu berubah kembali menjadi TRI (Tentara Republik Indonesia) pada tanggal 24 Januari 1946. Terakhir kemudian TRI berubah nama menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia) pada tanggal 3 Juni 1947, yakni tentara yang bukan semata-mata alat negara, melainkan alat rakyat dan alat bangsa Indonesia. Dengan demikian sampai pertengahan tahun 1947 pemerintah telah berhasil menyusun, mengkonsolidasi, dan sekaligus menyatukan alat pertahanan dan keamanan.

D. Sikap Rakyat Terhadap Proklamasi Kemerdekaan

Puncak perjuangan bangsa dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, adalah dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebagian besar rakyat Indonesia dapat dengan cepat menanggapi hakikat dari makna proklamasi itu. Namun demikian, ada juga yang menanggapi kemerdekaan itu adalah bebas dari segala-galanya, sehingga mereka berusaha melawan kekuatan yang selama ini membelenggunya, yang dalam hal ini kerap kali memunculkan apa yang disebut revolusi sosial. Sikap rakyat yang berbeda inilah yang pada gilirannya memunculkan perlawanan-perlawanan baik terhadap tentara Jepang maupun kepada penguasa peribumi yang pada jaman kolonial Belanda maupun Jepang berpihak kepada penjajah.

1. Rapat Raksasa Di Lapangan Ikada

Rakyat Indonesia, baik di pusat maupun di daerah, pada umumnya melakukan aksi-aksi yang mendukung diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia. Di pusat, dalam hal ini Jakarta para pemuda yang dipelopori oleh Komite van Aksi Menteng 31, menghendaki agar para pemimpin perjuangan kemerdekaan bertemu dengan rakyat dan berbicara di hadapan mereka mengenai kemerdekaan Indonesia sebagai puncak perjuangan bangsa. Rencana ini dilaksanakan dengan dua cara yaitu persiapan pengerahan massa dan menyampaikan rencana itu kepada presiden. Menanggapi rencana ini, presiden Soekarno dan wakil presiden Moh Hatta yang terpilih secara aklamasi oleh PPKI, menyetujui rencana tersebut, demikian juga dengan para menteri yang telah dilantik.

Masalah yang menjadi perhatian adalah sikap tentara Jepang dengan rencana tersebut. Bagaimanapun juga presiden harus mempertimbangkannya dengan matang agar tidak terjadi bentrokan dengan massa. Presiden kemudian memutuskan untuk mengadakan sidang kabinet yang tempatnya di kediaman presiden. Sidang kabinet diselenggarakan pada tanggal 9 September 1945 dan berlangsung sampai tengah malam, sehingga sidang ditunda sampai pukul 10.00 pagi. Pada pagi harinya sidang dilanjutkan lagi di Lapangan Banteng Barat dan dihadiri oleh para pemimpin pemuda atau para pemimpin Badan Perjuangan. Para pemimpin pemuda menghendaki agar pertemuan antara pemimpin bangsa dengan rakyatnya tidak di batalkan. Akhirnya dengan berbagai pertimbangan rapat menyetujui rencana itu.

Presiden dan wakil presiden serta para menteri kemudian menuju ke Lapangan Ikada. Ternyata lapangan Ikada telah dipenuhi oleh massa yang lengkap dengan senjata tajam. Tampak pula tentara Jepang bersiap siaga senjata lengkap dan tank-tanknya. Melihat kondisi ini tampaknya bentrokan antara pasukan Jepang dengan massa dapat terjadi sewaktu-waktu. Sebelum masuk mobil presiden dan wakil presiden diberhentikan sebentar oleh komandan jaga untuk kemudian dipersilahkan masuk ke Lapangan Ikada. Soekarno kemudian menuju panggung dan menyampaian pidato singkat. Dalam pidatonya, Soekarno meminta dukungan dan kepercayaan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mematuhi kebijaksanaan-kebijaksanaannya, patuh, dan disiplin. Kemudian Soekarno memerintahkan massa untuk bubar dengan tertib, dan himbauan itu ternyata dipatuhi oleh massa. Melihat fenomene ini, rapat raksasa di Lapangan Ikada ini adalah manifestasi pertama dari kewibawaan pemerintah Republik Indonesia kepada rakyatnya. Sekalipun rapat ini berlangsung singkat, tetapi telah berhasil mempertemukan rakyat dengan para pemimpinnya dan sekaligus memberikan kepercayaan rakyat kepada para pemimpinnya.

2. Tanggapan Daerah Terhadap Proklamasi

Jika di pusat terjadi luapan massa dalam rangka mendukung Indonesia merdeka, maka di daerah juga terdapat aksi-aksi spontan menanggapi hal itu.

a. Peristiwa di Surabaya

Dukungan spontan rakyat terjadi di beberapa daerah di Indonesia berupa perebutan kekuasaan, baik dengan jalan kekerasan maupun dengan jalan perundingan. Permusuhan antara rakyat dengan orang-orang Belanda meledak pertama kali di Surabaya pada tanggal 19 September 1945 di Hotel Yamato. Peristiwa ini dipicu ketika orang-orang Belanda bekas tawanan tentara Jepang menduduki Hotel Yamato dan mengibarkan bendera merah-putih-biru. Para pemuda tidak dapat menerima pengibaran bendera tersebut. Tanpa memperdulikan penjagaan yang ketat dari tentara Jepang, beberapa pemuda berhasil memanjat atap hotel dan menurunkan bendera Belanda yang berkibar di atasnya. Mereka menyobek bagian bendera yang berwarna biru, dan kemudian mengibarkannya kembali, sehingga tinggallah bendera merah putih. Peristiwa ini disertai dengan perkelahian massal antara orang-orang Belanda melawan para pemuda Indonesia, yang mengakibatkan tewasnya Kapten Polegman. Selanjutnya pada tanggal 20 September

para pemuda mengadakan pawai keliling mendukung kemerdekaan tanpa memperdulikan larangan tentara Jepang.

Laskar pemuda berdiri di Surabaya pada tanggal 23 September 1945 dengan nama PRI (Pemuda Republik Indonesia) yang pimpinannya adalah Sumarsono, Kaslan, Supardi, Ruslan Wijaya, Krissubanu, dan Sutomo yang kemudian lebih dikenal dengan nama Bung Tomo. Sasaran para pemuda selanjutnya adalah markas tentara Jepang sebagai lambang kekejaman tentara Jepang dengan cara menyegelnya. Namun demikian pertempuran selama 5 jam tidak dapat dihindarkan, sehingga mengakibatkan 25 pemuda gugur dan 60 luka-luka serta 15 tentara Jepang tewas.

b. Peristiwa di Bandung

Gedung-gedung pemerintahan berhasil diambil alih pada bulan September. Tokoh pemuda Sutoko segera melakukan perundingan dengan panglima tentara Jepang di Jawa Barat Jenderal Mabuchi berkaitan dengan masalah senjata. Pada tanggal 14 Oktober 1945 telah disepakati suatu perjanjian oleh Mabuchi dan Puradireja yang saat itu menjabat Residen Priaangan yang isi pokoknya adalah sebagai berikut.

1). Bendera merah putih bleh dikibarkan digudang-gudang senjata milik Jepang.
2). Diadakan patroli bersama yang dipimpin oleh pihak Indonesia.
3). Jepang memiliki tanggung jawab penuh terhadap penjagaan gudang.
4). Residen Puradireja, Mabuchi, dan BKR setempat serta KNI Daerah mengatur masalah pengangkutan dan penggunaan barang-barang terutama senjata yang ada dalam gudang itu.

Aalasan Residen menerima perundingan itu tidak jelas, barangkali karena percaya bahwa Jepang akan menyerahkan senjata. Ketika Jepang melanggar janji tidak mau menyerahkan senjata, para pemuda menyalahkan residen dan pihak yang menyetujui perundingan itu, sehingga mereka harus menebusnya dengan nyawanya. Kemudian pada tanggal 6 Oktober para pemuda melakukan aksi boikot terhadap orang-orang Belanda bekas tawanan Jepang. Mereka kemudian menyerbu gudang senjata dan berhasil merebutnya.

c. Peristiwa di Semarang

Setelah para pemuda berhasil merebut kekuasaan, kemudian terjadi bentrokan yang dahsyat antara para pemuda melawan Jepang. Pihak Jepang merasa terancam karena para pemuda berusaha merebut senjata mereka. Pemimpin pemuda Semarang yang terkenal adalah S Karno dan Ibnu Parna. Peristiwa ini dipengaruhi oleh aksi Mabuchi di Bandung. Dalam peristiwa ini pembunuhan terhadap sordadu Jepang kerap kali dilakukan oleh para pemuda.

Tanggal 14 Oktober 1945 para pemuda mengangkut 400 orang tawanan Jepang dari Pabrik Gula Cepiring ke Semarang yang tepatnya di Penjara Bulu. Sebelum sampai di Penjara Bulu, banyak tawanan yang melarikan diri dan meminta perlindungan kepada Batalyon Kido. Para pemuda menjadi marah, sehingga berusaha menguasai kantor pemerintah. Orang-orang Jepang banyak yang dipenjarakan. Pada pagi harinya pasukan Jepang menyerang kota Semarang yang kesatuannya di Jatingaleh, sehingga menimbulkan Pertempuran Lima Hari di Semarang, yang menimbulkan korban jiwa dari kedua belah pihak hampir 1000 orang.

Dampak dari Pertempuran Lima Hari, para pemuda terpaksa harus mundur dari Semarang, sehingga kota ini sepenuhnya dikuasai Jepang. Pada waktu berikutnya pasukan Sekutu di bawah pimpinan Jenderal Bethel sampai di Semarang, dan mendapatkan kota Semarang dalam keadaan tenang.

d. Peristiwa di Yogyakarta

Pengambilalihan secara serentak dimulai pada tanggal 26 September 1945 dan berlangsung sampai dengan tangal 7 Oktober. Para pegawai baik instansi pemerintah maupun perusahaan milik Jepang melakukan aksi mogok. Mereka memaksa Jepang menyerahkan semua kantor dan perusahaan kepada pihak Indonesia. KNI Daerah Yogyakarta mengumumkan bahwa kekuasaan daerah telah dikuasai oleh pemerintah RI.

Upaya merebut senjata Jepang juga dilakukan oleh para pemuda yang tergabung dalam BKR Hal ini dilakukan karena upaya perundingan untuk pelucutan senjata mengalami jalan buntu. Tanggal 7 Oktober malam pemuda BKR dan Pemuda Polisi Istimewa bergerak menuju Kota Baru, dan menyerbu markas Otsuka Butai. Korban mencapai 18 orang dari pemuda Polisi, namun kemudian Otsuka Butai menyerah. Peristiwa spontan juga tidak mengesampingkan peran Sultan Yogyakarta. Bahkan pada

tanggal 26 Oktober 1945 Sultan dan Paku Alam membentuk badan perjuangan yang diberi nama Laskar Rakyat Indonesia.

e. Peristiwa di Surakarta

Para pemuda yang tergabung dalam Barisan Pelopor, Angkatan Muda, mempelopori upaya pengambilalihan kekuasaan di Surakarta. Di kota ini pengambilalihan kekuasaan tidak hanya dilakukan atas bangunan pemerintah, melainkan juga pabrik-pabrik gula seperti didaerah Klaten dan Sragen. Pada tanggal 1 Oktober 1945 para pemuda yang tergabung dalam badan-badan perjuangan mengadakan pawai kemerdekaan. Pada waktu berikutnya mereka berusaha merebut bangunan dan pangkalan militer. Mereka berhasil memaksa Jepang untuk menyerahkan senjata pada tanggal 6 Oktober 1945.

f. Peristiwa Di Kalimantan

Tidak hanya di Jawa, di luar Jawa pun seperti halnya di Kalimantan aksi spontan mendukung kemerdekaan juga terjadi. Di Balik Papan misalnya, pada tanggal 14 Nopember 1945 sekitar 800 orang Berkumpul di depan kompleks NICA sambil membawa bendera merah putih. Namun tentara Sekutu yang sudah mendarat mengeluarkan ultimatum melarang semua kegiatan plitik seperti demonstrasi dan mengibarkan bendera merah putih. Tetapi kaum nasionalis dengan gigih tetap melaksanakannya.

g. Peristiwa di Banda Aceh

Para pemuda dan tokoh masyarakat membentuk badan-badan perjuangan seperti API (Angkatan Pemuda Indonesia) yang dibentuk pada tanggal 6 Oktober 1945. Jepang merasa jengkel dan memanggil para pemimpin pemuda dan menyampaikan bahwa sekalipun Jepang telah kalah, namun keamanan dan ketertiban masih merupakan tanggung jawab Jepang. Oleh karena itu pembentukan badan-badan perjuangan yang tanpa ijin Jepang harus dihentikan. Jepang juga meminta badan yang telah dibentuk untuk dibubarkan. Tetapi para pemuda menolak keinginan Jepang tersebut. Bahkan sejak saat itu para pemuda berusaha menyegel kantor-kantor pemerintah dan mengibarkan

bendera merah putih. Bentrokan tidak dapat dihindarkan, sementara para pemuda berusaha merebut persenjataan mlik Jepang.

h. Peristiwa di Gorontalo dan Sumbawa

Perebutan senjata di markas-markas Jepang dilakukan oleh para pemuda pada tanggal 13 September 1945. Para pemuda Gorontalo kekuatannya mencapai 600 orang dan cukup terlatih menolak setiap ajakan dari pasukan Australia untuk berunding. Sedangkan di Sumbawa para pemuda berhasil merebut senjata dari Jepang pada bulan Desember 1945. Terjadi bentrokan di Gempe antara 200 orang pemuda melawan Jepang. Hal serupa terjadi juga di Sape dan Raba, di mana para pemuda berusaha merebut senjata dari markas Jepang.

i. Peristiwa di Bali dan Biak

Dukungan spontan para pemuda Bali terlihat dari aktivitasnya dalam menanggapi kemerdekaan. Para pemuda berhasil membentuk beberapa badan perjuangan seperti AMI dan PRI pada bulan Agustus setelah proklamasi. Mereka mengusahakan perundingan dengan pihak Jepang tetapi selalu mengalami jalan buntu. Akhirnya pada tanggal 13 Desember 1945 mereka melakukan gerakan serentak untuk mengambil alih kekuasaan Jepang, meskipun upaya itu gagal. Di Biak juga muncul penyerangan terhadap kam NICA markas Sorido pada tanggal 14 Maret 1948. Akan tetapi upaya tersebut gagal bahkan dua orang pemimpinnya di hukum mati.

j. Peristiwa Di Palembang

Pengalihan kekuasaan di palembang berjalan tanpa insiden, sebab orang-orang Jepang telah menghindar ketika terjadi demonstrasi. Pengalihan kekuasaan ini terjadi pada tanggal 8 Oktober 1945, di mana AK Gani, Residen sumatera Selatan bersama pegawai Gunseibu menaikkan bendera merah putih dalam suatu upacara. Pada saat itulah dimaklumatkan bahwa seluruh Karesidenan Palembang berada di bawah pemerintahan Republik Indonesia.

k. Peristiwa di Makasar

Para pemuda di Makasar juga berusaha menyegel gedung-gedung pemerintah. Mereka membentuk badan perjuangan dengan nama Barisan Berani Mati. Namun pada tanggal 28 Oktober 1945 pasukan Australia melucuti para pemuda yang akan berusaha menduduki gedung-gedung pemerintah. Semenjak itu gerakan pemuda yang tegabung dalam Barisan Berani Mati dipindahkan dari Ujungpandang ke Plombobangkeng. Itulah beberapa peristiwa spontan dalam rangka mendukung kemerdekaan, yang sebenarnya masih banyak lagi peristiwa-peristiwa lain di berbagai daerah di Indonesia.

BAB II
PERJUANGAN MEMEPRTAHANKAN KEMERDEKAAN

A. Perjuangan Bersenjata

Setelah proklamasi kemerdekaan, bukan berarti bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah selesai. Tetapi justru sebaliknya tugas kita semakin berat yakni bagaimana mempertahankan kemerdekaan yang telah dicapai dengan susah payah oleh rakyat Indonesia, dan bagaimana mengisi kemerdekaan ini. Kedatangan tentara Sekutu yang diboncengi tentara NICA adalah ancaman serius bagi kelangsungan kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan terus berlangsung baik melalui perang maupun diplomasi.

Ketika Belanda kalah oleh Jepang, lalu Belanda membentuk NICA di *Brisbone, Australia,* dibawah *Van Mook*. Setelah Jepang kalah oleh pasukan sekutu, Belanda ingin kembali ke Indonesia. Alasan utamanya adalah alasan ekonomis dengan menyebutkan bahwa Indonesia bukan lagi jajahan Belanda, melainkan wilayahnya yang sejajar dengan wilayah Belanda lainnya di Eropa. Hal ini dimaksudkan agar kembalinya Belanda ke Indonesia memiliki dasar hukum internasional yang kuat. Bahkan pengakuan bahwa Indonesia adalah bagian dari wilayah Belanda di seberang diterima oleh dunia Internasional.

Pasukan sekutu yang mengurusi wilayah Indonesia tergabung dalam *AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indies)* pimpinan *Sir Philip Christison* dari pasukan Inggris. Adapun tugas AFNEI adalah melucuti tentara Jepang, membebaskan tawanan perang, dan melakukan perundingan dengan pihak RI.

Perundingan dilakukan antara pihak Inggris yang dipimpin oleh *Brigjen AWS Mallaby* dengan para wakil dari pihak RI. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :

1. Tentara Inggris tidak akan memasukkan serdadu Belanda.
2. Menjaga kemanan dan ketentraman bersama.
3. Kerjasama pemerintah RI dengan Sekutu.
4. Inggris akan melucuti tentara Jepang.

Namun dalam pelaksanaannya, Inggris mengingkari kesepakatannya, bahkan secara sepihak AFNEI melakukan perjanjian dengan NICA bahwa status Indonesia dikembalikan pada kekuasaan Belanda. Kesepakatan ini telah menodai proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan sangat bertentangan dengan semangat perjuanagn bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pertempuran antara tentara Indonesia dengan tentara Sekutu ataupun tentara Belanda tidak dapat dihindarkan. Pertempuran terjadi di seluruh wilayah Indonesia yang diduduki oleh pasukan Sekutu maupun Belanda.

1. Pertempuran Surabaya

Pasukan sekutu pimpinan *Mallaby* mendarat di *Tanjung Perak* Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Kehadiran pasukan Sekutu yang tergabung dalam AFNEI ini menimbulkan kecurigaan tentara dan para pemuda, bahwa kedatangannya diboncengi oleh NICA. Ternyata dugaan mereka benar dan bahkan banyak tawanan Belanda yang dibebaskan, dan mereka hanya melucuti tentara Jepang saja. Akhirnya pada tanggal 27 Oktober 1945 pertempuran tidak dapat dihindarkan antara pasukan sekutu dengan para pejuang bangsa Indonesia. Dalam pertempuran yang terus menjalar ke seluruh kota, mengakibatkan tewasnya *Brigjen Mallaby*. Pasukan sekutu kemudian mengutus *Mayjen Mansergh* untuk membalas kematian Mallaby. Tanggal 10 November Surabaya diserang baik dari darat, laut maupun udara oleh pasukan sekutu. Namun para pejuang terus berusaha mempertahankan kota itu sampai hampir saja tiga minggu lamanya. Tetapi karena kekuatan yang tidak seimbang, akhirnya Surabaya dikuasai oleh sekutu. Markas pertahanan Surabaya dipindahkan ke desa *Lebani Waras*, yang dikenal dengan nama *Markas Kali,* untuk terus melakukan perjuangan meskipun dengan kekuatan yang sangat kecil.

2. Pertempuran di Ambarawa

Pada tanggal 20 November sampai dengan 15 Desember 1945, terjadi pertempuran sengit di *Ambarawa* antara pemuda Indonesia dengan TKR melawan pasukan Inggris. Peristiwa ini dipicu ketika pasukan sekutu mendarat di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945, mereka diperbolehkan untuk mengurus tawanan perang yang berada di penjara Ambarawa dan Magelang. Sekutu ternyata diboncengi tentara NICA yang kemudian mempersenjatai bekas tawanan itu. Hal ini tidak dapat diterima oleh para pemuda dan TKR sehingga mengakibatkan *Insiden Magelang* yang kemudian mendorong *Pertempuran Ambarawa*. Pasukan Sekutu terdesak dan akhirnya pada tanggal 15 Desember 1945 meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke Semarang.

3. Pertempuran Medan Area

Pada tanggal 9 Oktober 1945, pasukan sekutu di bawah pimpinan *Brigjen TED Kelly* mendarat di Sumatera Utara. Disinipun pasukan Sekutu diboncengi orang-orang NICA. Dalam rangka menghormati pasukan Sekutu, pemerintah RI diperkenankan menempati beberapa hotel di kota Medan. Sebagian mereka ditempatkan di *Binjai* dan *Tanjung Manawa*. Mereka kemudian membebaskan para tawanan perang dan bahkan mempersenjatainya. Ternyata orang-orang NICA dan kelompok tawanan yang dibebaskan diberi senjata dan dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Sikap orang-orang Belanda yang congkak menimbulkan rasa tidak senang dikalangan para pemuda dan TKR. Hal ini lebih dipertajam lagi ketika mereka dibentuk menjadi *"Medan Batalyon KNIL"*. Faktor inilah yang memicu timbulnya berbagai pertempuran pada tanggal 13 Oktober 1945.

Pada tanggal 1 Desember 1945, pasukan Sekutu memasang papan-papan yang bertuliskan *Fixed Boundaris Medan Area* di berbagai sudut kota di *Medan*. Tindakan ini semakin membakar semangat para pemuda dan TKR. Pada tanggal 10 Desember 1945 berusaha menghancurkan konsentrasi TKR di *Trepas* akan tetapi berhasil digagalkan.

Di *Tebing Tinggi* pada tanggal 10 Agustus 1946 setelah Sekutu menguasai kota Medan, diadakan pertemuan antara komandan-komandan pasukan yang berjuang di *Medan Area*. Dalam pertemuan itu diputuskan bahwa dibentuk *Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area* yang markasnya dipusatkan di *Sudi Mengerti (Trepes)*. Dari sinilah para pejuang yang tergabung dalam resimen ini meneruskan perjuangan di *Medan Area*.

4. Peristiwa Bandung Lautan Api

Seperti halnya di kota-kota lain di Indonesia, di kota Bandung juga aksi perjuangan melawan sekutu berlangsung. Pasukan sekutu menduduki Bandung sejak bulan Oktober 1945. Para pemuda dan TKR juga berusaha melucuti tentara Jepang dan merebut senjatanya. Pasukan sekutu menyerukan bahwa para pemuda harus meneyrahkan senjata hasil rampasan. Sekutu juga memerintahkan agar TKR meninggalkan kota Bandung Utara selambat-lambatnya tanggal 29 Oktober 1945. Namun maklumat ini tidak diindahkan oleh TKR pimpinan *Aruji Kartawinata*, bahkan melakukan penyerangan-penyerangan terhadap markas sekutu.

Maklumat pertama tidak diindahkan, Sekutu kemudian mengeluarkan maklumat yang kedua bahwa TKR yang saaat itu namanya diganti menjadi TRI harus meninggalkan kota Bandung. Atas berkat maklumat Markas Besar TRI di Yogyakarta perlahan-lahan TRI meninggalkan kota Bnadung sambil melakukan sabotase dan penyerangan terhadap markas Sekutu di kota Bandung. Serangan-serangan ini menimbulkan kebakaran-kebakaran sehingga *Bandung Selatan* dibumihanguskan. Peristiwa inilah yang kerap kali dikenal sebagai *Bandung Lautan Api.*

5. Serangan Umum 1 Maret 1949

Perlawanan rakyat Indonesia sampai hengkangnya Belanda dari bumi Indonesia terus beralngsung baik di Jawa maupun luar Jawa. Beberapa pertempuran sengit terjadi antara pasukan Indonesia melawan Sekutu ataupun melawan Belanda. Perlawanan lain misalnya terjadi di *Bali, Manado, Biak,* dan *Kalimantan.* Dalam hal perjuangan ini, peristiwa besar yang patut dicatat dalam sejarah perjuangan adalah peristiwa *Serangan Umum 1 Maret 1949*.

Setelah dua kali Belanda melakukan Agresi Militer, yakni tahun 1947 dan 1949, Belanda merasa bahwa pemerintahan Indonesia telah lumpuh, yang ada hanyalah kekuatan Belanda. Belanda mengklaim bahwa TNI telah kalah dan mundur kehutan-hutan melakukan gerilya. Dugaan ini ternyata meleset karena pada tanggal 1 Maret 1949 TNI melakukan serangkaian serangan yang dipersiapkan dengan rapih. Insiden ini kemudian dikenal dengan nama *Serangan Umum 1 Maret 1949*.

Serangan terorganisir ini dilakukan oleh TNI dibawah komando *Letkol Soeharto.* Serangan dilakukan dalam 5 sektor yakni sektor Uatara yang dipimpin oleh *Mayor Kusno*, sektor Barat *Letkol Ventje Samual,* sektor Selatan dan Timur oleh *Mayor Sarjono*, dan kota dipimpin oleh *Letnan Amir.* Serangan dimulai pada pukul 06.00 sampai dengan pukul 12.00 WIB dan berhasil memporakporandakan tentara Belanda dan memaksanya untuk keluar dari Yogyakarta.

Namun pasukan TNI yang berhasil menguasai Yogyakarta selama 6 jam segera keluar dari kota Yogyakarta sebelum pasukan Belanda yang lebihh besar kembali. Peritiwa ini dampaknya cukup besar dalam rangka membakar semangat TNI diwilayah lain yang juga berhadapan dengan Agresi Militer Belanda. Adapun keberhasilan dari serangan ini tidak terlepas dari peran penting *Sri Sultan Hamengkubuwono IX* yang memberi peluang kepada TNI untuk bergerak bebas menyusup di dalam kota Yogyakarta.

B. Perjuangan Diplomasi

Untuk memperoleh pengakuan dunia internasional mengenai kemerdekaan RI, maka perjuangan Diplomasi adalah jalan yang strategis. Perjuangan diplomasi dimaksudkan untuk mengukuhkan bahwa Indonesia telah berdaulat dan mengharapkan PBB untuk mendukungnya dan mendesak agar Belanda segera hengkang dari bumi Indonesia. Untuk kepentingan ini, Indonesia harus menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara lain maupun PBB untuk mendukung perjuangannya melalui diplomasi.

1. Menjalin Hubungan Internasional

Untuk menarik dukungan Internasional, maka Indonesia harus menjalin hubungan yang baik. Untuk memperjuangkannya, maka dapat dilakukan langsung melalui PBB dengan mengajukan masalah Indonesia dalam Sidang Keamanan PBB, maupun secara tidak langsung dengan membina hubungan yang baik dengan negara-negara yang dapat mendukung dalam persidangan di PBB. Upaya menarik dukungan ini berupa menjalin hubungan yang baik dengan Australia ketika bergabung dalam Sekutu, dengan India, negara-negara Arab, dan berjuang melalui PBB.

2. Perjanjian Linggajati

Perjuangan diplomasi yang diupayakan oleh pemerintah Indinesia dalam tahap awal masa perundingan adalah diselenggarakannya *Perjanjian Linggajati* pada tanggal 15 November 1946. dalam hal ini Inggris berperan penting dengan mengutus *Lord Killearn* ke Indonesia untuk menjadi perantara perundingan Indonesia dengan Belanda. Adapun *Linggajati* adalah sebuah kota dekat Cirebon di *Lereng Gunung Cerme* Jawa Barat. Dalam perundingan itu utusan Indonesia dipimpin oleh *Perdana Menteri Syahrir,* sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh *Schermerhorn.*

Adapun pokok utama *Perjanjian Linggajati* yang terdiri dari 17 pasal ketentuan itu adalah sebagai berikut :

a. Pemerintah Belanda secara de facto mengakui pemerintahan RI atas Jawa, Madura, dan Sumatera.
b. Pemerintah Belanda dan RI membentuk Negara Indonesia Serikat yang wilayahnya meliputi seluruh Hindia Belanda.
c. Dibentuk Uni Indonesia Belanda.

Dicapainya kesepakatan oleh kedua belah pihak, bukan berarti perjanjian itu langsung dapat dilaksanakan. Kesepakatan sudah dapat dilaksanakan apabila parlemen baik Indonesia maupun Belanda menyetjuinya. Parlemen Indonesia dalam hal ini adalah KNIP. Dalam hal ini parlemen Belanda tidak langsung menyetujui perjanjian tersebut. Namun setelah ada keyakinan bahwa hal itu bersifat sementara, dan masih akan diadakan pengaturan lebih lanjut, maka parlemen Belanda menyetujuinya. Sikap ragu-ragu pada awal perjanjian ini diakibatkan oleh kalangan konservatif di parlemen Belanda merasa khawatir kehilangan Indonesia.

Sedangkan KNIP juga tidak langsung menyetujui Perjanjian Linggajati, karena dianggap terlalu menguntungkan pihak Belanda, dan tidak sejalan dengan tuntutan kemerdekaan. Dengan beberapa kali pengajuan nota keberatan baik dari perlemen Belanda maupun KNIP akhirnya Perjanjian Linggajati disahkan di Jakarta pada tanggal 25 November 1946. Dalam pengesahan perjanjian ini delegasi Indonesia terdiri dari *Perdana Menteri Syhrir, Dr. AK. Gani, Mr. Susanto Tirtoprodjo,* dan *Mr. Moh Roem*. Sedangkan delegasi Belanda terdiri atas *Prof. Schermerhorn, Van Poll,* dan *Dr. Van Mook*.

Adapaun yang menjadi alasan RI menerima Pejanjian Linggajati adalah sebagai berikut.

a. Masih lemahnya kekuatan militer Indonesia menjadikan pertimbangan bagi pemerintah RI untuk menempuh jalan damai.
b. Dengan disepakatinya perjanjian itu, RI mempunyai kesempatan untuk meningkatkan kekuatan militernya.
c. Pilihan cara damai akan mendapat simpati dunia internasional untuk memperjuangkannya lebih lanjut dalam perjanjian-perjanjian yang lain.

Sikap pemerintah RI yang lunak dalam perjanjian ternyata mendapat simpati dunia internasional. India adalah negara yang pertama mengakui kedaulatan RI, yang kemudian diikuti oleh negara-negara Arab seperti (Saudi Arabia, Libanon, Mesir, Yaman). Kemudian Inggris, Amerika Serikat, Afghanistan, Burma, dan Uni Sovyet. Akan tetapi perjanjian

Linggajati telah menurunkan pamor *Kabinet Syahrir* yang dianggap telah merugikan pihak Indonesia, dan harus dibayar dengan kejatuhannya dari kabinet. Pro kontra juga terjadi pada kalangan badan-badan perjuangan, sehingga memunculkan insiden-insiden yang berupa perlawanan terhadap Belanda.

3. Agresi Militer Belanda 21 Juli 1947

Pada saat memikirkan perihal perjanjian Linggajati untuk dilaksanakannya atau tidak, Belanda secara sepihak melancarkan serangan ke daerah-daerah RI baik di Jawa maupun di Luar Jawa. Belanda berdalih bahwa RI sebagai tidak bersedia mentaati Perjanjian Linggajati. Belanda mengerahkan seluruh kekuatannya baik pasukan darat maupun udara, dan membombardir ibu kota RI di Yogyakarta.

Jika dipandang dari segi taktik perang maupun diplomasi, Belanda selalu licik dalam menjalankan manuvernya. Sebenarnya penyerangan serentak Belanda ini memiliki tujuan untuk melenyapkan pemerintahan RI, merebut pusat-pusat perdagangan, dan berkeinginan untuk menghancurkan TNI. Dengan penyerangan tidak berdasar itu maka habislah riwayat Perjanjian Linggajati.

4. Upaya Diplomasi

Ditengah suasana perang, dimanaTNI kekuatannya diporakporandakan oleh kekuatan musuh, maka upaya diplomasi terus diupayakan oleh kelompok moderat. Mereka menunjukkan bahwa Indonesia tidak menghendaki aksi penyerangan-penyerangan melainkan Belandalah yang telah memulainya. Melalui perjuangan diplomasi, muncullah reaksi dunia internasional terhadap penyerangan-penyerangan yang dilakukan Belanda. Amerika Serikat menyerukan agar Indonsia dan Belanda melakukan gencatan senjata. Australia mengajukan resolusi pada Dewan Keamanan PBB. Sementara Uni Soviet mendesak agar pasukan Belanda ditarik dri wilayah RI. Pad atanggal 3 Agustus 1947 Belanda menerima resolusi Dewan Keaman PBB untuk melakukan gencatan senjata. Baik TNI maupun tentara Belanda tidak menjamin gencatan senjata. Bahkan pihak Belanda sering melakukan pelanggaran-pelanggaran terbukti dengan dibiarkannya tentara Belanda terus bergerak melakukan penyerangan dan pengepungan atas wilayah RI.

5. Perjanjian Renvile 8 Desember 1947

Upaya diplomasi terus diupayakan baik oleh pihak Indonesia maupun dunia internasional yang menaruh simpati terhadap perjuangan rakyat Indonesia. Amerika Serikat mengusulkan agar DK PBB membentuk suatu komisi untuk perundingan Indonesia-Belanda. Usul itu diterima oleh PBB dan dibentuklah *Commitee of Good Office (Komisi Jasa-jasa Baik)* sebagai penengah konflik Indonesia-Belanda. Indonesia memilih *Australia,* sedangkan Belanda memilih *Belgia* sebagai wakilnya, dan kemudian memilih *Amerika Serikat* sebagai negara ketiga.

Komisi Jasa-jasa Baik kemudian dikenal dengan *KTN (Komisi Tiga Negara)* yang pada akhirnya berhasil mempertemukan pihak Belanda dan RI di atas sebuah kapal yang bernama Renvile pada tanggal 8 Desember1947. Perjanjian ini kemudian dikenal dengan nama Perjanjian Renvile. Tampil perwakilan Indonesia yang dipimpin oleh *Amir Syarifuddin* sedangkan perwakilan Belanda dipimpin oleh *Abdulkadir Wijiyoatmojo.* Pada tanggal 17 Januari 1948 Perjanjian Renvile disahkan oleh kedua belah pihak meskipun perjuangannya sangat alot karena tarik menarik kepentingan.

Adapun kesepakatan-kesepakatan dari perjanjian Renvile adalah sebagai berikut.

a. Kesepakatan untuk melakukan gencatan senjata.
b. Disetujuinya Garis Demokrasi Van Mook.
c. Kesepakatan untuk menyelesaikan konflik dengan cara damai dan dengan bantuan KTN.
d. Dibentuknya Negara Indonesia Serikat dimana RI hanya menjadi bagian saja dari NIS.
e. Kedaulatan Indonesia tetap di tangan Belanda selama masa peralihan sampai kemudian kedaulatan diserahkan kepada NIS.

Dengan diterimanya Perjanjian Renvile ini, maka wilayah RI semakin sempit. Hal ini menimbulkan reaksi keras baik dari para pemuda maupun TNI. Bahkan pejuang diplomasi dianggap telah gagal dalam mempertahankan keutuhan RI. Namun demikian basis-basis pertahanan TNI terpaksa harus hijrah ke Yogyakarta karena adanya *Garis Van Mook* yang mengharuskan mereka untuk mengosongkan basis-basis pertahanan di belakang garis itu. Dalam hal ini, banyak anggota TNI yang kecewa dan tidak mau hijrah ke Yogyakarta. Mereka kemudian melakukan pemberontakan-pemberontakan seperti DI TII Kartosuwiryo di Jawa Barat, dan DI TII Amir Fatah di Jawa Tengah. Di luar Jawa juga terdapat pihak-pihak yang tidak mengakui Perjanjian Renvile. Bahkan di parlemen sendiri banyak pihak yang menolak sehingga mengakibatkan jatuhnya *Kabinet Amir Syarifuddin.*

Di tengah upaya pelaksanaan Perjanjian Renvile, Belanda tetap melakukan aksi liciknya. Pada tanggal 25 Desember 1947, Belanda secara sepihak membentuk negara-negara boneka.

Negara Sumatera Timur (NST) didirikan pada 25 Desember 1947. Banyak lagi negara boneka yang didirikan oleh Belanda seperti Negar Indonesia timur (NIT), Negara Madura, Negara Jawa Timur dan lain sebagainya.

6. Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948

Berdasarkan kesepakatan RI dan Belanda serta KTN, akan dibentuk negara federal. Sejalan dengan itu Belanda terus menerus melakukan propaganda dan mempersempit daerah kekuasaan RI. Bahkan Belanda berharap agar RI lenyap terbukti dengan penyerangan-penyerangan Belanda yang mengalami puncaknya pada tanggal 19 Desember 1948.

Dengan adanya agresi militer II ini hampir semua kota-kota di Indonesia diduduki oleh Belanda, termasuk Ibu kota RI di Yogyakarta tidak luput dari penyerbuan Agresi II ini padahal dalam Perjanjian Renvile Belanda telah mengakui wilyah RI.

Meskipun hampir semua kota dapat diduduki oleh Belanda, namun dampaknya tidak menguntungkan pihak Belanda. Semangat berjuang semakin berkobar di kalangan rakyat Indonesia. Walaupun dilihat dari persenjataannya jauh berbeda, namun dalam menghadapi kelicikan pihak Belanda, bangsa Indonesia tidak dapat ditakut-takuti dengan persenjataan yang lengkap. Perjuangan terus dikobarkan baik dengan jalan perang maupun diplomasi.

7. Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI)

Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948, mengakibatkan Ibu kota RI Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. Presiden dan wakil presiden ditawan oleh Belanda. Dalam penangkapan itu, presiden sempat mengirimkan radiogram yang memberikan kekuasaan kepada *Syafruddin Prawiranegara* yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kemakmuran untuk membentuk *Pemerintah Darurat RI* di Sumatera. Soekarno dan Hatta ditangkap karena menolak maklumat Belanda untuk memerintahkan rakyat menghentikan perlawanan.

Atas dasar instruksi presiden tersebut, Syafruddin Prawiranegara kemudian membentuk PDRI *diBukittinggi, Sumatera Barat.* Syafruddin sendiri kemudian mengukuhkan dirinya sebagai pejabat presiden merangkap Menteri Pertahanan dan Penerangan. Dengan demikian PDRI telah memainkan peranan yang penting dalam sejarah perjuangan bangsa. Bahkan PDRI berani menunjukkan kepada Belanda dan dunia internasional bahwa RI masih ada. Hal ini menepis anggapan dan propaganda Belanda yang menyatakan bahwa RI sudah gulung tikar. Peran PDRI juga semakin nyata terbukti dengan instruksi Pejabat Presiden kepada wakil RI di PBB

yang isinya bahwa Indonesia bersedia melakukan gencatan senjata dan mengadakan persetujuan dengan Belanda. Tindakan PDRI ini telah mengangkat wibawa pemerintah Indonesia di mata internasional sekaligus menarik simpati dunia.

Ketika para pemimpin RI yang ditawan di Bangka melakukan perundingan dengan Belanda, para pemimpin PDRI merasa kecewa karena tidak ada pemberitaan. Dampaknya PDRI mencap bahwa seorang tawanan Belanda tidak pantas dan tidak berhak melakukan perundingan dengan Belanda. Persetujuan *Roem-Royen* yang dilaksanakan waktu itu dianggap bertentangan dengan semangat perjuangan bangsa Indonesia karena Belanda selalu ingkar janji. Bahkan mereka para pemimpin PDRI menolak kesepakatan *Roem-Royen* yang dianggap telah menghilangkan wibawa Indonesia.

Pada tanggal 13 Juli 1949, diselenggarakan pertemuan antara para pemimpin RI yang ditawan di Bangka dengan pimpinan PDRI untuk menyamakan pandangan. Perundingan tersebut menghasilkan bahwa (1) PDRI menyerahkan kepada KNIP dan pimpinan TNI keputusan mengenai hasil perjanjian Roem-Royen karena PDRI tidak dilibatkan, (2) PDRI mengembalikan mandat kepada pimpinan RI secara resmi. Ketidakpuasan para pimpinan PDRI inilah yang kelak memunculkan apa yang disebut PRRI Permesta *(Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia Perjuangan Rakyat Semesta)* yang dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara.

8. Perjanjian Roem-Royen

Dalam hubungan internasional, keberadaan RI dapat tetap ditunjukkan terbukti dengan upaya-upaya perundingan. Amerika Serikat pada tanggal 14 April 1949, memfasilitasi perjanjian RI dengan Belanda. Delegasi Indonesia diwakili oleh *Moh. Roem* sedangkan Belanda diwakili oleh *Van Royen*. Untuk menjadi fasilitas dalam pertemuan ini PBB membentuk *UNCI (United Nations Commision for Indonesia)* yang dipimpin oleh *Merle Cohran* dari Amerika Serikat.

Adapun ketentuan-ketentuan dari perjanjian Roem Royen tersebut adalah sebagai berikut :

a. Pemerintah RI harus menginstruksikan kepada para pejuang untuk menghentikan perlawanan.
b. Pimpinan dan pemerintah RI dikembalikan ke Yogyakarta.
c. Kerjasama dalam memulihkan keamanan dan perdamaian.

d. Belanda mendorong RI untuk menjadi bagian dari RIS dan mendapatkan sepertiga suara dalam senat federal.
e. Ikut serta dalam KMB di Den Haag dalam rangka mempercepat penyerahan kedaulatan RI.

Kesepakatan tesebut sangat merugikan pihak RI, dan sangat dimaklumi jika para pemimpin PDRI tidak menyetujuinya, karena dengan kesepakatan itu berarti :

a. RI hanya berkuasa di Yogyakarta.
b. Penarikan mundur pasukan Belanda hanya dari Yogyakarta saja.
c. Belanda tetap menganggap adanya negara-negara bagian yang diciptakannya.
d. RI hanya diwakili sepertiga dari jumlah anggota parlemen federal.

Namun demikian dalam rangka menghormati keputusan dan keterlibatan PBB, maka RI menerima perjanjian itu. Pemerintah RI untuk sementara mengalah dalam rangka menyusun strategi untuk mengenyahkan Belanda dari bumi Indonesia.

9. Konferensi Antar Indonesia

Perjanjian *Roem-Royen* memberi peluang kepada para pemimpin *BFO (Byeenkomst Voor Federal Overleg)* atau forum untuk Permusyawaratan Federal, untuk lebih bisa memainkan peranannya dalam NIS, BFO, dan berusaha membantu RI dengan harapan adanya balas jasa dari para pemimpin RI yang berupa otonomi dalam NIS. Inilah yang dibicarakan dalam *Konferensi Antar Indonesia.*

Pada tanggal 30 Juli-2 Agustus 1949, berlangsunglah Konferensi Antar Indonesia di Jakarta. Konferensi ini adalah tindak lanjut dari pertemuan tanggal 19-22 Juli yang diadakan di Jakarta. Konferensi Antar Indonesia ini dihadiri oleh para pemimpin RI dan BFO yang menghasilkan keputusan sebagai berikut :

a. BFO mendukung berdirinya NIS yang memiliki kedaulatan.
b. Dibentuk panitia persiapan nasional yang terdiri dari wakil-wakil RI dan BFO.
c. Negara-negara bagian tidak akan memilki tentara sendiri melainkan tergabung dalam NIS.
d. BFO mendukung tuntutan RI agar peneyerahan kedaulatan tanpa syarat baik politik maupun ekonomi.
e. RI setuju bahwa Undang-undang NIS disusun dalam KMB.
f. RI setuju BFO memperoleh dua pertiga perwakilan dalam parlemen.
g. NIS memiliki senat yang anggotanya 30 dari wakil BFO dan 2 dari wakil RI.

Kesepakatan-kesepakatan inilah yang memuluskan jalan terbentuknya NIS dalam KMB.

10. Konferensi Meja Bundar

Peranan PBB dalam perundingan Indonesi-Belanda sangat besar, terutama dalam mengusahakan suatu konferensi antara RI-Belanda. Dalam konferensi ini diikutsertakan pula negara-negara bentukan Belanda yang tergabung dalam BFO. Konferensi ini dikenal dengan nama ***Konferensi Meja Bundar (KMB)*** yang berlangsung pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949. Dalam konferensi ini terdapat tiga pihak yaitu RI yang dipimpin oleh *Hatta,* BFO dan Belanda yang masing-masing diwakili oleh *Sultan Hamid II* dan *Van Maarseveen* serta UNCI, sebuah komisi PBB untuk Indonesia sebagai mediator.

Adapun hasil pokok dari KMB adalah sebagai berikut :

a. KMB merekomendasikan terbentuknya Negara Indonesia Serikat.
b. Dibentuknya Uni RIS dengan Kerajaan Belanda.
c. Penyerahan kedaulatan oleh Belanda kepada RIS tanpa syarat.

Kesepakatan pemulihan kedaulatan terdiri atas tiga persetujuan induk yaitu : piagam penyerahan kedaulatan, status uni, dan persetujuan perpindahan. Dalam piagam pemulihan kedaulatan tersebut disebutkan bahwa penyerahan kedaulatan akan dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1949, dan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1945.

Sedangkan untuk Negara Republik Indonesia Serikat yang hendak didirikan, dipersiapkan sebuah Undang-Undang Dasar oleh delegasi Republik Indobesia bersama-sama dengan delegasi BFO. Rencana Undang-Undang Dasar ini diterima dengan baik oleh kedua belah pihak, dan mulai pada tanggal 27 Desember 1949 itu pula Undang-Undang itu diberlakukan. Kemudian Undang-Undang Dasar ini diberi nama *Konstitusi Republik Indonesia Serikat* yang terdiri dari *Mukaddimah* dan *197 pasal.* Terpilih sebagai Presiden RIS *Soekarno* dan *Hatta* diangkat menjadi Perdana Menteri. Pusat pemerintahan RIS adalah *Jakarta.* Sedangkan Republik Indonesia diserahkan kepada ***Asaat*** yang menjabat sebagai presiden dengan ibu kota *Yogyakarta.*

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh maka beberapa peristiwa penting seputar perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang dilakukan oleh rajyat Indonesia dapat dilihat dalam tabel peristiwa sebagai berikut.

NO	WAKTU	PERISTIWA	KETERANGAN

1	23 Agustus 1945	Pembentukan BKR	BKR bertugas menjaga keamanan umum di daerah-daerah pasca proklamasi
2	1 Oktober 1945	Masuknya Sekutu ke Indonesia	Tujuannya untuk mengamankan RI dan melucuti tentara Jepang
3	5 Oktober 1945	Pembentukan TKR	Pimpinan TKR Soepriyadi dan Markas Besarnya di Yogyakarta
4	26 Oktober 1945	Insiden Magelang	Pertempuran TKR dengan Sekutu
5	10 November 1945	Pertempuran Surabaya	Kekuatan Indonesia melawan Inggris, berdampak tewasnya Jenderal Malaby
6	10 Desember 1945	Pertempuran Medan Area	Koalisi Inggris dengan NICA melawan kekuatan RI
7	12-15 Desember 1945	Pertempuran Ambarawa	Kota Ambarawa dikepung 4 hari 4 malam oleh kekuatan RI kemudian Sekutu mundur
8	23 Maret 1946	Bandung Lautan Api	Sabotase, pembakaran, dan pembumihangusan Bandung Selatan
9	15 November 1946	Perjanjian Linggajati	Upaya Diplomasi dipimpin oleh Perdana Menteri Syahrir
10	21 Juli 1947	Agresi Militer Belanda I	Serangan Belanda terhadap wilayah RI baik di Jawa maupun luar Jawa
11	8 Desember 1947	Perjanjian Renvile	Delegasi Indonesia di pimpin oleh Amir Syarifuddin. Merupakan siasat Belanda dalam mempersempit wilayah RI
12	19 Desember 1948	Agresi Militer Belanda II	Ibu Kota RI Yogyakarta diduduki Belanda
13	22 Desember 1848	Pembentukan PDRI	Dibentuk karena pimpinan RI ditawan Belanda. Kedudukannya di Bukit Tinggi dengan Presidennya Amir Syarifuddin
14	1 Maret 1949	Serangan Umum 1 Maret 1949	Dipimpin oleh Letkol Soeharto dan berhasil menguasai Yogyakarta selama 6 jam
15	7 Mei 1949	Perjanjian	PBB membentuk UNCI sebagai

		Roem-Roejen	mediator antara Indonesia dengan Belanda
16	10 Juli-2 Agustus 1949	Konferensi Antar Indonesia	Dihadiri oleh pimpinan RI dan BFO dalam membahas pembentukan RIS
17	23 Agustus sampai 2 November 1949	Konferensi Meja Bundar	Konferensi RI, BFO, Belanda, dan UNCI. Perundinganberhasil membentuk RIS.
18	27 Desember 1949	Pengesahan Konstitusi RIS	Presiden RIS Soekarno, Wakil Presiden Moh Hatta, sedangkan Presiden RI Asaat dengan Ibu Kota Yogyakarta

Tabel 2.1. Kronologis Peristiwa penting Seputar Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan

BAB III
PERKEMBANGAN POLITIK DAN EKONOMI INDONESIA PASCA PENGAKUAN KEDAULATAN

A. Kembali ke NKRI

Berdirinya RIS pada tanggal 27 Desember 1949, maka negara RI hanya merupakan salah satu negara bagian saja dari RIS. Begitu pula dengan UUD 1945, hanya merupakan *Undang-Undang Dasar Negara Bagian Republik Indonesia*. Sedangkan RIS menggunakan *Konstitusi RIS 1949*. Adapun yang menjadi negara-negara bagian selain RI berdasarkan pasal 2 konstitusi RIS adalah *Negara Indonesia Timur, Negara Sumatera Timur, Negara Sumatera Selatan, Negara Madura, Negara Jawa Timur,* dan *negara Pasundan.*

Belum lama RIS berdiri, muncullah tuntutan-tuntutan yang menghendaki untuk kembali pada negara kesatuan. Nampaknya bentuk federal bukanlah bentuk negara yang menjadi keinginan rakyat. Tuntutan ini semakin lama semaki kuat bahkan negara-negara bagian juga mendukung upaya kembali ke NKRI.

Mengamati dukungan yang semakin luas untuk kembali ke NKRI, maka diadakanlah pertemuan *Hatta, Sukawati*, dan *Mansur,* dan masing-masing mewakili RIS, NIT, dan negara Sumatera Timur. Mereka bersepakat untuk kembali ke NKRI, tinggal mempertimbangkan bagaimana cara yang baik untuk kembali ke NKRI. Hal ini sangat mendesak karena keadaan-keadaan di daerah menjadi sulit untuk diperintah, sehingga mengakibatkan turunnya kewibawaan pemerintah RIS. Negara-negara bagian banyak yang bergabung dengan RI pimpinan Asaat, sehingga RIS hanya tinggal tiga negara bagian saja, yakni *RI, Negara Indonesia Timur,* dan *Negara Sumatera Timur.*

Berdasarkan usulan dari DPR Sumatera Timur, Perdana Menteri Hatta menyetujui bahwa 3 negara bagian bergabung dengan RIS tidak melalui penggabungan dengan R.I. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman dengan bekas KNIL di Sumatera Timur. RIS juga khawatir jika diadakan penggabungan ke RI akan menimbulkan kegoncangan dan preseden yang buruk bagi pemerintahn RIS.

Sehubungan dengan itu, akhirnya diselenggarakanlah suatu konferensi yang diadakan antar pemerintah Negara Indonesia Serikat dan pemerintah Republik Indonesia. Dalam konferensi ini pemerintah RIS mewakili Negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur. Konferensi akhirnya mencapai suatu hasil keputusan bersama pada tanggal 19 Mei 1950. Adapun ketentuan-ketentuan dan kesepakatan itu adalah sebagai berikut :

1. Kesepakatan bersama untuk melaksanakan negara kesatuan sebagai jelmaan dari RI Proklamasi Kemerdekaan 1945.
2. Diperlukannya *Undang-Undang Dasar Sementara* dengan cara mengubah konstitusi RI.

Persetujuan ini ditandatangani oleh *Hatta* dan *Halim* yang masing-masing mewakili *RIS* dan *RI.*

Penyusunan UUD Sementara 1950 segera disepakati oleh pemerintah RIS dan RI, dan pada tanggal 20 Juli 1950 UUDS teleh selesai. Perubahan konstitusi RIS menjadi UUDS 1950 dilakukan melalui cara penetapan *Undang-Undang Perubahan Konstitusi RIS,* yakni *Undang-Undang Federal No.7 1950*. Pasal I berbunyi bahwa konstitusi RIS diubah menjadi UUDS 1950 RI. Sedangkan pasal II berisi tentang penetapan berlakunya UUDS 1950, yakni pada tanggal *17 Agustus 1950*. Jadi UUDS 1950 hanyalah bagian dari Undang-Undang Federal No.7 1950 terdiri dari Mukadimah, Batang Tubuh yang mencakup 146 pasal dan pasal 1 pasal penutup. UUDS ini disahkan pada tanggal 15 Agustus 1950, dan mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950. Dengan demikian mulai saat itu bergantilah susunan Negara Serikat menjadi bentuk susunan Negara

Kesatuan, dimana *Soekarno* tetap menjadi Presiden RI negara kesatuan dan *Hatta* menjadi wakil presiden.

B. Pemilu 1955 di Tengah Jatuh Bangunnya Kabinet

Setelah Indonesia kembali menjadi negara kesatuan RI maka sampai tahun 1959, demokrasi Indonesia menganut Demokrasi Liberal yang berarti pula bahwa sistem pemerintahannya juga liberal. Semenjak tahun 1950 dimana Indonesia dibagi menjadi 10 daerah propinsi yang otonom, telah terjadi jatuh bangun kabinet hampir setiap tahun. Sampai tahun 1955, terdapat 4 buah kabinet yang memerintah. Kabinet tersebut adalah kabinet Natsir (September 1950-Maret 1951), Kabinet Sukiman (April 1951-Februari 1952), Kabinet Wilopo (April 1952-1953), dan Kabinet Ali Sastroamidjojo I (Juli 1953-1955). Karena kabinet umurnya pendek, maka tidak ada kabinet yang dapat merealisasikan kabinetnya yang rata-rata umurnya satu tahun.

1. Kabinet Natsir (September 1950-Maret 1951)

Kabinet ini berlangsung sejak September 1950, sampai bulan Maret 1951, yang dipimpin oleh *Perdana Menteri Mohammad Natsir*. Kabinet ini didukung oleh Masyumi yang mengisyaratkan perlunya lembaga DPR yang dipilih langsung oleh rakyat. Dengan demikian Partai Masyumi memandang perlunya diselenggarakan Pemilu, sebagaimana tertuang dalam program kabinet Natsir sebagai berikut :

a. Mengadakan Pemilu untuk memilih Konstituante.
b. Memajukan perekonomian, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat.
c. Menyempurnakan organisasi pemerintah dan militer.
d. Menyelesaikan masalah Irian Barat (sekarang Irian Jaya), dan
e. Memulihkan keamanan dan ketertiban.

Semenjak kegagalannya dalam memperjuangkan Irian Barat, kabinet ini mulai digoncang oleh kekuatan oposisi terutama PNI. Perbedaan faham antara presiden dan Perdana Menteri Natsir telah mempercepat jatuhnya kabinet ini.

2. Kabinet Sukiman

Kabinet ini berlangsung sejak bulan April 1951-April 1952, yang dipimpin oleh *Sukiman* dari kalangan *Masyumi*. Kabinet baru ini merupakan koalisi antara Masyumi dan PNI

dan sejumlah partai kecil lainnya. Kabinet ini mulai goyah setelah munculnya perbedaan pandangan antara Masyumi dan PNI. Sukiman dekat dengan presiden. Kabinet ini juga kurang menjalin hubungan yang baik dengan militer. Krisis moral yang ditandai dengan korupsi juga terdengar oleh rakyat. Begitu pula dengan programnya terhadap masalah Irian Barat belum membuahkan hasil. Kabinet inipun jatuh setelah Masyumi dan PNI menarik dukungannya kepada kabinet.

3. Kabinet Wilopo

Kabinet ini berlangsung sejak bulan April 1952-Juni 1953, yang dipimpin oleh *MR. Wilopo*. Dalam kabinet Wilopo, dimana Masyumi ikut andil di dalamnya berupaya agar pemilu segera dilaksanakan. Rancangan Undang-Undang Pemilu yang selesai dibahas oleh DPRS pada tanggal 1 April 1953, kemudian disahkan menjadi *Undang-Undang Pemilu No.7 tahin 1953*. Namun meskipun kabinet ini didukung oleh para ahli sehingga dikenal sebagai *Zaken Kabinet,* tetapi kabinet ini jatuh juga setelah dianggap gagal dalam menangani pergolakan-pergolakan di daerah.

4. Kabinet Ali Sastramidjojo

Kabinet ini berlangsung sejak bulan Juli 1953-Juli 1955. Kabinet yang merupakan koalisi NU dan PNI ini dipimpin oleh *Ali Sastramidjojo*. Pada masa inilah *Konferensi Asia Afrika* tahun 1955 berhasil diselenggarakan. Dalam masa pemerintahan ini, kabinet Ali I merencanakan Pemilu baru akan dilaksanakan dalam waktu 16 bulan terhitung sejak Januari 1954, sehingga terkesan pemerintah tidak serius. Padahal dalam program kabinet Wilopo Pemilu direncanakan akan dilaksanakan pada pertengahan tahun 1954. Dengan begitu kabinet Ali akan berjalan sekitarr dua tahun sejak 1 Agustus 1953. Padahal, menurut Natsir, kabinet Ali sifatnya darurat saja sebelum dibentuk pemerintahan baru berdasarkan hasil Pemilu. Kabinet Ali pun menetapkan tanggal Pemilu yakni pada tanggal 29 September untuk memilih anggota konstituante. Kemudian dibentuklah Panitia Pemilihan Indonesia dibawah pimpinan *Hadikusumo* pada tanggal 4 November 1953. Namun sebelum kabinet Ali berhasil menyelenggarakan Pemilu, kabnet Ali telah jatuh karena NU sebagai kendaraan politiknya telah menarik diri dari kabinet karena adanya perseteruan dengan PNI.

5. Kabinet Burhanudin Harahap

Kabinet ini berlangsung sejak bulan Agustus 1955 sampai bulan Maret 1956 dibawah pimpinan *Burhanudin Harahap*. Pada masa kabinet ini, dimana Masyumi menjadi kepala pemerintahannya, pemilu berhasil dilaksanakan. Pemilu pada tanggal *29 September 1955* untuk memilih *257 anggota DPR*, sementara Pemilu *15 Desember 1955* dimaksudkan untuk memilih *514 anggota konstituante*. Pemilu ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Pemilu No. 7 tahun 1953. Pemilu diikuti oleh *118 peserta* baik partai, perseorangan maupun golongan dan *91 peserta* untuk konstituante.

Dalam pemilu 1955, muncul 4 kekuatan besar yang memenangkan Pemilu. Keempat partai tersebut adalah :

a. Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia)
b. PNI (Partai Nasional Indonesia)
c. NU (Nahdlatul Ulama)
d. Partai Komunis Indonesia (PKI)

Adapun sebesar jumlah kursi baik di DPR maupun konstituante secara garis besar adalah sebagai berikut :

a. Perolehan Kursi Di DPR

- Masyumi : 57 kursi
- PNI : 57 kursi
- NU : 45 kursi
- (PKI) : 39 kursi
- Peserta lain : 81 kursi

b. Perolehan Kursi di Konstituante

- Masyumi : 119 kursi
- PNI : 112 kursi
- NU : 91 kursi
- (PKI) : 81kursi
- Peserta lain : 118 kursi

Hasil Pemilihan Umum ternyata tidak memuaskan pihak manapun, terutama Masyumi dan PNI, yang sebelumnya berharap akan menjadi pemenang dengan memperoleh dukungan yang mutlak. Ternyata dengan dilangsungkannya pemilu tidak kemudian meredam konflik

politik maupun pergolakan. Di daerah terus mengalami pergolakan, sementara di parlemen muncul golongan-golongan. Karena banyak pihak yang menarik dukungan pada kabinet Burhanudin Harahap, maka pada tanggal 3 Maret 1956 kabinet ini menyerahkan mandat kepada presiden. Kabinet Burhanudin Harahap adalah kabinet terakhir yang pembentukannya didasarkan atas pertimbangan kekuatan parlemen sementara.

6. Kabinet Ali Sastroamidjojo II

Kabinet ini berlangsung sejak Maret 1955-Maret 1957, dibawah pimpinan *Kabinet Ali Sastramidjojo* sebagi Perdana Menterinya. Kabinet ini mendapatkan dukungan yang kuat dalam parlemen, yakni dengan dukungan mayoritas mutlak kecuali PKI. Dilihat dari pandangan aliran, maka kabinet ini membawa dua aliran besar dalam masyarakat Indonesia yakni *Islam* dan *Nasionalisme Sekuler*. Namun demikian, kabinet ini tidak berumur panjang karena Masyumi dan partai-partai lain sering berbeda pendapat terutama dalam menanggapi masalah-masalah penting.

Faktor lain yang memperpendek usia kabinet ini adalah sikap oposisi dari Presiden Soekarno sejak awal pembentukannya. Soekarno menghendaki dibentuknya *kabinet berkaki empat* dengan inti pendukung *PNI, Masyumi, NU,* dan *PKI*. Kabinet Ali II merupakan kabinet yang pertama dan terakhir yang pembentukannya didasarkan atas imbangan kekuatan dalam parlemen hasil pemilu. Dengan jatuhnya kabinet Ali II ini, peranan partai-partai politik dalam pemerintahan merosot drastis. Harapan bangsa yang cukup besar terhadap kabinet hasil pemilihan umum pertama ini tinggallah harapan belaka.

7. Kabinet Juanda

Kabinet ini berlangsung lebih dari dua tahun yakni sejak bulan April 1957-Juli 1959. Kabinet ini dibentuk langsung oleh Soekarno sebagai kabinet darurat ekstraparlementer. Kabinet ini diberi nama *Kabinet Karya* yang dipimpin oleh *Perdana Menteri Juanda*. Pada tanggal 9 April 1957, dilantiklan Kabinet Karya ini. Banyak anggota kabinet yang diangkat tidak atas latar belakang partai. Banyak orang yang menganggap tindakan presiden ini tidak sesuai dengan undang-undang. Kabinet ini juga jatuh ketika presiden merencanakan dekrit pada bulan Juli 1959.

C. Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Badan Konstituante yang sudah terpilih melalui pemilihan umum dilantik pada tanggal 10 Nopember 1956. Tugas badan ini bersama-sama dengan pemerintah *menetapkan Undang-Undang Dasar* yang tetap, dan sedianya untuk menggantikan UUDS 1950. Besar harapan rakyat terhadap kinerja badan ini untuk segera menghasilkan UUD baru yang mampu memberikan suatu sistem politik yang stabil. Namun nampaknya harapan ini pun harus runtuh di tengah jalan.

Setelah Badan Konstituante bersidang hampir 2 ½ tahun lamanya, tetapi ternyata belum juga dapat menghasilkan sebuah Undang-Undang Dasar. Perbedaan pendapat yang sangat mencolok sangat menyulitkan badan ini untuk menyetujui sebuah kesepakatan. Pertentangan pendapat di antara partai-partai politik itu sendiri tidak hanya di parlemen, melainkan juga di badan-badan pemerintahan. Pertentangan semakin meluas dalam badan-badan swasta dan di kalangan masyarakat luas. Dalam hal perbedaan ini paling tidak dapat digolongakan menjadi dua kubu yakni sebagai berikut.

1. Kelompok yang menghendaki kembalinya kepada Undang-Undang Dasar 1945. Kelompok ini dimotori oleh *Soekarno* dan *AH.Nasution.*
2. Kelompok yang menghendaki Undang-Undang Dasar yang sesuai dengan *Piagam Jakarta* yang secara tidak terperinci memasukkan prinsip-prinsip Islam. Kelompok ini dimotori oleh *Prawoto Mangkusaswito* dan *Hamka* yang tergabung dalam solidaritas kelompok Islam.

Untuk mengatasi masalah pertentangan ini, maka timbullah ide untuk melaksanakan Demokrasi Terpimpin. Demokrasi jenis ini dianggap sesuai dengan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia. Untuk melaksanakan Demokrasi Terpimpin ini, maka diperlukan Undang-Undang Dasar baru, karena UUDS 1950 sistemnya menggunakan asas Demokrasi Liberal. Dengan demikian UUDS 1950 mutlak harus diganti.

Setelah Badan Konstituante dianggap tidak dapat bekerja dengan baik, maka Kabinet Juanda menyelenggarakan sidang pada tanggal 10 Februari 1959, dan menghasilkan suatu keputusan untuk melaksanakan ide Demokrasi Terpimpin yakni melalui cara kembali kepada UUD 1945. Kabinet kemudian mengeluarkan keputusan resmi pada tanggal 19 Februari 1959 dengan nama: *Putusan Dewan Menteri* mengenai pelaksanaan *Demokrasi Terpimpin* dalam rangka kembali ke Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam rangka memutuskan keputusan Dewan Menteri tersebut, maka pemerintah meminta diselenggarakannya sidang pleno Badan Konstituante. Tanggal 22 april 1959, sidang Konstituante di laksanakan. Presiden Soekarno yang mengatasnamakan pemerintah,

menganjurkan kepada sidang badan ini untuk menerima berlakunya kembali UUD 1945. Amanat ini dikenal dengan judul *"Res Publica, sekali lagi Res Publica"*. Sesudah diselenggarakan sidang pleno Konstituante pada tanggal 22 April 1959, maka badan ini bersidang untuk menentukan sikapnya terhadap anjuran presiden Soekarno. Setelah melalui pembahasan, maka akhirnya diadakanlah pemungutan suara mengenai penerimaan kembali UUD 1945.

Sidang berlangsung sampai 3 kali yakni pada tanggal 30 Mei 1959, 1 Juni 1959, dan 2 Juni 1959. Dari ketiga kali sidang tersebut, ternyata tidak dapat memperoleh suara yang diperlukan. Perbedaan pandangan antara yang setuju dan yang tidak setuju sangat kuat sehingga suaranya seimbang, dan tidak dapat memenuhi jumlah yang diharuskan karena banyak pula peserta yang tidak hadir dan tidak memilih. Dengan hasil yang selalu buntu ini, banyak pernyataan dari para anggota Konstituante yang tidak mau lagi menghadiri sidang-sidang berikutnya.

Melihat keadaan demikian, Konstituante yang semula menjadi harapan rakyat untuk menciptakan stabilitas politik, sudah tidak diharapkan lagi untuk menyusun sebuah UUD menggantikan UUD S 1950. Keadaan demikian sangat mengganggu stabilitas pemerintahan dan dianggap sangat membahayakan bagi kelangsungan ketatanegaraan RI. Atas dasar itulah Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit pada tanggal 5 Juli 1959.

Adapun isi dari *Dekrit Presiden 5 Juli 1959* adalah sebagai berikut:

1. Dibubarkannya Konstituante
2. Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950.
3. Dibentuknya MPRS dan DPAS.

Berlakunya kembali UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, ternyata diterima baik oleh rakyat Indonesia, bahkan DPR secara aklamasi menyatakan diri bersedia untuk bekerja atas dasar UUD 1945. Dengan demikian maka dimualilah babak baru ketatanegaraan RI di bawah payung *Demokrasi Terpimpin*.

D. Pergolakan Sosial Politik Di Daerah

1. Pemberontakan PKI Madiun 1948

a. Amir Mundur Hatta Maju

Perjanjian Renvile yang disahkan oleh kabinet Amir Syarifuddin, mengakibatkan semakin sempitnya wilayah RI. Hal ini harus ditebus oleh Amir yakni dengan mengembalikan mandatnya sebagai Perdana Menteri kepada presiden. Presiden kemudian

menunjuk *Hatta* untuk memimpin langsung Kabinet. Kabinet Hatta ini di sokong oleh tokoh-tokoh Masyumi dan PNI, sedangkan Amir dan Partai Sosialisnya tidak diikutkan. Partai Sosialis meminta agar diberi jatah 3 menteri di mana Amir sebagai Menteri Pertahanan. Namun Hatta menolak dengan tegas, sehingga akhirnya Amir menempuh jalan oposisi.

Amir yang ketika menduduki sebagai Perdana Menteri mendukung perjanjian Renvile, namun setelah kabinetnya jatuh justru Amir menentangnya. Bahkan untuk memperkuat oposisinya, Amir membentuk *FDR (Front Demokrasi Rakyat)* pada tanggal 26 Februari 1948. Front ini merupakan gabungan beberapa partai politik yakni: *Partai Sosialis, Pesindo, PKI, PBI,* dan *Sarbupri.* Adapun program pokok dari FDR ini adalah sebagai berikut.

1. Perjanjian renvile tidak sejalan dengan semangat perjuangan, maka harus dibatalkan.
2. Perundingan-perundingan dengan Belanda harus dihentikan sampai mereka keluar dari bumi Indonesia.
3. Kekayaan Belanda harus dinasionalisasi dengan tidak mengganti rugi.
4. Pembubaran Kabinet Hatta yang Presidensiil dan diganti dengan Kabinet Parlemter di mana FDR diikutsertakan.

Hatta tidak keberatan dengan program FDR kecuali pada pasal terakhir yang menganggap bahwa untuk melaksanakan program itu dengan tidak perlu mengganti kabinet.

b. Strategi Politik FDR

1). Membentuk Front Nasional di mana Masyumi dan PNI diiutsertakan dengan tujuan untuk menggulingkan Kabinet Hatta.

2). Melakukan pemogokan umum dan pengacauan sehingga wibawa pemerintah merosot dan kekuasaan dapat direbut.

3). Membina pasukan-pasukan yang pro FDR di daerah-daerah yang strategis dan menarik pasukan-pasukan itu dari medan pertempuran.

4). Mengukuhkan Madiun sebagai pusat *Pemerintahan Soviet* dan basis bergrilya, sedangkan *Surakarta* sebagai daerah yang kacau untuk mengalihkan perhatian pemerintah dan masyarakat, serta menghadang serangan tentara dari Barat.

c. Kembalinya Muso

Muso adalah seorang PKI pada jaman sebelum perang yang merupakan salah satu penggerak pemberontakan PKI 1926-1927. Kehadiran Muso semakin memperkuat posisi FDR untuk melaksanakan strateginya. Namun kebesaran Muso lebih populer daripada Amir walaupun hal itu tidak menyurutkan langkah Amir dan kemudian bergabung dengan Muso. Muso dalam strateginya menghimbau agar semua unsur yang sealiran meleburkan diri ke dalam PKI yang kemudian diperluas. Untuk memuluskan jalan ini maka diselenggarakanlah *Kongres PKI pada Agustus 1948* yang mengesahkan *"Jalan Baru untuk RI"* yang didominasi oleh PKI.

FDR kemudian bergabung ke dalam PKI yang diperluas pada akhir Agustus. Adapun pimpinan dari gabungan ini dan membentuk *politbiro* ketuanya adalah *Muso,* sementara jabatan *Amir* adalah sebagai sekretaris pertahanan. Masuk juga beberapa tokoh tua seperti *Tan Ling Jie, Alimin,* dan *Sarjono.* Sementara tokoh muda masuk *Aidit, Lukman,* dan *Sudisman.* PKI kemudian mempropagandakan program-programnya sambil mengecam kebijakkan-kebijakkan pemerintah sehingga memunculkan dukungan yang cukup luas dari kalangan masyarakat. Persaingan ditubuh TNI adalah modal yang besar bagi PKI terlebih dengan dimilikinya kekuatan TNI di Surakarta.

Di tengah suasana yang kacau, muncul *GGR (Gerakan Rakyat Revolusioner)* yang dimotori oleh para pengikut *Tan Malaka.* Persaingan semakin keras di mana hubunga Kabinet Hatta-GGR-FDR-PKI semakin lama semakin tegang. Ketegangan semakin menjadi-jadi sehingga memunculkan peristiwa *Madiun Affair* yang sangat buram dalam sejarah perjuangan bangsa.

d. Peristiwa Madiun18 September 1948

Peristiwa Madiun dipercepat dengan berkobarnya pertempuran-pertempuran di antara pasukan TNI. Terjadi saling menculik di antara dua kekuatan yang berseteru. Bentrokan tidak dapat dihindarkan lagi ketika *Divisi Siliwangi* diberi tugas untuk mengatasi keadaan yang bergejolak di Solo dan Madiun. Hal ini menimbulkan *Divisi IV Diponegoro* menjadi marah karena tidak diajak dalam pembicaraan. Akhirnya pertempuran pun terjadi antara Divisi Siliwangi yang pro pemerintah dengan Divisi IV yang pro PKI. Melihat gelagat yang tidak baik ini, pemerintah kemudian menunjuk *Kolonel Gatot Subroto* sebagai *Gubernur Militer* yang menguasai *Semarang, Pati,* dan *Madiun*, dengan tugas untuk mengatasi

keadaan yang sedang kacau. Pertempuran akhirnya didominasi oleh pasukan pemerintah., dan pada tanggal 17 September 1948 pasukan pro PKI keluar dari wilayah Surakarta.

Ketika perhatian TNI dan pemerintah tertuju ke Surakarta, dimana terjadi pertempuran yang cukup hebat, maka di Madiun terjadi perebutan kekuasaan atau *kudeta* yang dipimpin oleh *Soemarsono* dari *Pesindo* dan *Letkol Dakhlan komandan* dari *Brigade 29 pada tanggal 18 September 1948*. Mereka mendirikan *Pemerintahan Soviet* di kota ini, disertai dengan pembunuhan terhadap para pejabat sipil dan militer serta tokoh masyarakat yang dianggap akan menjadi penghalang gerakannya. Suasana Madiun dapat dikuasai, rakyat pun memilih diam karena rasa takut atas kekejaman Pemerintahan Soviet. Para pemimpin gerakan merasa yakin bahwa kemenangan di mulai dari Madiun.

Pada saat terjadi kudeta, para pemimpin PKI seperti *Amir* dan *Muso* sedang melakukan perjalanan ke Purwodadi dalam rangka mempropagandakan program-program PKI. Mereka kaget ketika mendengar bahwa di Madiun terjadi kudeta, karena mereka beranggapan bahwa PKI belum siap untuk melakukan kudeta. Namun tidak ada pilihan lain kecuali ikut mendukung kudeta tersebut. Karena bagaimanapun juga para pemimpin teras ini harus bertanggung jawab atas tindakan-tindakan para pendukung PKI. Mereka kemudian langsung menuju Madiun dan mengambil alih pemerintahan, serta secara resmi memaklumatkan berdirinya *Republik Indonesia Soviet.*

e. Sikap Pemerintah RI

Setelah PKI memproklamirkan berdirinya negara Soviet RI, pemerintah segera mengambil tindakan. Divisi Siliwangi segera diperintahkan untuk merebut kembali kota Madiun. Setelah memukul mundur pasukan Divisi IV, pasukan Siliwangi di bawah komando *Kolonel Sadikin* langsung menyerang Madiun dari arah Barat. PKI sudah memperhitungkan serangan dari Barat ini. Akan tetapi yang tidak diperhitungkan adalah adanya serangan dari Timur, yaitu serangan dari *Divisi VI Jawa Timur* di bawah pimpinan *Kolonel Sungkono.* Pasukan pro PKI dicerai beraikan oleh batalyon-batalyon Jawa Timur ini, sehingga pada tanggal 30 September 1948 kota Madiun sudah dapat diatasi. Pengejaran terhadap pimpinan PKI dan pasukan pro PKI terus dilakukan. *Muso,* yang menyamar sebagai Kusir Andong mati tertembak di *Ponorogo* oleh pasukan yang dipimpin oleh *Kapten Sunandar*. Tokoh PKI lainnya seperti *Amir, Suripto, Sarjono,* dan *Maruto Darusman* berhasil meloloskan diri. Namun mereka berhasil ditangkap pada tanggal 1 Desember 1948 ketika

berusaha memasuki daerah pendudukan Belanda di Semarang. Ketika terjadi Agresi Militer Belanda II, mereka ditembak mati pada tanggal 20 Desember 1948. Demikianlah peristiwa Madiun berakhir dengan sangat dilematis, dimana para pemimpinnya berhasil ditangkap dan di hukum mati.

2. Pemberontakan DI/TII

Ketika Perjajnian Renvile disepakati oleh pemerintah Indonesia dan Belanda, banyak kalangan termasuk satuan-satuan tentara yang tidak bersedia hijrah ke Yogyakarta sesuai dengan tuntutan perjanjian itu. Mereka yang kecewa dengan sikap pemerintah itu, kemudian berusaha mendirikan pemerintah sendiri dalam negara RI. Hal ini menimbulkan pergolakan yang hebat di berbagai daerah yang hendak memisahkan diri dari kekuasaan RI dan Belanda. Mereka menganggap perjuangan diplomasi telah gagal dalam memperjuangkan semangat Indonesia Merdeka.

a. DITII Jawa Barat

Jawa Barat adalah pelopor munculnya gerakan-gerakan DI/TII di berbagai daerah baik di Jawa maupun di luar Jawa. Ketika pasukan TNI harus hijrah ke Yogyakarya, beberapa kesatuan menolak untuk hijrah dari basis grilnyanya. Kesatuan itu dipimpin oleh *S.M. Kartosuwiryo,* yang dapat menarik simpati *Pasukan Hisbullah* untuk ikut bergabung. Kosongnya kekuatan TNI di wilayah Jawa Barat, memuluskan jalan bagi SM. Kartosuwiryo untuk menanamkan pengaruhnya. Kartosuwiryo kemudian mendirikan *Kesatuan Darul Islam* pada bulan Maret 1948. Ia juga membentuk *Tentara Islam Indonesia (TII),* yang anggotanya merupakan kesatuan-kesatuan *Hisbulah* dan *Sabililah.*

Pada tanggal 14 Agustus 1949, berdirilah *Negara Islam Indonesia* di bawah pimpinan SM Kartosuwiryo. Sebagai basis pertahanannya dan sekaligus pusat pemerintahannya adalah sekitar *Gunung Cerme di Kuningan Jawa Barat.* DI/TII ini dapat bertahan cukup lama karena mereka menggunakan strategi grilya untuk menyusun kekuatan yang lebih baik.

Dengan berdirinya NII tersebut, pemerintah untuk sementara berupaya melakukan jalan damai yakni dengan perundingan karena menganggap bahwa mereka hanya tidak dapat menerima dari isi perjanjian. Setelah diadakan perundingan, tidak dapat dicapai kata sepakat sehingga pemerintah menggunakan cara-cara militer, yakni dengan melakukan operasi militer.

Upaya untuk menumpas DI/TII ini memakan waktu yang cukup lama, karena pemerintah dan TNI disibukkan oleh peristiwa Madiun yang cukup menguras banyak tenaga. Di samping itu, TNI juga harus sering berurusan dengan Belanda, terutama ketika Belanda melakukan agresinya pada tahun 1949. Dengan demikian DI/TII dapat melangsungkan pemerintahannya dengan leluasa dan banyak mandapat pengikut dari kalangan masyarakat yang merasa tertarik dengan gerakkan ini.

Setelah permasalahan dengan Belanda mendekati selesai, TNI yang dalam hal ini ditugaskan kepada *Divisi Siliwangi*, mulai melancarkan operasi-operasi militer secara besar-besaran. Operasi ini terkenal dengan nama *Operasi Pagar Betis* dan *Operasi Bhratayudha,* dimana rakyat ikut berperan di dalamnya. Dalam operasi ini seluruh lereng pegunungan Cerme diblokade oleh tentara dan rakyat, sehingga tidak ada jalan bagi DI/TII untuk turun gunung. Lama kelamaan mereka kelaparan karena kehabisan perbekalan. Akhirnya SM. Kartosuwiryo turun gunung bersama anak istrinya dan kemudian ditangkap. Setelah memalui proses persidangan yang panjang akhirnya SM.Kartosuwiryo di hukum mati.

b. DI/TII Jawa Tengah

Pemimpin DI/TII di Jawa Tengah adalah *Amir Fatah* yang diangkat oleh SM.Kartosuwiryo untuk menjadi pemimpin NII di Jawa Tengah. DI/TII Jawa Tengah ini pusatnya adalah di dearah *Brebes bagian Selatan*, tepatnya di daerah *Salem*. Salem ini sekarang merupakan sebuah kota kecamatan yang letaknya berbatasan dengan Kuningan Jawa Barat. Salem dipilih karena wilayahnya yang pegunungan sehingga dapat dilakukan taktik bergrilya oleh kelompok DI/TII. Dengan demikian pada saat itu Kartosuwiryo dapat berkomunikasi dengan Amir Fatah mengenai perkembangan gerakannya. Adapun wilayah dari NII Brebes ini adalah meliputi wilayah *Brebes, Tegal,* dan *Peklaongan.*

Pemberontakan ini dapat ditumpas melalui operasi militer yang disebut *Gerakan Banteng Negara,* yang dipimpin oleh *Letkol Sarbini, Letkol M.Bahrum,* dan *Letkol Ahmad Yani.* Dalam operasi ini, Amir Fatah berhasil melarikan diri, dan sempat memproklamirkan kembali NII di Brebes Tenggara yang juga wilayahnya pegunungan. Divisi IV kemudian membentuk pasukan yang bernama *Banteng Raiders* dalam menumpas pemberontakan ini. Dalam operasi ini juga Amir Fatah berhasil melarikan diri.

Pemberontakan lain di Jawa Tengah terus berlanjut, seperti halnya yang terjadi di daerah *Kebumen* di bawah pimpinan *Kyai Somalangu*. Namun pemberontakan ini dapat segera

dipadamkan oleh pasukan *Divisi IV* dibawah komandi *Letkol Ahmad Yani*. Di *Magelang* dan *Kudus* juga muncul pemberontakan yang menyatakan dukungannya terhadap terbentuknya NII. Namun pemberontakan ini pun dapat segera diatasi oleh kesigapan Divisi IV dibawah komando *Letkol Soeharto.* Dengan demikian maka situasi Jawa Tengan sudah dapat diatasi oleh pemerintah.

c. DI/TII di Sulawesi Selatan

Pimpinan dari gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan adalah *Kahar Muzakkar* yang berhubungan dengan Kartosuwiryo. Hubungan mereka dimulai pada bulan Agustus 1951 ketika Kahar Muzakkar memilih untuk masuk hutan dan tidak mengindahkan maklumat pemerintah. Pada waktu itu Kahar Muzakkar disesak melalui perantaraan *Bukhari* dan *Abdullah Riau Soshby,* salah seorang pimpinan TII di Jawa Barat, untuk membentuk Kesatuan TII bagi Sulawesi. Kartosuwiryo secara pribadi mengirimkan surat kepada Kahar Muzakkar untuk menjadi pimpinan TII di Sulawesi.

Secara resmi tawaran itu diterima oleh kahar Muzakkar pada 20 Januari 1952. Dengan demikian ia menjadi panglima *Divisi IV TII*, yang juga disebut *Divisi Hasanudin. Syamsul Bahri* diangkat menjadi menjadi *Gubernur Militer Sulawesi Selatan.* Dalam sepucuk surat yang ditulis Kahar Muzakar dalam menerima pengangkatannya, dinyatakan bahwa ia berterima kasih dan menjunjung tinggi kepercayaan yang diperlihatkan Kartosuwiryo kepadanya dengan keputusan mengangkatnya menjadi panglima TII untuk Sulawesi.

Adapun latar belakang Kahar Muzakkar memilih untuk bergabung dengan TII Kartosuwiryo adalah karena kekecewaannya terhadap pemerintah yang tidak mengabulkan keinginannya menggabungkan seluruh anggota *Komando Gerilya Sulawesi selatan (KGSS)* menjadi *APRI.* Alasan pemerintah bahwa anggota KGSS harus melalui ujian seleksi terlebih dahulu. Pemerintah sebenarnya akan mengangkat Kahar Muzakkar menjadi *Komandan Korps Cadangan Nasional* dengan pangkat Letnan Kolonel. Namun ia menolak ketika hendak dilantik, dan bersama pasukannya mengundurkan diri ke hutan lengkap dengan senjata yang dimilikinya.

Sejak diangkat menjadi Panglima Divisi IV TII untuk Sulawesi pada bulan Januari 1952, Kahar Muzakkar melakukan perlawanan-perlawanan terhadap pemerintah hampir selama 14 tahun. Sikap pemerintah terhadap gerakan itu, dilakukan dengan memerintahkan operasi militer yang berintikan pasukan dari Divisi Siliwangi. Operasi ini juga memakan

waktu yang cukup lama karena mereka melakukan gerakan grilya untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Pada bulan Februari 1965, dalam suatu penyergapan oleh pasukan RI, Kahar Muzakkar tertembak mati. Kemudian pada bulan Juli tahun itu pasukan RI juga berhasil menangkap *Gerungan* sebagai wakil Kahar Muzakkar. Dengan demikian berakhirlah perlawanan DI/TII di Sulawesi Selatan.

d. DI/TII di Aceh

Perlawanan DI/TII di Aceh dipimpin oleh *Daud Beureuh*. Ketika muncul banyak perlawanan terhadap pemerintah, pada tanggal 20 September 1953 Daud Beureuh memproklamasikan NII atas nama masyarakat Aceh, dan menyatakan Aceh dan daerah-daerah sekitarnya menjadi bagian dari NII pimpinan Kartosuwiryo Jawa Barat. Faktor pendorong munculnya perlawanan Daud Beureuh adalah masalah status Aceh yang sebelumnya adalah daerah istimewa diturunkan statusnya menjadi daerah Karesidenan di bawah provinsi Sumatera Utara. Kebijakan pemerintah tersebut ditentang oleh Daud Beureuh, sehingga memilih untuk melakukan perlawanan.

Dalam menghadapi perlawanan tersebut, pemerintah melakukan dua cara, yakni dengan jalan damai dan operasi militer. Jalan damai dilakukan dengan cara memberikan penerangan-penerangan kepada rakyat untuk memulihkan kepercayaan terhadap pemerintah. Sementara operasi militer dilakukan untuk menumpas perlawanan kesatuan DI/TII.

Strategi ini berhasil memulihkan keadaan Aceh. Pada tanggal 17-21 Desember 1962 diadakan *Musyawarah Kerukunan Masyarakat Aceh,* dan atas gagasan dari *Pangdam I Iskandar Muda, Kolonel M.Yasin* musyawarah itu didukung oleh para tokoh pemerintah daerah dan juga masyarakar Aceh. Musyawarah menawarkan amnesti kepada Daud Beureuh dan para pemimpin lainnya dengan syarat mau kembali kepada masyarakat. Dengan demikian perlawanan DI/TII Aceh telah berakhir.

e. DI/TII di Kalimantan Selatan

Seperti di Sulawesi dan Aceh, perlawanan terhadap pemerintah RI juga terjadi di Kalimantan baru saja setelah pengakuan resmi kedaulatan Indonesia, pada akhir tahun 1949. Daerah utama yang dipengaruhi oleh gerakan DI/TII ini adalah Kalimantan Selatan. Pusatnya adalah *Kabupaten Hulusungai,* khususnya daerah antara *Barabai* dan *Kandangan*. Di

samping itu daerah sebelah timur ini, yang terdiri dari Kabupaten *Kota Baru, Kabupaten Banjar,* terjadi gerakan DI/TII yang dipimpin oleh *Ibnu Hajar*. Perlawanan meluas sampai ibu kota provinsi yang menjadi target serangan para grilyawan.

Ibnu Hajar adalah bekas Letnan II TNI, yang kemudian menggalang gerakan yang bernama *Kesatuan Rakyat Yang Tertindas (KRYT)*. Mereka memproklamirkan bahwa gerakan itu adalah bagian dari DI/TII pimpinan Kartosuwiryo Jawa Barat. Penyerangan yang mereka lakukan diarahkan terhadap pos-pos TNI dan sejumlah wilayah di Kalimantan.

Pada awalnya, pemerintah RI menawarkan kepada pemimpin gerakan untuk menyerahkan dri dan dipersilahkan untuk masuk APRI. Ibnu Hajar menerima tawaran itu, dan setelah memperoleh senjata, ia kembali lagi melakukan gerakan-gerakan menentang pemerintah.

3. Negara-Negara Boneka Buatan Belanda

Untuk menanamkan kembali kekuasaannya di Indonesia Belanda tidak mungkin mendirikan pemerintahan sebagaimana pada jaman Hindia Belanda dahulu. Oleh sebab itu diupayakanlah cara lain yakni dengan membentuk *Komite Indonesia Serikat* yang bertujuan untuk mendirikan *Negara Indonesia Serikat (Negara yang berbentuk susunan federal)*. Sementara itu Negara Republik Indonesia hanya dijadikan sebagai salah satu saja negara bagian dengan luas wilayah yang sesempit-sempitnya. Untuk persiapan negara bagian-bagiannya, di daerah-daerah yang telah dapat diduduki, diusahakanlah terbentuknya negara-negara kecil yang bersifat kedaerahan.

Pembentukan negara-negara bagian ini telah dipersiapkan dalam *Konferensi Malino tanggal 15-25 Juli 1946*. *Malino* adalah nama sebuah kota kecil di Sulawesi Selatan. Konferensi itu dipimpin oleh wakil gubernur Hindia Belanda *H.J. Van Mook*. Konferensi dilanjutkan di *Pangkal Pinang* dan *Denpasar,* dan menghasilkan keputusan yakni upaya pembentukan negara-negara bagian. Adapun negara-negara bagian tersebut adalah sebagai berikut :

a. NIT (Negara Indonesia Timur)

NIT adalah negara bagian pertama yang diciptakan oleh Belanda pada bulan Desember 1946 melalui sebuah *Konferensi Denpasar*. NIT meliputi daerah-daerah sebelah Timur Selat Makasar dan Selat Bali yakni Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Sulawesi.

Diangkat *Cokorda Gede Ruka* sebagai *Presiden NIT*. Sedangkan lembaga pemerintah NIT terdiri dari pemerintah beserta menteri, DPR sementara dan senat sementara.

b. Negara Sumatera Timur

Berdasarkan keputusan *Van Mook,* negara Sumatera Timur dibentuk pada tanggal 24 Maret 1948. Wilayahnya meliputi daerah Medan, Deli, Serdang, dan sekitarnya. Belanda kemudian mengangkat *Tengku Mansyur* sebagai Wali Negara Sumatera Timur.

c. Negara Sumatera Selatan

Negara Sumatera Selatan juga dibentuk oleh *Van Mook,* pada tanggal 31 Agustus 1948. wilayahnya meliputi Palembang dan sekitarnya. Adapun yang dipilih menjadi presiden Sumatera Selatan adalah *Abdul Malik*.

d. Negara Jawa Timur

Berdasarkan keputusan Van Mook, pada tanggal 26 November dibentuklah Negara Jawa Timur yang wilayahnya meliputi Surabaya, Malang, dan daerah-daerah sebelah timurnya sampai Banyuwangi. Terpilih sebagai Wali Negara Jawa Timur yaitu *Achmad Kusumanegoro.*

e. Negara Madura

Belanda yang sukses dalam membentuk negara Madura pada tanggal 23 Januari 1948, negara tersebut berhasil diresmikan pada tanggal 20 Februari 1948. Wilayahnya meliputi pulau Madura dan pulau-pulau kecil disekitarnya. Terpilih sebagai Wali Negara Madura *R.A.A. Cokroningrat*.

f. Negara Jawa Barat

Pada saat pasukan Siliwangi hijrah ke Yogayakarta, pada tanggal 5 Maret 1948 dibentuklah negara *Pasundan* oleh *Suria Kartalegowo, Ketua Partai Rakyat Pasundan*. Wilyahnya meliputi Jawa Barat sekarang. Terpilih sebagai wali negara Pasundan *R.A.A. Wiranakusumah*.

g. Daerah-daerah Otonom

Disamping mendirikan negara-negara federal, Belanda juga membentuk daerah otonom yang juga akan dipersiapkan menjadi negara bagian yakni *Kalmantan Barat, Kalimantan Timur, Dayak Besar, Banjar, Kalimantan Tenggara, Bangka, Belitung, Riau,* dan *Jawa Tengah.*

4. Pemerintahan Federal Ciptaan Van Mook

Setelah Belanda berhasil membentuk negara-negara bagian, pada tanggal 9 Maret 1948 *Van Mook* meresmikan pembentukan *Pemerintahan Federal Sementara* yang berfungsi untuk memebntuk NIS yang dipimpin langsung oleh dirinya. Dalam pemerintahan Federal sementara ini RI tidak diikutsertakan dengan alasan bahwa RI baru akan diterima setelah tercapai penyelesaian final dengan Belanda.

Untuk mengukuhka posisi Pemerintahan Federal Sementara, maka pada tanggal 27 Mei 1948 Van Mook mengadakan konferensi yang tidak mengikutkan RI ini berhasil membentuk *BFO (Byeenkomst Voor Federal Overleg atau pertemuan untuk permusyawaratan Federal).* Badan ini dipimpin oleh *Sultan Hamid II* dari *Pontianak*. BFO inilah yang memiliki peran cukup besar dalam melakukakan perundingan-perundingan dengan RI dan Belanda dalam sebuah KMB yang menghasilkan pembentukan *Republik Indonesia Serikat* pada tanggal *2 November 1949*.

Dengan berdirinya RIS, dan konstitusi RIS sebagai Undang-Undang Dasarnya, maka RI hanya berstatus sebagai negara bagian saja. Sedangkan UUD 1945 sejak saat itu dengan sendirinya hanya berstatus sebagai UUD Negara Bagian RI.

Berdirinya RIS tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah pergolakan di berbagai daerah. Bahkan rakyat menuntut untuk kembali kepada bentuk negara kesatuan. Banyak negara bagian yang dengan keinginannya sendiri menggabungkan diri dengan Negara Bagian RI. Pada akhirnya hanya ada tiga negara bagian saja yaitu *RI, Negara Indonesia Timur,* dan *Negara Sumatera Timur.*

Keinginan Belanda untuk tetap menancapkan kukunya di Indonesia semakin menjadi sirna manakala pada tanggal 14 Agustus 1950 DPR dan Senat RIS mengubah konstitusi RIS menjadi UUD 1950 melalui *UU Federal No.7 1949*. UUD 1950 mulai diberlakukan pada tanggal 17 Agustus 1950, dan sekaligus menandai kembalinya RIS kepada bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian Belanda telah gagal menjadikan negara bagian sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaannya.

5. Pemberontakan APRA

Pada masa RIS banyak sekali permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi pemerintah dan rakyat. Indonesia sebagai suatu negara yang baru diakui kedaulatannya, harus menghadapi rongrongan dari dalam yang dilakukan oleh golongan-golongan yang mendapat sokongan dari Belanda. Mereka adalah orang-orang yang takut kehilangan haknya apabila Belanda meninggalkan Indonesia.

Pertama adalah gerakan *APRA (Agkatan Perang Ratu Adil)* yang dipimpin oleh *Rymon Westerling*. Dibalik gerakan ini Belanda sebagai penyokong untuk melindungi kepentingan ekonominya. Untuk itu, mereka akan berupaya untuk mempertahankan negara Pasundan dan tidak bersedia bergabung dengan RI di Yogya. Untuk menggalang dukungan rakyat, mereka memanfaatkan isu *Ratu Adil* dimana akan datang pemimpin yang akan memerintah rakyat dengan adil dan bijaksana, sehingga keadaan akan aman dan damai dimana rakyat akan makmur dan sejahtera.

Gerakan APRA dilakukan oleh kurang lebih 800 orang yang bersenjata lengkap. Pada pagi hari tanggal 23 Januari 1950, APRA menyerang kota Bandung. Mereka secara ganas membunuh setiap anggota TNI yang dapat mereka jumpai. Mereka berhasil menduduki markas staf Divisi Siliwangi. Dalam insiden ini 79 anggota TNI gugur termasuk *Letkol Lembong.*

Dalam gerakan APRA ini, selain anggota TNI banyak penduduk biasa juga yang menjadi korban. Melihat peristiwa ini pemerintah RIS segera mengirimkan pasukan ke Bandung, dan Gerakan APRA dapat segera dilumpuhkan.

Selain ke Bandung, gerakan APRA juga diarahkan ke Jakarta. Dalam gerakan ini ternyata yang mendalangi adalah *Sultan Hamid II* yang menjadi menteri dalam kabinet RIS dan mengadakan kerjasama dengan Belanda dan mengangkat Westerling sebagai pemimpin APRA. Mereka berencana akan menyerang gedung tempat diselenggarakan sidang kabinet untuk membunuh *Sri Sultan Hamengkubuwono IX* yang saat itu menjabat *Menteri Pertahanan, Mr. Budihardjo Sekjen Kemnetrian Pertahanan,* serta *Kolonel T.B. Simatupang Pejabat Kepala Staf APRIS*. Namun berkat kesiagaan APRIS usaha APRA di Jakarta juga mengalami kegagalan. Setelah Westerling terbang dengan pesawat terbang Belanda menuju *Malaya,* maka para pengikutnyapun membubarkan diri.

6. Gerakan Andi Azis

Selain gerakan APRA, RIS juga mengalami gangguan yang dilakukan oleh *Kapten Andi Azis di Makasar (Ujung Pandang).* Gerakan ini menunjukkan sikap penolakkan atas masuknya pasukan-pasukan APRIS dari TNI ke Sulawesi Selatan. Andi Azis sendiri adalah perwira KNIL yang baru diterima ke dalam APRIS dan kemudian menggabungkan diri bersama pasukannya.

Suasana Makasar sendiri saat itu sedang kacau, dimana rakyat yang menghendaki untuk bergabung dengan RI mengadakan demonstrasi. Demikian juga rakyat yang pro federal mengadakan demonstrasi sehingga menimbulkan ketegangan. Untuk mengatasi keadaan ini, pemerintah RIS mengirimkan 900 pasukan APRIS yang berasal dari TNI ke Makasar untuk memulihkan suasana. Kesatuan ini dipimpin oleh *Mayor H.V. Worang* yang bergerak menuju pelabuhan Makasar. Pengiriman pasukan ini menimbulkan ketidakpuasan bagi Andi Azis sehingga melakukan gerakan melawan TNI dengan membentuk *"Pasukan Bebas"*.

Pada pagi hari pukul 05.00 tanggal 5 April 1950, pasukan bebas menyerang markas TNI di Makasar dan berhasil menguasai Makasar. Serangan pagi hari ini menimbulkan banyak korban di kalangan TNI termasuk *Letkol A.J. Mokoginto* berhasil ditawan.

Melihat kondisi demikian, pemerintah RIS pada tanggal 8 April 1950 memerintahkan dalam 4x24 jam agar Andi Azis datang ke Jakarta untuk mempertanggung jawabkan tindakannya. Ia juga diperintahkan untuk menarik pasukannya dan membebaskan tawanan. Andi Azis terlambat datang ke Jakarta, dan oleh karenanya ia ditangkap dan diadili oleh *Mahkamah Militer*.

Para pengikut Andi Azis tetap melancarkan grakan pemerintah kemudian memerintahkan Kolonel A.E. Kawilarang untuk melakukan expedisi ke Sulawesi. Dengan bantuan Batalyon Worang yang juga bergerak menduduki Maksar, maka pasukan pemerintah tidak mendapat perlawanan yang berarti. Dengan berbagai operasi dan perundingan yang dilakukan dengan bekas anggota KNIL, akhirnya pada bulan Agustus keamanan Makasar dan sekitarnya dapat dipulihkan.

7. Gerakan RMS (Republik Maluku Selatan)

RIS tidak henti-hentinya mendapat gangguan dalam negeri. Cobaan terakhir yang dihadapi RIS dan berlangsung sampai masa RI adalah gerakan sparatis yang menamakan

diri *RMS (Republik Maluku Selatan)*. Gerakan RMS dipimpin oleh *C.R.S. Soumokil* bekas *Jaksa Agung NIT*. Adapun latar belakang munculnya gerakan ini adalah ketidakpuasan pada hasil KMB dan sekaligus tidak menyetujui proses bergabungnya NIT dengan RIS.

Gagalnya pemberontakan Andi Azis yang juga didalangi oleh Soumokil menjadikan bubarnya NIT. Soumokil melarikan diri ke Maluku Tengah oleh pasukan pemerintah. Soumokil memilih Ambon untuk menjadi pusat gerakannya. Menghadapi gerakan ini, pemerintah bermaksud melakukan perundingan dengan mengutus *Leimena*. Namun Soumokil menolak RIS rencana damai ini sehingga mendorong pemerintah RIS untuk menindak tegas gerakan ini.

Dalam rangka menumpas gerakan RMS ini, pemerintah mengutus *Kolonel A.E Kawilarang* untuk melakukan operasi milter. Kawilarang mendaratkan pasukannya dipelabuhan-pelabuhan strategis di Maluku pada 14 Juli 1950 sehingga mempersempit gerak langkah RMS.

APRIS dibawah pimpinan *Mayor Ahmad Wiranatakusumah, Letkol Slamet Riyadi,* dan *Mayor Suryo Subandrio* yang terdiri dari tiga gelombang berhasil mendarat di Ambon pada tanggal 28 September 1950. Pasukan APRIS berhasil menguasai Ambon pada bulan November 1950. Dalam pertempuran untuk memperebutkan **Benteng Niew Victoria** *Letkol Slamet Riyadi* gugur di medan pertempuran. Setelah APRIS berhasil merebut Ambon, maka Soumokil beserta pengikut setianya melakukan perang gerilya. Soumokil dengan taktik gerilyanya baru berhasil ditangkap pada tahun 1963 dan kemudian dihukum mati. Dengan demikian berakhirlah gerakan RMS di Maluku Selatan

8. Gerakan PRRI-PERMESTA

Gerakan PRRI-Permesta berawal dari peristiwa *Cikini,* dimana pada tanggal 30 November 1957 telah terjadi percobaan pembunuhan terhadap presiden Soekarno. Peristiwa inilah yang mengakibatkan keadaan Indonesia semakin memburuk. Daerah-daerah semakin bergolak dan nampak keinginannya untuk memisahkan diri dari pemerintah pusat. Kondisi ini juga diperparah oleh ulah para pemimpin militer yang sebelumnya membentuk dewan-dewan daerah yakni sebagai berikut :

a. Dewan Banteng

Dewan ini dibentuk pada tanggal 20 Desember 1956 oleh *Letkol Ahmad Husein*. Pusat dewan ini adalah *Sumatera Barat*.

b. Dewan Gajah

Dewan ini dibentuk pada tanggal 22 Desember 1956 oleh *Kolonel Mauluddin Simbolon* dan dipusatkan di *Sumatera Utara.*

c. Dewan Garuda

Dewan ini dibentuk pada bulan Januari 1957 oleh *Letkol Barlion* dan dipusatkan di *Sumatera Selatan.*

d. Dewan Manguni

Dewan ini dibentuk pada bulan Febuari 1957 oleh *Mayor Somba* dan dipusatkan di *Manado.*

Para pemimpin daerah yang bergolak mengadakan berbagai pertemuan di Sumatera. Pertemuan terpenting adalah pertemuan yang diadakan di *Sungai Dareh* sebuah kota kecil diperbatasan Sumatera Barat dan Jambi. Pertemuan itu dihadiri antara lain : *Lubis, Simbolon, Dahlan, Jamlek, Husein, Natsir, Syarifuddin Prawironegara,* dan *Sumitro Djojohadikusumo.* Pertemuan menyepakati didirikannya **"Gerakan Perjuangan Menyelamatkan Negara Republik Indonesia".** Gerakan ini diketuai oleh *Husein.* Adapun tujuan dari gerakan ini adalah *"menuju Indonesia yang adil dan makmur".*

Pada tanggal 10 Februari 1958, ketua gerakan yang juga merupakan ketua Dewan Banteng mengeluarkan ultimatum pada pemerintah pusat yang berisi :

1. Kabinet Juanda harus mengembalikan mandat dalam tempo 5x24 jam.
2. Presiden harus kembali kepada kedudukan yang konstitusional.
3. Dibubarkannya Kabinet Karya dan diganti dengan Kabinet Kerja dibawah pimpinan *Hatta* dan *Sri Sultan Hamengkubuwono IX.*

Mendapat ultimatum itu pemerintah bertindak tegas dengan memecat secara tidak hormat para perwira TNI AD yakni *Ahmad Husein, Simbolon, Zulkifli Lubis, Dahlan Jambek.* KASAD AH Nasution kemudian membekukan Kodam Sumatera Tengah dan menempatkannya langsung dibawah KASAD.

Pada tanggal 15 Februari 1958, Ahmad Husein memproklamasikan berdirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dengan kedudukan di *Bukitinggi, Padang.* Diangkat sebagai Perdana Menteri *Syarfruddin Prawiranegara* mantan *Presiden PDRI.* Melihat gelagat ini, pemerintah berupaya melakukan perundingan dengan pemimpin PDRI. Karena upaya damai ini tidak membuahkan hasil, maka pemerintah memutuskan untuk menjalankan operasi militer. Operasi militer dilancarkan dengan kekuatan gabungan antara

AD, AL, dan AU terhadap PRRI di Sumatera Tengah itu diberi nama **Operasi 17 Agustus.** Operasi ini juga berupaya mencegah mereka meluaskan diri ke tempat-tempat lain, dan mencegah campur tangan unsur dan kekuatan asing.

Dengan operasi militer ini, kekuatan PRRI semakin terdesak dan kemudian pada tanggal 29 Mei 1958 Ahmad Husaini dan pengikutnya menyerah. Begitu juga dengan pimpinan PRRI lainnya.

Sementara di Sulawesi, setelah membentuk Dewan Manguni para pimpinan militer memproklamirkan *Piagam Perjuangan Rakyat Semesta* atau *Permesta*. Permesta kemudian menggabungkan diri dengan PRRI pada tanggal 17 Februari 1958 dibawah pimpinan **Mayor Somba.** Terhadap Permesta pun pemerintah tidak ragu-ragu untuk bertindak. KASAD kemudian memecat dengan tidak hormat *Somba* dan *Mayor Runturambi*. Akhirnya Permesta pun dapat dilumpuhkan, meskipun sisa-sisanya masih ada sampai tahun 1961. Dengan demikian tamatlah riwayat *PRRI-PERMESTA*.

9. Perjuangan Membebaskan Irian Barat

a. *Jalan Diplomasi Awal*

Perjuangan diplomasi baik melalui perundingan dengan pihak Belanda maupun melalui forum internasional adalah salah satu usaha keras Indonesia untuk menyatukan kembali Irian Barat dalam wilayah RI. *Konferensi Meja Bundar (KMB)* dalam kesepakatannya dinyatakan bahwa penyerahan kedaulatan atas Indoneesia dalam pasal I berbunyi : *Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan sepenuhnya atas Indonesia kepada RIS dengan tidak bersyarat dan tidak dapat sicabut dan karena itu mengakui RIS sebagai negara yang berdaulat.* Namun dalam hal Irian Barat tidak dicapai kata sepakat. Kemudian dalam suatu kompromi dicapai kesepakatan bahwa penyelesian Irian Barat akan dilakukan setahun sesudah pengakuan kedaulatan dengan perundingan antara RIS dan Kerajaan Nederlands.

Pihak Indonesia menafsirkan bahwa pihak Belanda akan menyerahkan Irian Barat. Nampaknya pihak RIS telah salah menafsirkan tentang kata-kata **"Irian Barat akan diselesaikan dengan jalan perundingan".** Kata-kata tersebut tidak memberi petunjuk bahwa pihak Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada RIS, melainkan hanya merundingkan.

Setahun setelah tanggal penyerahan kedaulatan, Belanda tidak juga menyerahkan Irian Barat. Berbagai perundingan antara RIS berlanjut RI dengan pihak Belanda telah

mengalami kegagalan. Pembatalan sepihak KMB oleh Belanda pada tahun 1956, semakin memperuncing konflik RI dengan Belanda.

Pada 17 Agustus 1956 Kabnet Ali II meresmikan pembentukan **Propinsi Irian Barat Perjuangan.** Di lain pihak Belanda juga mengukuhkan Irian Barat sebagai wilayahnya. Cara yang ditempuh Belanda adalah dengan merubah pasal *I Konstitusi Nederlands* yaitu mengenai wilayah kerajaan dengan menyebut *Irian Jaya (Nederlands-New-Guinea)* sebagai bagian dari wilayah Nederlands.

Setelah perundingan dengan pihak Belanda tidak membuahkan hasil, pemerintah RI membawa masalah Irian Barat di dalam sidang Majelis Umum PBB. Persoalan Irian Jaya ini berkali-kali dimasukkan ke dalam acara *Sidang Majelis Umum PBB,* namun tidak pula membuahkan hasil dan tanggapan yang positif. Hal ini lebih diakibatkan oleh ulah pihak Belanda yang menyatakan bahwa masalah Irian Barat adalah masalah bilateral Indonesia dengan Belanda. Pernyataan tersebut mendapat dukungan dari negara-negara Eropa Barat, sehingga PBB belum mampu memutuskan status Irian Barat.

b. Politik Konfrontasi Ekonomi

Karena jalan damai baik melalui perundingan dengan Belanda maupun melalui forum PBB tidak berhasil mengembalikan Irian Barat, maka pemerintah RI berupaya menempuh cara lain. Pada tahun 1957, aksi-aksi pembebasan Irian Barat mulai dilakukan. Rakyat melakukan konfrontasi ekonomi berupa pengambilalihan perusahaan-perusahaan milik Belanda. Untuk menghindari tindakan kekerasan massa, maka KASAD Jenderal A.H. Nasution memutuskan untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda dan menyerahkannya kepada pemerintah.

Pada tanggal 17 Agustus 1960, RI resmi memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda. Semua orang-orang Belanda yang bekerja di Indonesia dipecat. Kemudian dibentuklah **"Front Pembebasan Irian Barat"** pada akhir tahun 1960. Suasana makin diperuncing ketika pada bulan April 1961 Belanda membentuk **Dewan Papua** yang akan mengadakan **"penentuan nasib sendiri"** bagi rakyat Irian Jaya. Belanda melanjutkannya kepada Majelis Umum PBB berupa usul tentang penentuan nasib sendiri bagi rakyat Irian Barat pada bulan September 1961. Dalam usulnya Belanda akan menyerahkan kepada PBB, dan dalam jangka 16 tahun Belanda meminta agar PBB menetapkan Negara Papua

sebagai negara yang merdeka. Selanjutnya tanpa menunggu keputusan PBB, Belanda secara sepihak membentuk *Negara Papua* dengan bendera dan lagu Papua.

c. Jalan Militer

Menghadapi tindakan Belanda yang tidak mungkin lagi untuk diajak berunding, pemerintah RI memutuskan untuk menempuh jalan militer. Pada tanggal 19 Desember 1961 presiden memerintahkan *Trikora (Tri Komando Rakyat)* di Yogyakarta untuk bertindak tegas dan cepat. Adapun isi Trikora itu adalah sebagai berikut :

1. Gagalkan **"Negara Papua"** bentukan Belanda.
2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat.
3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum untuk mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.

Dalam rangka merealisasikan perjuangan Trikora, pemerintah membentuk *Komando Mandala* yang berkedudukan di *Makasar* pada tanggal 2 Januari 1962. Adapun tugas Komando Mandala tersebut adalah :

1. Menyeleggarakan operasi militer pembebasan Irian Barat.
2. Mengerahkan segala kekuatan baik militer maupun non militer untuk membebaskan wilayah Irian Barat.

Sebelum Komando Mandala mempersiapkan dan melaksanakan operasinya, sudah terjadi penyusupan-penyusupan yang dilakukan oleh gerilyawan-gerilyawan yang kebanyakan terdiri dari kesatuan-kesatuan pilihan baik darat, laut, udara, maupun kepolisian. Aksi penyusupan ini mengakibatkan terjadinya pertempuran *Arafuru* pada *tanggal 15 Januari 1962*. Dalam pertempuran ini gugurlah *Komodor Yos Sudarso* dan *Kapten Wiratno*. Kapal **Macan Tutul** yang ditumpanginya tenggelam setelah bertubi-tubi diserang oleh kekuatan Belanda.

Dengan gencarnya serangan-serangan militer Indonesia, maka Belanda menyatakan kesediannya untuk melakukan perundingan dengan Indonesia dalam rangka menyelesaikan masalah Irian Barat. Dunia internasional ikut andil dalam memperjuangkan Irian Barat. Akhirnya asal usul *Ellswort Bunker*, seorang Diplomat Amerika Serikat maka pada tanggal 15 Agustus 1962 ditandatanganilah *Perjanjian New York* antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda yang bertempat di New York. Adapun usulan *Ellswort Bunker* tersebut adalah sebagai berikut :

1. Belanda harus menyerahkan Irian Barat kepada RI.
2. Dalam beberapa tahun dalam pemerintah RI, rakyat Irian Barat diberi kesempatan untuk menentukan pendapatnya tetap dalam RI atau memisahkan diri.
3. Penyerahan Irian Barat diselesaikan dalam jangka waktu 2 tahun.
4. Agar tidak terjadi bentrokan fisik antara Indonesia dan Belanda , maka diadakan masa peralihan di bawah pemerintahan PBB selama 1 tahun.

Untuk menunjukkan keseriusan Indonesia dalam perundingan, RI langsung menerima prinsip-prinsip *Rencana Bunker* tersebut. Kesiagapan RI ini menarik simpati dunia internasional. Berbeda dengan Belanda yang tidak bersedia dengan usulan Bunker tersebut. Melihat sikap Belanda, RI langsung menyiapkan operasi besar-besaran yang dikenal sebagai *Operasi Jayawijaya*. Tanggal penyerbuan ditetapkan pada 14 Agustus 1962.

Menyelesaikan rencna operasi militer Indonesia, Amerika Serikat khawatir berdampak pada stabilitas keamanan di Asia Tenggara dan Pasific. AS. Terus mendesak Belanda agar bersedia menerima usulan Bunker. Dunia internasional mulai berpihak kepada Indonesia. Dengan jaminan ekonomi Belanda oleh AS, akhirnya Belanda bersedia berunding dengan Indonesia. Perundingan dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1962 dan ditandatangani perundingan *New York* oleh *Menlu Subandrio* sebagai wakil RI, dan *Van Royen* serta *Schuurmann* sebagai wakil Belanda. Proses penandatanganan disaksikan sekjen PBB U Thant dan Bunker.

Adapun pokok-pokok **Perundingan New York** tersebut adalah sebagai berikut :

1. Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Penguasa Pelaksana PBB, *UNTEA (United Nations Temporary Executive Authorithy)* pada tanggal 1 Oktober 1962. Bendera PBB akan berkibar di Irian Jaya berdampingan dengan bendera Belanda, dan akan diturunkan pada tanggal 31 Desember 1962 untuk digantikan dengan bendera Indonesia mendampingi bendera PBB.
2. Pemerintahan UNTEA pada tanggal 1 Mei 1963, selanjutnya pemerintahan diserahkan kepada pemerintah RI, dan kemudian bendera PBB diturunkan.
3. Sepanjang Pemerintahan UNTEA, digunakan tenaga-tenaga Indonesia, sedangkan tenaga dan tentara Belanda dipulangkan selambat-lambatnya 1 Mei 1963.
4. Pada tahun 1969, rakyat Irian Barat diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya apakah akan tetap dengan RI atau memisahkan diri.

Berdasarkan Perundingan New York, maka pada tanggal 14 Juli sampai 2 Agustus 1969, diselenggarakanlah *Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat)* untuk memberi pilihan pada rakyat apakah tetap bergabung dengan RI atau memisahkan diri. Untuk menyelenggarakan Pepera, maka dibentuklah *Dewan Musyawarah Pepera* di setiap kabupaten di Irian Barat. Ternyata sidang Dewan Musyawarah Pepera memutuskan bahwa Irian Barat memilih tetap bergabung dengan RI. Pada tahun itu juga, hasil Pepera diterima Majelis Umum PBB melalui persidangan tahun itu.

E. Politik dan Pemerintahan Masa Demokrasi Terpimpin

Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka berakhirlah *Demokrasi Liberal* dan digantikan dengan *Demokrasi Terpimpin*. Demikian pula mulai saat itu sistem *Kabinet Parlementer* ditinggalkan dan diganti menjadi *Kabinet Presidensial*. Sistem pemerintahan diselenggarakan menurut UUD 1945, dan alat-alat perlengkapannya juga disusun menurut UUD 1945.

1. Presiden dan Menteri-Menteri

Semenjak saat itu, presiden tidak hanya berfungsi sebagai Kepala Negara, melainkan juga berfungsi sebagai Kepala Pemerintahan. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah MPR. Maka pada tanggal 10 Juli 1959 presiden Soekarno disumpah kembali menurut UUD 1945. Maka mulai saat itu presiden memerintah berdasar kepada UUD 1945.

Demikian pula dengan kabinet yang disusun berdasarkan UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden, dan menteri-menteri itu merupakan pembantu presiden sehingga bertanggungjawab kepada presiden. Pada waktu itu presiden adalah mandataris MPR dan harus bertanggungjawab kepada MPR.

2. Pembentukan DPR-GR

Penerapan Demokrasi Pemimpin semakin memperlebar masalah diantara golongan-golongan yang pro dan kontra terhadap Demokrasi Terpimpin. Hal ini semakin diperparah ketika Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil Pemilu 1955 pada tanggal 20 Maret 1960. Presiden kemudian membentuk *Dewan Perwakilan Rakyat*

Gotong Royong (DPR-GR). Alasan pembubaran DPR ini ialah karena badan legislatif plihan rakyat ini berani menolak RAPBN yang diajukan pemerintah Soekarno. Keanggotaan DPRGR ditunjuk langsung oleh presiden dan ditetapkan pada tanggal 14 Juni 1960.

Anggota DPRGR seluruhnya berjumlah 283 orang. Pengangkatan anggota DPRGR ini tidak mencerminkan partai politik saja, tetapi juga mewakili golongan-golongan. Adapun tugas DPRGR ini adalah :

a. Melaksanakan Demokrasi Terpimpin.
b. Melaksanakan pembaharuan.
c. Saling membantu antara DPRGR dan pemerintah.

3. Pembentukan MPRS

Dalam rangka melaksanakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, presiden mengeluarkan *Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959* tentang pembentukan *Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS).* Dilanjutkan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden No. 12 Tahun 1960 tentang susunan keanggotaan MPRS. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut, keanggotaan MPRS terdiri dari utusan-utusan daerah dan golongan-golongan.

Jumlah keanggotaan MPRS ditetapkan oleh presiden. Hal ini mengakibatkan MPRS tunduk kepada presiden. Kenyataan ini dibuktikan oleh sidang-sidang yang dilakukan oleh MPRS yang menetapkan pengangkatan seumur hidup Presiden Soekarno. Tindakan ini jelas-jelas telah melanggar UUD 1945. Bahkan sampai berakhirnya jabatan presiden Soekarno sekalipun pelaksanaan pemilu sebagai tuntutan UUD 1945, tidak pernah dilaksanakan.

4. Pembentukan DPAS

Untuk melaksanakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, presiden juga membentuk *Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).* Berdasarkan penetapan presiden, keanggotaan DPAS diangkat oleh presiden. Jumlah anggota DPAS 44 orang yang diangkat dari partai-partai politik, golongan-golongan karya, utusan-utusan daerah, dan tokoh-tokoh nasional.

5. Pembentukan Kabinet Kerja

Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia kembali kepada UUD 1945, dan mulailah diterapkan *Demokrasi Terpimpin.* Soekarno memimpin langsung pemerintahan. Dengan demikian ia tidak hanya sebagai kepala negara, tetapi juga kepala pemerintahan. Untuk mengisi kekosongan kabinet, presiden menunjuk *Juanda* sebagai *Perdana Menteri.* Presiden memberi nama kabinet itu adalah kabinet kerja.

Adapun program pokok kabinet kerja adalah :

a. Upaya pemerintah mengenai sandang pangan rakyat.
b. Mengupayakan keamanan dan ketentraman rakyat dan negara.
c. Memperjuangkan Irian Barat.

6. Manifesto Politik

Dalam rangka melaksanakan program Kabinet Kerja, Presiden Soekarno membentuk Front Nasional yang tugasnya adalah meneruskan revolusi Indonesia, melaksanakan pembangunan, dan memperjuangkan Irian JBarat. Dalam pidato presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul *Penemuan Kembali Revolusi Kita,* dijelaskan bahwa revolusi belum selesai. Maka untuk melanjutkan revolusi itu harus ada pemimpin yang menjadi bapak dari seluruh bangsa. MPRS berikutnya menetapkan uraian pidato presiden tersebut menjadi *GBHN* yang dikenal dengan *Manifesto Politik* yang berdasarkan *USDEK (UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Indonesia).* Jadi Manifesto Politik adalah GBHN-nya Demokrasi Terpimpin.

7. Sistem Demokrasi Terpimpin

Dalam pidato presiden pada tanggal 17 Agustus 1959 presiden juga mengatakan bahwa prinsip dasar Demokrasi Terpimpin adalah :

a. Tiap-tiap orang diwajibkan untuk berbakti kepada kepentingan umum, masyarakat, bangsa dan negara.
b. Tiap-tiap orang berhak mendapatkan penghidupan yang layak dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam pidato tanggal 22 April 1959, presiden Soekarno mengemukakan beberapa definisi tentang Demokrasi Terpimpin. Salah satu definisi mengatakan bahwa

Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi yang sesuai dengan UUD 1945 yakni demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijkasanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Definisi lain menjelaskan bahwa Demokrasi Terpimpin adalah *demokrasi kekeluargaan,* yakni demokrasi yang mendasarkan sistem pemerintahannya kepada musyawarah dan mufakat dengan pimpinan satu kekuasaan sentral ditangan seorang bapak yang tidak ditaktor, tetapi memimpin dan mengayomi.

Demokrasi terpimpin mulai menyimpang dari konsepnya semula karena semakin kuatnya sentralisasi kekuasan. Hal ini dapat dilihat dari kebijaksanaannya antara lain :

a. Membubarkan Masyumi karena dianggap penghalang revolusi.
b. Memasyarakatkan ajaran NASAKOM (Nasionalis, Agama, dan Komunis) demi persatuan dan kesatuan.
c. Memasyarakatkan ajaran RESOPIM (Revolusi, Sosialisme, Indonesia, dan Pemimpin Nasional) untuk menegakkan Demokrasi Terpimpin.
d. Pembatasan pendirian partai-partai politik untuk menstabilkan pemerintahan.

BAB IV
PERISTIWA GESTAPU DAN PERKEMBANGAN POLITIK SOSIAL EKONOMI

A. Ekonomi Indonesia Sampai Tahun 1965

Sejak proklamasi kemerdekaan tahun 1945, kekuasaan ekonomi Indonesia sangat terpuruk. Pemerintahan melakukan berbagai upaya untuk memulihkan perekonomian nasional. Berikut gambaran perekonomian nasional dan upaya-upaya pemerintah untuk melakukan pemulihan ekonomi.

1. Masa Awal Kemerdekaan

Perekonomian nasional masa awal kemerdekaan sangat memprihatinkan. Keadaan buruk ini diakibatkan oleh ulah kolonial Jepang yang mengeruk kekayaan alam Indonesia untuk memenuhi kebutuhan *Perang Asia Timur Raya.* Dampaknya, negara Indonesia yang baru merdeka harus mengalami depresi ekonomi yang cukup tajam. Peredaran mata uang Jepang secara besar-besaran, mempercepat terjadinya inflasi ekonomi.

Untuk memperbaiki keadaan ekonomi akibat perang dan pendudukan Jepang, Indonesia memerlukan sumber dana yang besar. Sementara pemerintah tidak memiliki kas sama sekali. Dalam keadaan ini, karena Indonesia belum memiliki mata uang sendiri, maka mata uang Jepang tetap diberlakukan, begitu juga dengan mata uang pemerintah Hindia Belanda sebagai alat tukar yang sah untk membantu mengatasi keadaan.

Pihak yang paling menderita akibat inflasi adalah petani karena mereka adalah produsen sumber eksploitasi yang paling banyak menyimpan dan memiliki mata uang Jepang. Posisi pemerintah semakin dipersulit oleh pihak Belanda yang melakukan blokade laut. Ini mengakibatkan pintu keluar perdagangan RI tertutup, sehingga pemerintah RI tidak dapat mengekspor barang-barang ekspor.

Adapun alasan pihak Belanda melakukan blokade laut adalah :

1. Melindungi bangsa Indonesia dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh bukan bangsa Indonesia.
2. Untuk mencegah dikeluarkannya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya.
3. Untuk mencegah dimasukannya senjata dan peralatan militer ke Indonesia (Notosusanto, 1990:173).

Dengan blokade itu, Belanda berharap keadaan sosial ekonomi Indonesia menjadi semakin buruk karena kekurangan bahan impor yang sangat dibutuhkan. Di samping itu Belanda juga melakukan penghancuran barang-barang milik Indonesia. Dengan keadaan ini diharapkan akan mengakibatkan keresahan sosial, sehingga dapat menimbulkan kebencian rakyat terhadap pemerintah RI. Oleh sebab itu sangat jelas bahwa blokade laut adalah senjata ekonomi, dimana Belanda memperkirakan bahwa RI secara ekonomi akan segera hancur.

2. Upaya Perbaikan Ekonomi

a. Pinjaman Nasional

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi adalah dengan melakukan *pinjaman nasional.* Pemerintah dalam hal ini *Menteri Keuangan Ir. Surachman* melakukan pinjaman sebesar 1 milyar rupiah. Kebijakan ini dijalankan dengan persetujuan *BPKNIP,* yang dibagi atas dua tahap. Pinjaman akan dibayar kembali selambat-lambatnya dalam kurun waktu 40 tahun.

Pada bulan Juli 1946, seluruh penduduk Jawa dan Madura diwajibkan menyetor uangnya kepada *Bank Tabungan Pos* dan Perum Pegadaian. Pinjaman tahap pertama ini berhasil mengumpulkan uang sejumlah Rp. 500.000.000, dan berjalan dengan sangat sukses. Kesuksesan ini dapat dijadikan ukuran oleh pemerintah bagi dukungan rakyat. Dilihat dari sudut politik, sukses ini menunjukkan bahwa Belanda keliru dalam perhitungannya tentang kebangkrutan Indonesia.

Sementara kesulitan keuangan pemerintah belum teratasi, pihak Sekutu memberlakukan uang NICA yang dimaksudkan untuk menggantikan mata uang Jepang yang nilai tukarnya semakin merosot. Tindakan ini diprotes oleh *Perdana Menteri Syahrir* yang menganggap bahwa Belanda telah melanggar persetujuan. Pemerintah kemudian memaklumatkan bahwa di wilayah RI hanya berlaku tiga macam mata uang. Rakyat tidak diperkenankan menggunakan uang NICA.

Untuk menggantikan mata uang Jepang yang terus merosot nilainya, maka pemerintah RI menerbitkan uang kertas baru pada bulan Oktober 1946 dengan nama *Oeang Repoeblik Indonesia (ORI).* Untuk menata masalah keuangan dan ekonomi, pemerintah membentuk *Bank Negara Indonesia* pada tanggal 1 November 1946. Sampai sekarang bank tersebut masih ada dengan nama *Bank BNI 46*. Terpilih *Margono Djojohadikusumo* sebagai pemimpin BNI yang semula namanya adalah **Yayasan Pusat Bank.** BNI mempunyai tugas untuk mengendalikan nilai tukar ORI dengan valuta asing yang ada di Indonesia.

Akibat perang yang terus berlangsung, mengakibatkan situasi ekonomi semakin sulit. Pendapatan pemerintah semakin tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan. Karena blokade ekonomi, hasil pertanian dan perkebunan tidak dapat diekspor. Dalam hal ini penghasilan pemerintah semata-mata hanya bertumpu pada pertanian. Selama masa perang, produksi pertanianlah yang merupakan tumpuan ekonomi Indonesia. Meskipun situasi ekonomi sulit, namun dengan dukungan produksi pertanian maka pemerintah RI dapat bertahan, dan mampu menanggulangi dampak dari blokade ekonomi oleh Belanda.

b. Upaya Menembus Blokade Ekonomi

Blokade ekonomi yang dilakukan Belanda, tidak mematahkan semangat pemerintah RI untuk melakukan kebijakan-kebijakan ekonomi. Pemerintah mengupayakan berbagai strategi untuk menembus blokade ekonomi.

1). Upaya Politik

Dalam bidang politik, pemerintah RI bersedia membantu India yang sedang dilanda kelaparan. Bantuan itu berupa 500.000 ton beras. Hal ini disambut positif oleh pemerintah India dengan kesediaannya mengirimkan bahan pakaian yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Hubungan bilateral ini semakin baik manakala India adalah negara Asia yang aktif membantu Indonesia dalam forum internasional. Upaya politis ini telah sukses dalam menembus blokade ekonomi.

2) Kedua dalam Bidang Perdagangan

Upaya yang dilakukan dalam bidang perdagangan dengan menjalin hubungan dagang dengan luar negeri. *Dr. Sumitro Djojohadikusumo* dan *Dr. Ong Eng Die* sebagai pimpinan *Banking and Trading Corporation (BTC),* berhasil mengadakan hubungan dagang dengan perusahaan swasta Amerika Serikat. Namun dalam transaksi pertama, ketika pihak Amerika Serikat bersedia membeli barang-barang ekspor dari Indonesia seperti karet, gula, teh, disita oleh pihak Belanda ketika berlabuh di Tanjung Priok.

Upaya menembus blokade ekonomi kemudian dipusatkan di Sumatra. Tujuan utamanya adalah *Singapura* dan *Malaysia*. Dengan jarak yang cukup dekat, maka ekspor barang-barang dapat dilakukan melalui perahu layar dan kapal motor. Upaya ini berlangsung secara sistematis sejak tahun 1946 sampai berakhirnya perang kemerdekaan.

3) Upaya dalam Bidang Pertahanan.

Dalam bidang ini, pemerintah membentuk *Kementrian Pertahanan Usaha Luar Negeri (KPULN)* yang dipimpin oleh *Ali Jayengprawiro*. Tugas pokoknya adalah mengimpor senjata dan perlengkapan perang. Dengan memanfaatkan wilayah laut yang cukup luas, maka upaya ini berhasil dalam menembus blokade laut yang dilakukan oleh Belanda.

B. Membentuk Ketahanan Ekonomi

Pada bulan Febuari 1946, pemerintah RI mulai mengupayakan penyelesaian masalah-masalah yang mendesak dalam bidang ekonomi. Pemerintah kemudian menyelenggarakan konferensi yang dipimpin oleh *Ir. Darmawan Mangunkusumo* yang saat itu menjabat sebagai

Menteri Kemakmuran. Konferensi ini bertujuan untuk menemukan masalah ekonomi yang mendesak. Adapun masalah-masalah yang dihadapi pemerintah RI adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan produksi dan distribusi bahan makanan.
2. Masalah sandang.
3. Masalah status dan administrasi perkebunan-perkebunan.

Sesudah dua kali pemrintah mengadakan konferensi ekonomi, maka pemerintah berupaya untuk menyelesaikan masalah-masalah ekonomi secara terperinci. Adapun upaya-upaya pemerintah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Membentuk Badan Perancang Ekonomi *(Planing Board)*

Berdasarkan usulan *Menteri Kemakmuran dr. AK Gani,* maka pada tanggal 19 Januari 1947 dibentuklah *Planning Board (Badan perancang Ekonomi).* Tugas pokoknya adalah membuat perencanaan pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2 sampai 3 tahun serta rencana pembangunan 10 tahun. Adapun rencana-rencana itu adalah sebagai berikut :

a. Semua bagunan umum, industri dan perkebunan yang sebelumnya menjadi milik negara, akan diambil alih oleh pemerintah RI.
b. Bangunan vital milik asing, akan dinasionalisasikan dengan pembayaran ganti rugi.
c. Seluruh perusahaan Jepang akan disita oleh pemerintah.
d. Perusahaan modal asing lainnya akan dikembalikan kepada yang berhak sesudah diadakan perjanjian RI dengan Belanda (Nugroho Notosusanto, 1990:180).

2. Rencana Kasimo *(Plan Kasimo)*

Menteri Urusan Bahan Makanan Kasimo, merencanakan produksi pertanian dalam jangka waktu tiga tahun yaitu, tahun 1948-1950. Rencana ini dikenal dengan *Plan Kasimo*. Rencana ini adalah usaha swasembada pangan dengan petunjuk pelaksanaan yang praktis. Kasimo menganjurkan agar menanami tanah-tanah yang kosong di Sumatera Timur yang luasnya mencapai 281.277 hektar. Diadakannya intesifikasi pertanian dengan menanam bibit padi unggul di Jawa. Selain itu juga hewan yang merupakan produksi pangan dipelihara dengan sebaik-baiknya, dan direncanakan pula program transmigrasi.

3. Panitia Pemikir Siasat Ekonomi

Panitia ini adalah perluasan dari Badan Perancang Ekonomi yang dipimpin oleh *Hatta*. Panitia ini merancang program pembangunan jangka panjang, dengan tujuan untuk memberi kemakmuran terhadap rakyat secara adil dan merata. Adapun rancangan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Intensifikasi usaha produksi.
b. Memajukan pertukaran internasional.
c. Mewujudkan taraf hidup yang lebih tinggi.
d. Mempertinggi derajat dan kecakapan rakyat.

4. Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE)

Masa perang kemerdekaan, peranan dan partisipasi para pengusaha swasta belum maksimal. Dalam *Kongres Persatuan Ekonomi* di Malang, Hatta menganjurkan agar para pengusaha swasta memperluas organisasinya. PTE dibawah pimpinan *B.R. Molik* berupaya memperkuat dan menggiatkan kembali peranan pengusaha swasta. Adapun tujuannya adalah menggalang kekuatan dan menghilangkan individualisme di kalangan organisasi pedagang untuk memperkuat ekonomi nasional. Untuk memperkuat PTE maka pemerintah menjanjikan akan mengangkat anggota PTE untuk duduk dalam Komite Nasional Pusat.

5. Kebijakan Gunting Syarifuddin

Upaya membentuk ketahanan ekonomi dan keuangan diselesaikan oleh pemerintah melalui:

a. Pengurangan jumlah mata uang yang beredar.
b. Mengatasi kenaikan biaya hidup.

Pemerintah RI pada waktu itu mengalami defisit sebesar Rp. 5,1 milyar. Untuk mengatasi defisit ini, pemerintah melakukan tindakan keuangan yang berupa pinjaman pemrintah sebesar 1,6 milyar. Pada tanggal 13 Maret 1950 dibidang perdagangan pemerintah melakukan ekspor dengan sistem devisa sehingga dapat merangsang ekspor.

Untuk menstabilkan masalah keuangan, pada tanggal 19 Maret 1950 pemerintah RI melalui Keputusan Menteri Keuangan No.PU 19 Maret 1950, nilai uang Rp. 250 keatas diubah nilainya sehingga tinggal separuhnya. Kebijakan pemerintah ini dikenal dengan *Gunting syarifuddin* dalam rangka pengurangan jumlah mata uang yang beredar.

6. Kebijakan Program Benteng

Dalam perencanaan perkembangan dan pembangunan ekonomi, peranan *Dr. Sumitro Djojohadikusumo* yang menjabat sebagai *Menteri Perdagangan* pada masa Kabinet Natsir cukup besar. Ia berpendapat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pad dasarnya adalah pembagunan ekonomi baru. Oleh karena itu, *sistem ekonomi kolonial* harus diubah menjadi *sitem ekonomi nasional*. Sumitro menerapkan pemikirannya itu dalam bidang perdagangan. Untuk itu, sektor pengusaha adalah bagian penting yang harus segera ditumbuhkan. Para pengusaha Indonesia umumnya bermodal lemah, sehingga pemerintah harus membantu para pengusaha baik berupa bantuan kredit maupun bimbingan konkret yang lain sehingga mereka ikut berpartisipasi dalam membangun perekonomian nasional.

Pemikiran Sumitro kemudian dituangkan dalam program kerja kabinet Natsir. Rencana program ini dikenal dengan nama *Program Benteng/Gerakan Benteng.* Program ini dimulai pada bulan April 1950, sekitar 700 perusahaan swasta Indonesia mendapat bantuan dari Program Benteng ini. Upaya pemerintah ini pada dasarnya adalah untuk melindungi dan memajukan pengusaha pribumi.

Namun demikian tujuan program ini tidak tercapai dengan baik. Hal ini diakibatkan oleh lamban dan belum dewasanya pola pikir pengusaha nasional. Bahkan ada yang menyalahgunakan kebikan pemerintah dengan mencri keuntungan untuk kepentingan pribadi. Kredit yang diberikan pemrintah banyak yang macet, padahal pemerintah telah menambah beban keuangannya. Perilaku pengusaha nasional ini tidak dapat membantu upaya pemerintah dalam menyelesaikan masalah ekonomi, melainkan justru menjadi salah satu penyebab defisit.

7. Nasionalisasi De Javasche Bank

Defisit anggaran yang diakibatkan oleh krisis moneter pada tahun 1952 mencapai 4,3 milyar. *Kabinet Sukiman* yang memerintah selama 10 bulan sejak bulan April 1951 sampai Februari 1952 melakukan upaya untuk mengatasi defisit anggaran. Salah satu upaya yang dlakukan adalah **menasionalisasi** *De Javasche Bank* menjadi *Bank Indonesia.* Walaupun pemerintah dihadapkan pada defisit anggaran, namun *Menteri Keuangan Yusuf Wibisono* masih tetap memberikan perhatiannya kepada para pengusaha pribumi yang bermodal lemah.

8. Kebijakan Ekonomi Ali-Baba

Menteri Perekonomian **Mr. Ishaq Tjokrohadisurjo** pada masa pemerintahan Ali Sastroamidjojo, berupaya mendorong para pengusaha pribumi untuk mengembangkan perekonomian nasional. Untuk mencapai tujuan itu, dicanangkan sistem ekonomi nasional baru dengan nama **Sistem Ali-Baba.** *Ali* mewakili dan menggambarkan para *pengusaha pribumi*, sedangkan *Baba* menggambarkan dan mewakili *pengusaha asing non pribumi*, terutama pada pengusaha Cina. Sistem ini diterapkan agar pengusaha pribumi belajar pada penguasaha non pribumi serta diadakannya kerjasama dalam rangka memajukan perekonomian nasional.

Untuk melakasanakan program ini, pemerintah mewajibkan para penguasah non pribumi memberikan pelatihan-pelatihan kepada tenaga-tenaga pribumi, membangun perusahaan-perusahaan nasional, menyediakan kredit, dan memberikan perlindungan bagi perusahaan-perusahaan swasta. Tetapi, sistem Ali-Baba ini juga mengalami kegagalan. Hal ini diakibatkan oleh perilaku pengusaha non pribumi yang berusaha memanfaatkan para pengusaha pribumi untuk mendapatkan kredit. Dampaknya, pengusaha pribumi tidak mampu bersaing dengan pengusaha asing dalam memajukan perusahaannya.

9. Nasionalisasi Perusahaan Belanda

Untuk membangun dan memperkuat sistem ekonomi, pemerintah terus melaksanakan berbagai upaya untuk melakukan perbaikan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.23 tahun 1958, pemerintah RI menjegal perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia dan menasionalisasikannya.

10. Sistem Ekonomi Terpimpin

Kebijakan demokrasi terpimpin sejak tahun 1959, berdampak pada penerapan sistem ekonomi. Kebijakan ekonomi yang diterapkan adalah sistem ekonomi terpimpin, dimana pemerintah sebagai pemimpin langsung kegiatan ekonomi. Sistem ini mengakibatkan semakin menurunnya kegiatan perekonomian. Akhirnya program-program ekonomi yang dicanangkan pemerintah mengalami kegagalan. Inflasi tidak dapat dihindarkan sampai akhir tahun1965 yakni mencapai 650 persen. Pemerintah telah gagal total dalam membangun ekonomi nasional. Kegagalan ekonomi inilah yang mengakibatkan merosotnya wibawa pemerintah sehingga keadaan menjadi tidak terkendali.

C. Gerakan 30 September *(Gestapu)* 1965

Peristiwa Gestapu 1965 adalah sejarah buram bangsa Indonesia. Peristiwa itu meletus setelah terjadi gesekan politik dan kepentingan berbagai pihak yang menghendaki dominasi dalam kepemimpinan nasional. Disamping itu PKI sebagai salah satu pihak yang harus bertanggung jawab menghendaki ideologi baru berfaham komunis menggantikan ideologi Pancasila.

Ketika Indonesia menerapkan *Demokrasi Terpimpin*, maka pihak-pihak yang menghendaki kekuasaan bersaing secara ketat untuk mendapatkan peluang. Kepemimpinan yang terpusat dan kebijakan pemerintah yang membubarkan partai politik, memunculkan golongan-golongan yang baik pro maupun kontra terhadap kebijakan Demokrasi Terpimpin. Kerjasama yang terjalin baik antara PNI dan PKI, mendorong PKI untuk pro aktif dalam pemerintahan Soekarno. Kedekatan hubungan antar presiden Soekarno dan PKI, telah membuka jalan bagi PKI untuk lebih berperan memainkan pemerintahan. Keadaan ini memunculkan kecemburuan pihak Angkatan Darat yang tidak setuju terhadap kepimpinan Soekarno. Secara terperinci akan dijelaskan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam rentetan-rentetan peristiwa Gestapu sebagai berikut.

1. Angkatan Darat

Tampilnya Angkatan Darat dalam perpolitikan nasional dilatar belakangi oleh keadaan dalam negeri yang kacau, dampak dari penerapan sistem multi partai yang kemudian memunculkan persaingan yang tidak wajar diantara partai politik. Melihat kondisi yang demikian, TNI AD merasa berkewajiban untuk segera memulihkan keamanan dalam negeri. Diterapkannya Demokrasi Terpimpin melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, semakin menyeret TNI AD untuk ikut andil dalam kancah politik.

Kedudukan Angakatan Darat semakin kuat manakala pemerintah memberikan wewenang yang lebih dalam menangani masalah Irian Barat. AD dilibatkan secara aktif dan bahkan sebagai ujung tombak dalam upaya menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda sebagai realisasi program pemerintah dalam memperbaiki masalah keuangan dan ekonomi. Dalam *Operasi Jaya Wijaya* untuk merebut Irian Barat, AD merupakan inti dan ujung tombak dalam operasi itu, bahkan terlibat aktif dalam serah terima yang dicetuskan oleh *A.N. Nasution,* dan telah membuka jalan bagi AD untuk berkiprah dalam kancah politik.

2. Partai Komunis Indonesia

Setelah peristiwa Madiun 1948, PKI berkembang sangat cepat dan mampu merekrut anggota yang cukup banyak. Sampai tahun 1965, tercatat 20 juta anggota termasuk simpatisannya. Sejak tahun 1951, PKI jatuh ke tangan tokok-tokoh muda seperti *DN. Aidit, Nyono, Lukman,* dan *Sudirman*. Satu-satunya tokoh tua yang masuk dalam jajaran pimpinan PKI adalah *Alimin*.

Dalam melebarkan sayapnya, PKI menerapkan strategi baru dengan membentuk **Front Persatuan Nasional**. Dengan strategi ini, PKI berusaha mendekati berbagai pihak untuk memuluskan jalannya. Pendekatan ini juga dilakukan terhadap Bung Karno dan PNI dan telah membuahkan hasil. Dengan demikian masyarakat sangat mudah melupakan kekejaman PKI dalam peristiwa Madiun. Disamping itu, PKI juga memperluas pengaruhnya dalam membentuk organisasi pendukungnya, seperti *BTI, SOBSI,* dan *Gerwani*.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, PKI semakin dekat dengan presiden, dan selalu mendukung kebijakan-kebijakan presiden. Dengan demikian posisi PKI semakin kuat dalam pemerintahan. Ajaran presiden Soekarno tentang **Nasakom, Resopim,** dan **Manipol,** membawa angin segar bagi PKI untuk terus melebarkan sayapnya. Ajaran itu mendudukan PKI sebagai partai yang sah dalam kehidupan bernegara. Dengan memanfaaatkan pamor Bung Karno, PKI sangat mudah dalam meraih dukungan massa.

Ketika presiden Soekarno memaklumatkan konfrontasi dengan Malaysia, PKI dengan sepenuh hati mendukung kebijakan itu. Dengan demikian posisi PKI semakin dominan dan luas, sementara AD merasa bimbang dalam mendukung Dwikora. PKI lebih agresif lagi dengan mengajukan permintaan senjata kepada Soekarno untuk mempersenjatai PKI dan ormas-ormasnya dan mengusulkan perang dengan Malaysia. Namun permintaan PKI ini tidak dikabulkan oleh presiden dengan alasan belum perlu untuk mempersenjatai sipil. PKI kemudian berperan sebagai penghubung dengan Beijing dan negara-negara komunis lain dalam menggalang kekuatan politik.

3. Situasi Politik Menjelang Peristiwa Gestapu 1965

Menjelang peristiwa Gestapu, persaingan antara PKI dan AD tidak dapat dihindarkan. Ketakutan Angakatan Darat semakin besar manakala banyak orang-orang AD yang berpihak pada Soekarno. Bahkan ada yang terang-terangan mendukung PKI. Angakatan Darat takut jika pemerintah jatuh ketangan PKI, dan begitu pula sebaliknya. AD berkepentingan untuk mempertahankan Ideologi Pancasila, sementara PKI dengan ideologinya

berupaya menanamkan komunisme. Adapun rentetan-rentetan peristiwa yang mengantarkan pada peristiwa Gestapu adalah sebagai berikut.

a. Dengan slogan PKI **sama rata sama rasa,** PKI melakukan aksi sepihak di Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera Utara. Pada akhir tahun 1963, PKI melakukan aksi demonstrasi menuntut kenaikan upah buruh. PKI juga mengambil alih tanah-tanah pertanian dan perkebunan dan kemudian membagikannya pada rakyat miskin. Tindakan ini mengundang simpati kalangan bawah terhadap PKI. Menyaksikan tindakan sepihak ini, kelompok AD merasa gerah dan khawatir aksi itu akan meluas.
b. Pada tahun 1964, PKI semakin intensif dalam melakukan propaganda komunis. PKI menyerang kelompok-kelompok yang berseberangan dengan komunis termasuk AD. Persaingan semakin nyata ketika AD menolak pembentukan *Kabinet Gotong Royong* yang memasukkan unsur-unsur PKI. Sementara PKI semakin kuat posisinya dalam pemerintahan.
c. Ketika presiden Soekarno memutuskan untuk melakukan konfrontasi dengan Malaysia, maka pada bulan Januari PKI mengusulkan kepada pemerintah untuk membentuk Angakatan Kelima dengan mempersenjatai kelompok buruh dan tani. PKI beralasan bahwa Angakatan Kelima dimaksudkan untuk menyerang Malaysia. Terhadap usulan ini, Angkatan Darat menolak dengan alasan bahwa pembentukan Angkatan Kelima akan merugikan revolusi nasional. Presiden pun kemudian menolak gagasan tersebut.
d. Pada bulan Mei 1965, ada isu bahwa **Dewan Jenderal** akan melakukan *kudeta* terhadap kepemimpinan Soekarno. Dewan Jenderal ini dibentuk oleh para perwira tinggi AD. Mendengar isu tersebut, PKI yang selama itu banyak bergantung kepada presiden merasa cemas. PKI menganggap bahwa jika Dewan Jenderal berhasil, maka PKI akan mendapatkan giliran pertama untuk dihancurkan. Menanggapi isu tersebut, PKI membentuk gerakan tandingan yang dikenal dengan nama **Dewan Revolusi.** PKI memilih perwira ABRI menjadi pimpinan Dewan Revolusi. **Letkol Untung** terpilih sebagai **Ketua Dewan Revolusi** (Mooedjanto, 1989:140).
e. Menanggapi adanya isu tuduhan kudeta, Dewan Jenderal memberi penjelasan kepada presiden bawha pertemuan-pertemuan yang selama ini diadakan bukan untuk melakukan kudeta, melainkan memeberi nasehat dan rekomendasi kepada pimpinan AD tentang kenaikan pangkat ditubuh perwira ABRI.

f. Pada bulan Juni 1965, terbetik berita bahwa presiden Soekarno menderita sakit parah. Dokter-dokter pribadi Soekarno menganjurkan bahwa presiden sebaiknya berobat keluar negeri dan menjalani operasi. Namun karena Soekarno merasa khawatir ketika kepergiannya akan digunakan oleh kelompok-kelompok yang menghendaki kekuasaan untuk melakukan kudeta, maka ia mendatangkan tim dokter dari RRC dan dinyatakan bahwa sakit presiden cukup parah. Mendengar berita itu terjadi saling mencurigai antara PKI dan AD. Keadaan inilah yang mengakibatkan terjadinya Peristiwa Gestapu 1965.

4. Peristiwa Gestapu 1965

Gestapu 1965 yang dilakukan oleh *Dewan Revolusi*, adalah sejarah buram bangsa Indonesia. Pada tanggal 30 September 1965 malam hari, *Dewan Revolusi* yang difasilitasi oleh *Pasukan Cakrabirawa (Pasukan Pengawal Presiden Soekarno),* Pemuda Pakyat, dan beberapa kesatuan dari Devisi Diponegoro dan Brawijaya yang pro komunis, melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap anggota Dewan Jenderal. Aksi tersebut dipimpin langsung oleh **Ketua Dewan Revolusi Letkol Untung** dalam gerakannya selama empat jam.

Yang berhasil diculik dan dibunuh dalam gerakan ini adalah :

a. Jenderal Ahmad Yani (Panglima AD)
b. Mayjen R Suprapto
c. Mayjen Siswanti Parman
d. mayjen Harjono MT
e. Brigjen D.I Panjaitan
f. Brigjen Soetoyo Siswodihardjo, dan
g. Lettu Pierre Tendean

Jenderal *AH. Nasution*, Menko Pertahanan dan Keamanan yang merangkap Kepala Staf Angkatan Bersenjata yang juga menjadi target operasi berhasil menyelamatkan diri dengan luka tembak dikakinya. Namun puteri kesayangannya **Ade Irma Suryani** menjadi korban peristiwa ini. Turut tewas pula dalam insiden ini **Brigadir Polisi KS. Tubun,** pengawal rumah wakil *Perdana Menetri II Dr.J.Leimena* yang rumahnya berdampingan dengan rumah Jenderal AN. Nasution.

Bersamaan dengan aksi itu, Dewan Revolusi juga menguasai dua buah sarana penting komunikasi yaitu *RRI Pusat* di Jalan Medan Merdeka Barat, dan gedung *PN Telekomunikasi* di Jalan Medan Merdeka Selatan. Melalui siaran RRI, Letkol Untung berulang kali menyiarkan

berita bahwa aksi *Gestapu* ditujukan kepada anggota Dewan Jenderal yang diisukan akan melakukan kudeta.

5. Penumpasan Gestapu

Operasi penumpasan Gestapu dilancarkan pada malam itu juga tanggal 1 Oktober setelah penculikan terhadap Dewan Jenderal. **Panglima Kostrad Mayjen Soeharto** tampil sebagai pemimpin operasi penumpasan tersebut. Dalam waktu yang relatif singkat, yakni hanya sehari, kekuatan PKI di Jakarta sudah cerai berai. Para pelaku Gestapu berhasil ditangkap dalam waktu yang relatif singkat. Mereka yang berhasil ditangkap adalah Untung, Sudisman, Nyoto yang langsung ditembak mati. Pada awalnya Menteri Soebandrio juga ikut ditangkap namun kemudian dibebaskan.

Mendengar terjadinya peristiwa Gestapu di Jakarta, *DN Aidit* yang saat itu sedang melakukan kunjungan ke Semarang merasa terkejut dan langsung pulang ke Jakarta. Namun baru saja sampai **Kota Brebes** DN Aidit berhasi ditembak mati. Demikian pula dengan *Lukman* salah seorang pimpinan muda PKI berhasil ditembak mati **di Jakarta.**

Dalam situasi yang genting maka mudahlah pasukan-pasukan dan kekuatan-kekuatan sosial politik yang anti *Gestapu* membentuk kesatuan aksi menumpas tokoh-tokoh Gestapu. Keberhasilannya dalam menumpas pelaku Gestapu, nama **Soeharto** tiba-tiba menjadi sangat mashur, bukan sebagai tokoh militer, tetapi juga tokoh politik. Ketenarannya itulah yang telah membuka jalan untuk menjadi presiden selama 32 tahun (Moedjanto, 1993:143). Tokoh lain yang tidak kalah populer adalah Kolonel Sarwo Edhi Wibowo sebagai pimpinan RPKAD yang juga ikut berperan dalam menumpas Gestapu.

BAB V
INDONESIA PADA MASA ORDE BARU

A. Runtuhnya Orde Lama

Sejak Dekrit Prsiden 5 Juli 1959, Indonesia kembali kepada UUD 1945. Namun selama dekrit itu berlaku dan menandai diterapkannya sistem Demokrasi Terpimpin, dalam pelaksanaanya masih banyak ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 yang tidak dilaksanakan

menurut aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang Dasar. Pemerintah telah menafsirkan salah bahwa Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi yang sesuai dengan budaya Indonesia yakni UUD 1945.

Dapat dilihat dalam bidang ketatanegaraan, banyak ditumbuhkan lembaga-lembaga yang tidak sesuai dengan jiwa dan bunyi UUD 1945. Lembaga-lembaga ketatanegaraan yang ada dan waktu itu masih bersifat sementara saja, tidak bekerja sebagaimana yang diharapkan. Lembaga-lembaga tersebut tidak memperoleh penempatan yangsemestinya. Dalam kondisi yang demikian, sangat memberi peluang kepada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan untuk menjalankan peranan-peranan yang dapat merugikan jalannya pemerintahan negara.

Dalam bidang politik, Demokrasi Terpimpin telah menarik berbagai pihak untuk bergelut dalam pemerintahan, sehingga berakibat pada situasi politik yang tidak stabil. Tampilnya PKI dalam kepemerintahan, memunculkan kecumburuan dan kekhawatiran banyak kalangan. Dalam situasi demikian, tampilnya kekuatan politik Angkatan Darat tidak dapat dihindarkan. Akhirnya kekacauan politik memuncak dengan meletusnya *Gestapu 1965*, yang telah mendorong runtuhnya pemerintahan Soekarno.

1. Munculnya Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura)

Dalam keadaan yang serba kacau, akhirnya berdampak pada semakin buruknya situasi politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Muncullah aksi-aksi yang menuntut dituntaskannya peristiwa *Gestapu*. Aksi tersebut dipelopori Kesatuan Aksi Mahasiswa Indoonesia (KAMI), Kesatuan Aksi Pemuda Indonesia (KAPI), kemudian (KPPI), dan Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI), Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI), dan Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI). Akhirnya pada tanggal 26 Oktober 1965 kesatuan-kesatuan aksi ini membentuk suatu front bersama yang dikenal dengan **Front Pancasila.**

Keadaan ekonomi yang semakin memburuk, telah mendorong semakin bertambahnya perpecahan yang menjurus ke arah konflik politik. Gelombang demonstrasi yang menuntut pembubaran PKI semakin meluas sejak terbentuknya *Front Pancasila.* Mereka kemudian mengajukan tuntutan kepada pemerintah yang dikenal dengan **Tri Tuntutan Hati Nurani Rakyat** atau lebih dikenal dengan *Tiga Tuntutan Rakyat (TRITURA).* Tuntuntutan ini diajukan kepada pemerintah oleh Front Pancasila dengan mendatangi gedung DPR-GR pada

tanggal 12 Januari 1966 dengan mengajukan tiga buah tuntutan rakyat (Tritura). Adapun isi dari Tritura itu adalah sebagai berikut.

a. Pelaksanaan kembali secara murni dan konsekuen UUD 1945
b. Pembubaran Partai Komunis Indonesia
c. Penurunan harga barang-barang.

Menanggapi tuntutan tesebut, presiden Soekarno semakin kehilangan arah kepemimpinan. Wibawa pemerintah semakin merosot. Terlebih lagi manakala AD dengan RPKAD-nya mendukung aksi-aksi demonstrasi tersebut. Presiden kemudian *mereshuflle Kabinet Dwikora* pada tanggal 21 Februari 1966, dan diberi nama **Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan**. Namun tindakan tersebut justru semakin memperbesar kekecawaan rakyat terhadap presiden. Hal ini disebabkan oleh banyaknya orang-orang komunis atau pro PKI yang masuk dalam jajaran kabinet. Ini mengindikasikan bahwa pemerintah telah mengabaikan *Tritura.*

Untuk menandingi aksi Tritura, presiden Soekarno juga telah membentuk **Barisan Soekarno.** Hampir semua golongan termasuk beberapa anggota Dewan Mahasiswa (Universitas Indonesia) menyatakan dukungannya. Akan tetapi ABRI menolak pembentukan *Barisan Soekarno* secara formal. Tanggal 18 Januari kemudian ABRI mengumumkan larangan terhadap pembentukan Barisan Soekarno yang diikuti oleh daerah-daerah. Setelah gagalnya pembentukan Barisan Soekarno, presiden kemudian memberi komando kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menyusun *Barisan Pembela Pemimpin Besar Revolusi.* Namun komando ini juga tidak membuahkan hasil, malah justru menambah panasnya situasi politik dan pemerintahan .

Pada hari pelantikan kabinet baru tanggal 24 Februari 1966, para demonstran yang dipelopori oleh KAMI berusaha menghalangi dan menggagalkan upacara pelantikan. Para demonstran melakukan aksi serentak memblokir jalan-jalan dan mengempeskan ban-ban mobil sehingga lalu lintas lumpuh. Aksi ini berdampak pada bentrokan yang tidak dapat dihindarkan didepan istana. Dalam bentrokan ini gugur seorang demonstran **Arief Rachman Hakim,** mahasiswa UI karena tertembak oleh **Pasukan Cakrabirawa.**

Aksi-aksi demonstrasi tersebut menimbulkan kemarahan presiden Soekarno. Kemudian pada tanggal 25 Februari 1966 Presiden Soekarno membubarkan KAMI. Tetapi tindakan ini juga tidak mampu meredam aksi-aksi demonstrasi, melinkan justru semakin menambah merosotnya wibawa presiden. Mantan anggota KAMI kemudian bergabung

dengan KPPI membentuk *Resimen Arief Rachman Hakim* dibawah lindungan ABRI. Mereka menamakan dirinya **Angkatan 66.**

2. Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (Supersemar)

Pada tanggal 10 Maret 1966, presiden Soekarno mengadakan pertemuan dengan memanggil Front Pancasila, Partindo dan PNI serta wakil-wakil partai. Dalam pertemuan itu presiden menekankan agar partai politik dan organisasi masa mengutuk demonstrasi Tritura. Dalam pertemuan ini Front Pancasila tidak mau mengutuk demonstrasi Trirura. Mereka tetap menuntut agar PKI segera dibubarkan. Akhirnya pertemuan ini tidak membuahkan hasil, dan tuntutan Front Pancasila agar PKI dibubarkan tidak dipenuhi oleh pemerintah.

Pada tanggal 11 Maret 1966, pemerintah menyelenggarakan sidang kabinet untuk mencari jalan keluar dalam menghadapi krisis yang semakin memuncak. Akan tetapi sidang terhenti karena presiden diberi tahu oleh **Brigjend Subur**, *Komandan Cakrabirawa*, bahwa sidang akan dikacau oleh kekuatan sosial-politik yang menentangnya. Presiden kemudian meninggalkan sidang diikuti oleh *Soebandrio* dan *Chairul Saleh* terbang dengan helikopter menuju Bogor. Sidang kemudian ditutup oleh *Dr. J. Leimena* dan langsung menyusul ke Bogor dengan menggunakan mobil.

Dalam keadaan yang demikian, pimpinan AD menawarkan jasa untuk memulihkan keadaan agar pemerintah tidak terganggu. **Jenderal Soeharto** kemudian mengutus tiga Jenderal yakni *M. Yusuf, Amir Mahmud,* dan *Basuki Rachmad* untuk menemui presiden di Istana Bogor dan menyampaikan tawaran untuk memulihkan keadaan. Pesan Soeharto berpesan kepada tiga jenderal itu adalah bahwa dirinya siap dan sanggup untuk mengatasi keadaan yang senakin memburuk. Pertemuan tiga Jenderal dengan presiden Soekarno ini menghasilkan keluarnya keputusan presiden yang berupa *Surat Perintah Sebelas Maret 1966* atau **Supersemar.** Isinya berupa surat perintah dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi keadaan bahaya. Keluarnya Supersemar ini telah mengakibatkan adanya *dualisme kepemimpinan* dan menandai mulai tampilnya **Orde Soeharto** atau **Orde baru.**

B. Tampilnya Orde Baru

Supersemar adalah tonggak sejarah lahirnya **Orde Baru** atau kepemimpinan Soeharto. Dengan keluarnya Supersemar, Presiden Soekarno sudah kehilangan sebagian besar

kekuasaannya. Jenderal Soeharto yang diberi wewenang untuk mengatasi keadaan bahaya melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut.

1. Pembubaran PKI

Pada tanggal 12 Maret 1966, Jenderal Soeharto mengeluarkan keputusan No. 1/3/1966 tentang pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya. Pembubaran PKI adalah tuntutan rakyat sebagaimana tertuang dalam Tritura. Supersemar telah menjadi senjata yang ampuh untuk membubarkan PKI yang selama itu berseteru dengan AD.

2. Membersihkan Kabinet dari Unsur PKI

Melalui pengumuman Presiden No.5 tanggal 18 Maret 1966 yang tertanda Jenderal Soeharto atas nama presiden dilakukan penangkapan beberapa menteri Kabinet Dwikora yang dianggap tersangkut dengan PKI. Diantara para menteri yang ditangkap terdapat pula menteri luar negeri **Dr. Subandrio.**

3. Penataan Lembaga-Lembaga Pemerintahan

Tindakan ini dimaksudkan untuk menertibkan kembali fungsi-fungsi lembaga pemerintahan dan kehidupan sosial yang diharapkan. Untuk mewujudkan tujuan ini, AD melancarkan gerakan kembali ke UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Langkah selanjutnya adalah menata MPRS dengan membersihkan anggotanya dari unsur-unsur PKI. Setelah dlakukan penataan terhadap MPRS, lembaga tertinggi ini melakukan sidangnya yang ke IV yakni dari tanggal 20 Juni-5 Juli 1966. Sidang ini dipimpin oleh **Jenderal A.N. Nasution**, dan menghasilkan ketetapan-ketetapan penting yang diantaranya adalah sebagai berikut.

a. Tap. No. IX/MPRS/1966 tentang pengukuhan Supersemar.
b. Tap. No. XII/MPRS/1966 tentang kebijaksanaan politik luar negeri Indonesia.
c. Tap. No. XIII/MPRS/1966 tentang pemberian wewenang kepada Soeharto untuk membentuk Kabinet Ampera.
d. Tap. No. XVIII/MPRS/1966 tentang pencabutan Tap. No. III/MPRS/1963 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup.
e. Tap. No. XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran PKI dan ormas-ormasnya serta larangan setiap untuk menyebarkan ajaran komunis-marxisme-leninisme.

Dengan dikukuhkannya Supersemar dalam ketetapan MPRS, maka presiden Soekarno tidak dapat mencabutnya, melainkan justru sebaliknya dituntut untuk mendukungnya.

4. Pembentukan Kabinet Ampera

Berdasarkan pada kekuatan Tap. No. XIII/MPRS/1966, maka Jenderal Soeharto kemudian membentuk Kabinet Ampera. Kabinet ini diresmikan pada tanggal 28 Juli 1966. Dengan demikian, dualisme kepemimpinan tidak dapat dihindarkan. Terdapat tiga tokoh utama dalam kabinet ini adalah **Soeharto, Sri Sultan Hamengkubuwono IX,** dan **Adam Malik.** Tugas pokok *Kabinet Ampera* adalah melaksanakan *Dwi Dharma* dan programnya *Catur Karya*. **Dwi Dharma** adalah menciptakan:

a. Kestabilan politik, dan
b. Kestabilan ekonomi

Sedangkan program **Catur Karya** adalah:

a. Memenuhi kebutuhan pangan dan sandang
b. Menyelenggarakan Pemilu
c. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif, dan
d. Meneruskan perjuangan melawan imperialisme dan kolonialisme

Adapun susunan Kabinet Ampera tersebut sebagai berikut.

Tabel 5.1. Susunan Kabinet Ampera

1.	Presiden	Ir. Soekarno
2.	Perdana Menteri merangkap Menteri Utama Bidang Pertahanan dan Keamanan	Soeharto
3.	Menteri Utama bidang Politik	Adam Malik
4.	Menteri Utama Ekonomi dan Keuangan	K.H. Idham Chalid
5.	Menteri Utama Ekonomi dan Keuangan	Sri Sultan Hamengkubuwono IX
6.	Menteri Utama Perindustrian dan Pembangunan	Sanusi Haryadinata
7.	Anggota Kabinet	24 Menteri

Pada sidang umum MPRS 1966, presiden Soekarno selaku mandataris MPRS diminta untuk memberi pertanggungjawaban atas peristiwa-peristiwa nasional selama Demokrasi Terpimpin khususnya masalah peristiwa *Gestapu* dan kebangkrutan ekonomi. Pada tanggal 22 Juni 1966 presiden menyampaikan pidato pertanggungjawaban dihadapan sidang MPRS yang diberi judul **Nawaksara.** Sidang MPRS tidak puas dengan pidato presiden karena pidato yang panjang lebar itu sama sekali tidak menyebut-nyebut masalah Gestapu. Oleh sebab itu MPRS meminta kepada presiden untuk melengkapi pidatonya yang berjudul Nawaksara itu.

Pada tanggal 10 Januari 1967, presiden melengkapi pidato Nawaksara pertanggungjawabannya. Namun isinya tidak memuaskan berbagai kalangan. Kemudian pada tanggal 9 Februari 1967 DPR-GR mengajukan resolusi dan memorandum kepada MPRS agar menggelar *Sidang Istimewa*. Melihat situasi yang sudah tak terkendali, akhirnya pada tanggal 20 Februari 1967 Presiden Soekarno melimpahkan kekuasaan pemerintahan negara kepada Jenderal Soeharto sebagai pemegang Supersemar.

Meskipun Presiden Soekarno sudah menyerahkan kekuasaan, namun MPRS tetap menggelar Sidang Istimewa pada tanggal 22 Februari 1967. Dalam sidang tersebut, MPRS mengeluarkan Ketetapan yakni Tap. MPR No. XXXIII/MPRS/1967 yang isinya sebagai berikut.

a. Mencabut kekuasaan pemerintahan dari Presiden Soekarno.
b. Presiden Soekarno tidak diperbolehkan melakukan kegiatan politik sampai diselenggarakannya Pemilu.
c. Mengangkat Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden.

C. Situasi Politik dan Ekonomi Masa Orde Baru

Istilah Orde Baru sesungguhnya sudah tidak relevan lagi dengan perjalanan sejarah bangsa sampai pada saat ini. Istilah Orde Baru akan lebih tepat jika diganti dengan istilah Orde Soeharto (OS) atau Masa Pemerintahan Soeharto (MPS), mengingat jaman itu sudah menjadi tanggung jawab sejarah berganti dengan jaman yang lebih baru. OS telah dibesarkan oleh sejarah hingga tampilnya selama 32 tahun dalam pemerintahan, namun telah ditenggelamkan pula oleh sejarah. Oleh karena itu, sebaiknya kita, pemerintah dan masyarakat harus pandai-pandailah belajar dari sejarah agar keterpurukan bangsa tidak selalu terulang.

Perubahan sistem politik dari Demokrasi Terpimpin menjadi OS atau Orde Baru, berdampak pula pada perubahan arah dan kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia. Segera

setelah presiden dilantik membentuk kabinet yang diberi nama **Kabinet Pembangunan**. Kabinet Presidensial ini mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan program yang dikenal dengan *Pancakrida*. Program tersebut adalah sebagai berikut.

1. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi.
2. Menyusun dan merencanakan Repelita.
3. Menyelenggarakan Pemilu
4. Memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat dan menumpas PKI hingga ke akar-akarnya.
5. Menjalankan pembersihan dan penyempurnaan aparatur negara secara menyeluruh.

Memasuki tahun kedua Pelita I, pemerintah bersama DPR-GR telah merampungkan dalam menata perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan. Misalnya Undang-Undang yang mengatur *hubungan pusat dan daerah* telah diselesaikan. Pemerintah berhasil pula merintis hubungan tata kerja yang rasional antar lembaga-lembaga tinggi. Dengan demikian pemerintah tidak kesulitan dalam melakukan koordinasi dalam penataan kepemerintahan. **Dewan Pertimbangan Agung** misalnya, berhasil mengajukan usul-usul terhadap pemerintah. **Badan Pemeriksa Keuangan** juga telah memberikan koreksi terhadap masalah penggunaan keuangan negara. Begitu juga di bidang hukum, pemerintah maupun masyarakat mulai sadar terhadap ketentuan hukum.

1. Pemilihan Umum

Salah satu program kerja *Kabinet Pembangunan I* sesuai dengan amanat MPRS adalah menyelenggarakan Pemilu. Partai politik yang dapat mengikuti pemilu adalah partai politik yang pada saat Pemilu sudah dan masih diakui, serta mempunyai wakil baik di DPR maupun DPRD. Pemilihan Umum dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 1971 dan diikuti oleh 10 peserta. Adapun 10 peserta berikut perolehan kursinya adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2. Peserta Pemilu 1971 dan Perolehan kursi di DPR

1.	Sekber Golkar	236 kursi
2.	NU	58 kursi
3.	Parmusi	24 kursi
4.	PNI	20 kursi

5.	DSII	10 kursi
6.	Parkindo	7 kursi
7.	PKRI	3 kursi
8.	Perti	2 kursi
9.	IPKI	0 kursi
10.	Murba	0 kursi
		360 kursi

Jumlah anggota DPR kesuluruhan adalah 460 orang dimana 25 anggota melalui pengangkatan non ABRI, dan 75 anggota yang disediakan untuk ABRI.

Jumlah keanggotaan MPR ada 920 anggota yang terdiri dari anggota DPR ditambah utusan daerah dan golongan-golongan. Meskipun tedapat betikan berita pemilu 1971 kebebasan dalam memberikan suara tidak terjamin, namun yang patut menjadi perhatian adalah bahwa pemilu 1971 itu tidak menampakkan adanya kerusuhan-kerusuhan yang mewarnai pemilu tersebut.

Berdasarkan ketetapan MPR No. VII/MPR/1973, maka diselenggarakanlah pemilu kedua dalam masa Orde Baru pada tahun 1997. Berbeda dengan pemilu sebelumnya yang diikuti oleh 10 peserta partai politik, maka pada pemilu 1977 diikuti oleh 3 peserta partai politik saja. Hal ini terjadi karena pemerintah Orde Baru melakukan penyederhanaan partai politik dengan melakukan penggabungan partai politik. Penggabungan partai politik ini didasarkan pada kesamaan visi dan misi atau kesamaan tujuan dan program-programnya. Penggabungan ini memunculkan 3 kekuatan partai politik sebagai berikut.

Tabel 5.3. Partai Politik Peserta Pemilu 1977

1.	PPP (Partai Persatuan Pembangunan)	Gabungan dari : PSII, PERTI, NU, dan Permusi
2.	PDI (Partai Demokrasi Indonesia)	Gabungan dari : PNI, IPKI, Parkindo, Partai Murba, dan Partai Katolik.
3.	Golongan Karya	Sebelumnya Sekber Golkar tidak mengalami penggabungan.

Dalam pemilu 1977, Golkar tetap unggul dengan memperoleh suara mayoritas di DPR. Adapun perolehan suara tersebut dapat ditabelkan sebagai berikut.

Tabel 5.4. Perolehan Kursi DPR pada Pemilu 1977

1.	PPP	99 kursi
2.	PDI	29 kursi
3.	Golkar	232 kursi
	Jumlah	350 kursi

Sedangkan 100 kursi melalui pengangkatan dimana 75 kursi dari ABRI dan 25 dari non ABRI.

Sesuai dengan ketetapan MPR No. VII/MPR/1978, maka pada tahun 1982 kembali diselenggarakan Pemilu. Dalam keanggotaan DPR perolehan kursi tiap peserta adalah sebagai berikut.

Tabel 5.5. Perolehan Kursi DPR pada pemilu 1982

1.	PPP	94 kursi
2.	PDI	24 kursi
3.	Golkar	246 kursi
	Jumlah	364 kursi

Jumlah anggota DPR yang melalui pengangkatan turun menjadi 96 kursi, dimana 75 dari kursi dari ABRI dan 21 dari non ABRI. Ini disebabkan oleh masuknya Timor Timur yang diberi jatah 4 kursi dan diambil dari jatah pengangkatan non ABRI.

Selama masa Orde Baru, pemilu dilaksanakan sebanyak 6 kali, dimana Golkar selalu dominan. Bahkan setelah Orde Baru runtuh pun Golkar dapat tetap bertahan di papan atas dalam perolehan sangan fantastis. Berikut ini dapat digambarkan rentetan pemilu di Indonesia sejak tahun 1955 sampai pemilu 2004 beserta jumlah pesertanya.

Tabel 5.6. Rentetan Pemilu di Indonesia 1955-2004

Tahun Pemilu	Jumlah Peserta	Partai Pemenang

1955	172 peserta Parpol/non parpol	PNI
1971	10 partai	Sekber Golkar
1977	3 partai	Golkar
1982	3 partai	Golkar
1987	3 partai	Golkar
1992	3 partai	Golkar
1997	3 partai	Golkar
1999	48 partai	PDIP
2004	24 partai	Golkar

Dari tabel dapat dilihat bahwa Golkar dapat mendominasi suara. Karena dominasi kursi Golkar itulah Presiden Soeharto yang membesarkan Golkar dapat terpilih dalam 6 kali pemilu menjadi presiden. Posisinya lebih diperkuat oleh adanya anggota Dewan dari Fraksi ABRI yang selalu setia mendukungnya.

2. Strategi Politik Orde Baru

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Orde Baru menerapkan berbagai strategi politik dalam menyelenggarakan kekuasaannya. Beberapa strategi tersebut adalah sebagai berikut.

a. Penyederhanaan Partai Politik

Penyederhanaan partai politik dari 10 menjadi 3 partai saja, sangat menguntungkan Golkar. Suara rakyat tidak terlalu terpecah pada partai-partai lain. Golkar yang saat itu sedang populer, maka mendominasi suara. Tindakan ini juga dilakukan untuk mempermudah konsolidasi pemerintah terhadap partai politik.

b. Pendekatan ABRI

Sepanjang sejarah Indonesia, ABRI adalah kekuatan sosial politik yang tidak dapat diabaikan. Untuk selalu memperoleh dukungan dari milter, maka Soeharto melakukan pendekatan terhadap militer. Dengan dukungan militer yang kuat, maka pamor dan wibawa pemerintah dimata rakyat sangat besar. Adapun yang dijalankan oleh pemerintahan Soeharto adalah dengan menempatkan ABRI pada posisi sentral baik dalam pemerintahan maupun non

pemerintahan. Di DPR RI tanpa harus ikut Pemilu ABRI sudah memperoleh jatah 75 kursi, suatu jumlah yang cukup besar dalam ukuran fraksi. Disamping itu banyak naggota ABRI yang duduk dalam kabinet, bahkan pimpinan dalam bidang perekonomian seperti halnya menjadi Direktur Pertamina dan menguasai bisnis-bisnis militer. Bahkan setelah pensiun pun mereka sudah dipersiapkan dalam pekerjaan lain seperti Gubernur, Bupati, Walikota, dan posisi lain yang cukup bergengsi. Dengan demikian pemerintahan Orde Baru sangat kokoh dan sulit dogoyahkan oleh kekuatan lain.

c. Pembangunan Demokrasi

Pada masa Orde Baru, demokrasi adalah konsep yang dijadikan sebagai *Panglima.* Meskipun demokrasi tidak berjalan dengan baik, namun pemasyarakatan *Demokrasi Pancasila* telah menarik simpati rakyat. Pemerintah dalam hal ini mengemukakan konsep pelaksanaan pancasila secara *murni* dan *konsekuen.* Sebagai realisasinya, maka pada tanggal 12 April 1976 pemerintah menyampaikan konsep mengenai *Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila* yang dikenal dengan *Eka Prasetya Pancakarsa.* Konsep ini kemudian dikukuhkan oleh MPR pada Sidang Umum 1978 dengan ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang *P4 (Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila).*

Gagasan ini mendapat tanggapan yang baik dari rakyat. Adapun untuk pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen ini, maka diadakanlah pentaran-penataran P4 diberbagai lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah. Pendekatan demokrasi juga semakin diperkokoh dengan adanya gagasan Asas Tunggal Pancasila. Artinya tidak ada asas lain dalam keorganisasian apapun kecuali Pancasila. Dengan demikian, kekuatan sosial politik lain yang tidak setuju dengan asas Pancasila sulit untuk berkembang.

d. Pembangunan Ekonomi

Ketika Soeharto diangkat sebagai presiden, maka bidang ekonomi adalah program kedua setelah bidang politik. Pada tangga 15 Juni 1968, Presiden Soeharto menunjuk sebuah tim yang terdiri dari 8 ahli dan teknokrat yang memiliki latar belakang Pendidikan Barat. Mereka diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengawasi dan mengatur perkembangan *trend ekonomi.* Mereka juga diminta untuk menyampaikan pendapat dan rekomendasi dalam memberikan arah pembangunan ekonomi. Hasil pemikiran para pakar tersebut dituangkan dalam bentuk *Rancangan Pembangunan Lima Tahun (Repelita).* Keseriusan pemerintah dalam

menjalankan program ekonomi, mendapat sambutan yang baik dari berbagai komponen bangsa yang menjadi faktor pendukung legitimasi Orde Baru.

3. Pembangunan Ekonomi

Pada masa awal Pemerintahan Soeharto, program pemerintah dalam bidang ekonomi adalah penyehatan kehidupan ekonomi dengan melakukan *stabilisasi* dan *rehabilitasi ekonomi*. Kenaikan harga yang melambung pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi sekitar 650% setahun tidak memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dengan segera, melainkan mau tidak mau harus menstabilkan perekonomian nasional. Untuk mengupayakan stabilisasi dan rehabilitasi, maka MPRS mengeluarkan Ketetapan No. XXIII/1966 tentang *Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan* yang pada dasarnya adalah suatu gagasan yang strategis dan tepat untuk menanggulangi kemorosotan ekonomi yang menimpa Indonesia sejak tahun 1955.

Selanjutnya MPRS menggariskan tiga macam program yang wajib diselesaikan oleh pemerintah secara bertahap adalah :

a. Program penyelamatan ekonomi
b. Program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi, dan
c. Program pembangunan ekonomi

Adapun skala prioritas dari program stabilisasi dan rehabilitasi adalah dengan melakukan :

a. Upaya pengendalian inflasi
b. Pencukupan kebutuhan pangan
c. Rehabilitasi prasarana ekonomi, dan
d. Pencukupan kebutuhan sandang

Untuk melaksanakan program yang digariskan oleh MPRS maka pemerintahan Soeharto mengammbil kebijakan-kebijakan ekonomi sebagai berikut.

a. Anggaran Berimbang (Balanced Budget)

Kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menekan laju inflasi dan mendongkrak nilai rupiah yang terpuruk. Sampai tahun 1970, upaya pemerintah dalam menekan laju inflasi cukup berhasil. Keberhasilan ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 5.7.Laju Inflasi Tahun 1966-1970

Tahun	Laju inflasi
1966	639%
1967	113%
1968	85%
1969	10%
1970	9%

b. Meningkatkan Produksi dan Distribusi

Kebijakan pemerintah dalam bidang produksi adalah dengan menetapkan upaya peningkatan produksi sandang pangan, terutama yang berkaitan dengan sembilan bahan pokok. Pemerintah juga meningkatkan produksi ekspor serta memperbaiki sarana dan prasarana produksi. Sedangkan dalam bidang distribusi ditetapkan program untuk memperlancar distribusi dengan cara melakukan penertiban pengawasan dan pengausaan 9 bahan kebutuhan pokok, peningkatan kemampuan Angkatan Darat, Laut, dan Udara, serta memperlancar komunikasi baik nasional maupun internasional.

c. Rekapitulasi Utang Luar Negeri

Utang luar negeri Indonesia sebagai warisan Orde Soekarno cukup besar. Utang RI berjumlah lebih dari US$ 2.000.000.000 yang digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak produktif. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Soeharto berhasil melakukan perjanjian penundaan pembayaran utang-utang tersebut. Hal ini didasarkan pada **Perjanjian Paris** dimana utang RI yang seyogianya dibayar pada tahun 1962, ditunda sampai tahun 1978.

Disamping itu, pemerintah juga berhasil dalam menarik pinjaman-pinjaman asing dengan persyaratan yang lunak atau berupa pinjaman lunak. Negara-negara kreditor yang bersedia memberikan pinjaman kepada RI diantaranya adalah negara-negara yang tergabung dalam *IGGI (Inter Goverment Grauf of Indonesia).* Organisasi ini bertugas memperhitungkan berapa bantuan yang dapat diberikan kepada Indonesia dan berhak mengawasi penggunaannya. Dengan bantuan IGGI, pemerintah dapat melakukan penataan masalah ekonomi.

d. Pemberantasan Korupsi dan Penyelundupan

Sejak masa pemerintahan Soekarno, penyelendupan dan korupsi adalah permasalahan yang sulit untuk diatasi. Pada masa awal Orde Baru, korupsi telah menjalar

keberbagai lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah. Penyakit sosial masyarakat ini telah merusak berbagai bidang kehidupan. Tidak heran apabila rakyat kita tetap miskin ditengah melimpah ruahnya kekayaan alam negeri ini karena habis dikorupsi. Seyogianya bagi negara Indonesia yang kaya, maka pejabatnya juga kaya, dan rakyatnya juga kaya. Ini adalah tugas pemimpin rakyat yang berpihak pada rakyat.

Begitu pula dalam hal penyelendupan yang semakin meluas sejak tampilnya Orde Baru. Sampai tahun 1975, pemerintah belum serius dalam menangani masalah penyelundupan. Baru pada tahun 1976 pemerintah berupaya memberantas penyelundupan yang dampak negatifnya sangat luas. Namun sampai berkahirnya pemerintahan Soeharto masalah penyelundupan tersebut tidak dapat teratasi.

4. Pembangunan nasional dan Kabinet-kabinet Pembangunan

Perubahan sistem politik dari Demokrasi Terpimpin menjadi Demokrasi Pancasila pada masa Soeharto membawa perubahan pula pada arah dan kebijakan pembangunan ekonomi. Ketika Orde Baru mulai tampil dalam pemrintahan, kita mempunyai kabinet yang diberi nama **Kabinet Ampera.** Semenjak Jenderal Soeharto dilantik menjadi presiden RI pada tahun 1968, maka kabinetnya diganti menjadi *Kabinet Pembangunan.*

Program pembangunan nasional dituangkan kedalam suatu perencanaan bertahap, yaitu pembangunan nasional jangka panjang 25 tahun dan *Pembangunan Lima Tahun (Pelita).* Pada masa awal pemerintahan pemulihan dan pembangunan ekonomi nasional mendapat prioritas utama, yang membutuhkan adanya stabilitas politik yang dinamis. Pada mulanya, kebutuhan akan biaya pembangunan sebagian besar diperoleh melalui pinjaman luar negeri. Sementara struktur kebinet sebagai pelaksana dan pengemban tugas program pembangunan lebih bersifat *Zaken Kabinet* dimana kabinet diisi oleh orang-orang yang ahli.

Adapun tujuan pembangunan nasional Indonesia secara umum adalah menciptakan masyarakat yang adil dan makmur baik secara materiil maupun spirituil yang mendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Kebijakan pemerintah dalam melaksanakan pembanguanan itu bertumpu kepada apa yang disebut **Trilogi Pembangunan** yang mencakup :

a. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
b. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan
c. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, maka dieperlukan adanya pola dasar dan pola umum pembangunan jangka penjang sebagai pedoman bagi pelaksanaan pembangunan nasional tersebut. Kedua pola tersebut dicantumkan dalam *GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara)* sebagai pedoman untuk melaksanakan program pembangunan. Dalam penerapannya dikenal adanya pembangunan jangka panjang 25-30 tahun, dan pembangunan jangka pendek (Pelita) Pembangunan Lima Tahun. Secara garis Besar Pembangunan Lima Tahun dalam rencana Kabinet pembangunan Orde Baru dapat dirinci sebagai berikut.

a. PELITA I

Pelita I dijalankan dari 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974. pelita I ini memberi tekanan pada kebijakan *pangan* disekitar bidang *produksi* dan *konsumsi beras*. Hal ini dilakukan karena pada masa itu kebijakan pengan identik dengan beras, meskipun dengan tidak mengaibaikan bidang lain. Tujuan dari pelita I ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap berikutnya.

Terjadi perubahan-perubahan yang cukup besar selama pelita I dan berguna untuk pembangunan masa berkutnya. Sektor pertanian, peternakan, dan kehutanan memberikan sumbangan yang cukup signifikan pada tahun 1971. Sedangkan peran sektor industri dalam hal pembiayaan pembangunan semakin bergerak naik dari 81,8% dalam tahun 1971 menjadi 10% pada akhir pelita I. kemampuan sektor industri ini ditoang oleh semakin luasnya jenis usaha industri, juga meningkatnya kemampuan dalam melakukan ekspor.

b. PELITA II

Melanjutkan pencapaian yang diperoleh dari pelita I, maka pelita II segera dilaksanakan yang berlangsung sejak 1 April 197 sampai 31 Maret 1979. Pada rencana pelita II pemerintah meletakkan laju pertumbuhan sektor industri sebesar 31.0%, pertambangan 10,11% dan pertanian 4,6%. Pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun berkisar pada 7,2%. Dalam pelaksanaannya, pelita II ini cukup berhasil dan menggembirakan.

c. PELITA III

Pelita III dimulai sejak 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984. Pelita III ini tekanannya adalah pada *asas Trilogi pembangunan*. Meskipun banyak kendala-kendala ekonomis, namun pada tahun 1980 menurut *Laporan General Agreement on Tariff and Treate (GATT),* Indonesia telah

mengungguli negara-negara berkembang lainnya dilihat dari kenaikan tahunan dalam nilai ekspor hasil-hasil industri.

d. PELITA IV

Pelita IV dimulai sejak 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989. Pada masa ini program ekspor komoditi industri terus ditingkatkan. Pengolahan bahan mentah dilakukan di luar pulau Jawa berhubungan dengan tersedianya sumber daya alam yang terdapat di kawasan tersebut.

Menjelang tahun 1987, pangsa sektor industri mampu melebihi pendapatan pemeintah dari sektor ekspor migas. Ekspor hasil industri mencapai US$ 2,7 milyar. Dengan demikian, untuk pertama kalinya sektor industri menggantikan tempat sektor pertanian dan sektor pertambangan pada tahun 1987.

e. PLEITA V

Pelita V dimulai sejak 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994. Pada masa ini, pertumbuhan ekonomi nasional agak terhambat karena adanya kemorosotan ekonomi dunia yang mencapi 0,8% ditambah adanya kekeringan yang melanda berbagai daerah. Pertumbuhan ekoomi pada tahun 1989 dan 1990 sudah mencapai 7,4% per tahun. Sedangkan pada tahun 1991 laju pertumbuhan ekonomi nasional menurun menjadi 6,6%. Namun demikian, pertambahan laju pertumbuhan ini masih dalam batas-batas yang wajar.
Adapun laju pertumbuhan beberapa sektor utama sebagai berikut.

Tabel 5.8. Pertumbuhan Sektor Utama Pada Pelita V

Sektor	Pertumbuhan
Pertanian	1,3%
Pertambangan	9,3%
Perdagangan	5,4%
Industri Pengolahan	9,8%
Transportasi dan Komunikasi	71,0%
Perbankan	12,7%

f. PELITA VI

Pelita VI dimulai sejak 1 April 1994 dan rencananya berakhir pada 31 Maret 1999. Pelita VI ini sasarannya adalah pertumbuhan sektor ekonomi diatas 7%. Namun tujuan ini pupus manakala dunia diguncang oleh krisis moneter pada tahun 1997 yang juga berdampak pada Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Pada saat ekonomi nasional sedang rapuh karena banyaknya korupsi dan peneyelundupan, sementara utang luar negeri RI sangat tinggi, maka ketika terjadi goncangan ekonomi, maka ekonomi nasional tidak mampu membendungnya. Ini berdampak pada jatuhnya rezim Orde Baru, yang menggambarkan bahwa Orde Baru telah gagal dalam membangun ekonomi nasional.

D. Jatuhnya Rezim Orde Baru 1998

Tampilnya Orde Baru dalam panggung politik nasional adalah sejarah bangsa yang tidak dapat dihindarkan. Ketika rezim Soekarno telah gagal dalam membangun sektor ekonomi, maka pemerintahan Soeharto juga yang berlangsung selama 32 tahun mengalami hal yang serupa. Berikut rentetan-rentetan peristiwa sampai berkahirnya pemerintahan Soeharto yang atas gerakan moral mahasiswa maka Soeharto mengembalikan mandat kepada MPR.

1. Krisis Ekonomi

Pada masa pemerintahan Orde Baru selama 32 tahun, rakyat tidak menyadari bahwa negara sedang menuju kepada kebangkrutan. Rakyat terpesona dengan angka-angka statistik yang menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi, tanpa menyadari apa yang sebenarnya sedang terjadi. Pemerintahan yang bergaya militer telah membungkam aspirasi nasional dan protes-protes sosial yang selama itu muncul. *Demokrasi Pancasila* dengan konsep P4-nya adalah bemper pemerintahan untuk melegemitasi kekuasaannya. Padahal dalam sudut pandang demokrasi saja pemerintah telah melanggar Undang-Undang Dasar. Hal ini dibuktikan salah satunya dengan pembungkaman demokrasi yang membatasi jumlah partai politik. Begitu pula dalam bidang ekonomi yang ditopang oleh utang luar negeri yang segunung telah berdampak pada rapuhnya perekonomian nasional.

Ekonomi nasional semakin abruk manakala pemerintah tidak punya itikad baik untuk mensejaterakan rakyat. Berbagai krisis muncul yang menambah beratnya beban republik. Krisis moral, pendidikan, politik, keagamaan, ekonomi semakin memperburuk citra RI di mata internasional. Bahkan Indonesia mendapat predikat sebagai negara paling korup di dunia. Sangat menyakitkan. Namun betapa tidak, korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) terjadi hampir

seluruh instansi, ekonomi kerakyatan terabaikan, utang luar negeri semakin menggunung, dukungan rakyat semakin berkurang, sehingga melemahkan legimitasi pemerintah dimata rakyat. Dampaknya ketika terjadi krisis moneter internasional pada akhir tahun 1997, ekonomi nasional tidak mampu menahan jatuhnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika. Nilai tukar rupiah terus merosot drastis, dan bahkan menyentuh angka diatas Rp. 15.000 per dollar AS. Situasi krisis yang memuncak inilah yang menyebabkan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.

2. Gelombang Reformasi

Sebenarnya ketidak percayaan rakyat terhadap pemerintahan Soeharto telah berlangsung cukup lama. Namun karena sikap pemerintah yang otoriter, maka rakyat lebih memilih diam, meskipun terdapat beberapa saja rakyat yang secara terang-terangan menentang kepemimpinan Soeharto. Bahkan sikapnya yang menentang itu harus dibayar mahal dipenjara seperti yang menimpa Ketua *PUDI Sri Bintang Pamungkas* dan Ketua *PRD Budiman Sujatmiko.* Namun ketika gerakan reformasi berhasil menggulingkan pemerintahan Soeharto, kiprah mereka dalam menentang Orde Baru tidak pula menjadi perhatian. Ini mengindikasikan bahwa reformasi berjalan belum sepenuhnya benar.

Dalam mengatasi defisit APBN dan membengkaknya utang luar negeri yang diakibatkan oleh adanya krisi moneter, maka pemerintah menerapkan berbagai kebijakan ekonomi, seperti melakukan *likuidasi terhadap 16 bank,* dan menaikkan harga *Bahan Bakar Minyak (BBM).* Kabijakan melikuidasi bank-bank nakal disambut baik oleh rakyat. Namun kebijakan menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) memunculkan aksi protes dimana-mana. Harga berang-barang dan sembilan bahan pokok melambung tinggi, inlfasi tidak terkendali, sehingga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Dampaknya dari kenaikan BBM sangat dirasakan oleh masyarakat kecil baik petani maupun buruh. Banyak terjadi PHK dimana-mana, karena banyak perusahaan yang merugi dan gulung tikar. Dalam kondisi yang serba buruk ini, maka aksi protes mahasiswa dan masyarakat dalam wujud demonstrasi terjadi dimana-mana baik di Jawa mapun di luar Jawa. Demonstrasi ini menuntut beberapa hal sebagai berikut.

a. Turunnya pemerintahan Soeharto.
b. Dibubarkannya Partai Golkar.
c. Dislenggarakannya pemilu.

d. Reformasi total, dan

e. Turunkan harga BBM.

Sebagai kekuatan moral dari gerakan reformasi adalah kalangan mahasiswa. Namun dalam aksinya secara spontan bersama masyarakat, didukung pula oleh kalangan intelektual. Tampil dibarisan paling depan misalnya *Prof. Dr.HM.Amien Rais* sebagai pemimpin gerakan reformasi, disamping golongan-golongan lain yang juga menentang kepemimpinan Soeharto. Gerakan reformasi ini ternyata harus dibayar mahal oleh putera-putera bangsa. Dalam *Peristiwa Semanggi,* dimana terjadi bentrokan antara aparat keamanan dengan mahasiswa, gugurlah empat mahasiswa Universitas Tri Sakti pada tanggal 12 Mei 1998. Peristiwa tragis ini disusul dengan *"Peristiwa Gejayan Kelabu"* di Yogyakarta yang juga menagkibatkan gugurnya seorang mahasiswa Universitas Sanata Dharma asal Kalimantan bernama *Mosas Gatotkaca.* Namanya sekarang diabadikan dalam nama jalan di kota tersebut.

Gugurnya mahasiswa dalam memperjuangkan reformasi, tidak menyurutkan mahasiswa dan masyarakat untuk terus melanjutkan aksi demonstrasi menuntut perubahan. Gelombang demonstrasi semakin melaus baik di Jawa maupun Luar Jawa, huru-hara dimana-mana, aksi boikot, pembakaran gedung-gedung, dan kerusuhan lain terus berlanjut. Terget pertama dari para demonstran adalah turunnya presiden Soeharto.

3. Pengunduran diri Presiden Soeharto

Sejak awal bulan Mei 1998, suasana republik tidak terkendali. Ribuan mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi berusaha menduduki gedung DPR/MPR dan berusaha menyegelnya. Mereka menuntut agar Presiden Soeharto segera mundur dari jabatannya. Menanggapi tuntutan tersebut, pada tanggal 18 Mei 1998 Presiden Soeharto bermaksud untuk membentuk *Komite Reformasi* dan merombak *Kabinet Pembangunan VII* menjadi *Kabinet Reformasi.* Presiden memanggil beberapa tokoh untuk membicarakan pembentuka Komite Reformasi.. Namun Komite Reformasi tidak terbentuk karena ditolak oleh tokoh-tokoh masyarakat yang kemudian tergabung dalam aliansi atau *Dewan Reformasi.* Mereka menagjukan *Petisi Lima Puluh* yang berisi *50 tuntutan Reformasi.*

Karena situasi yang sudah serba sulit, akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengembalikan mandat kepada MPR dan menyatakan diri berhenti dari jabatan presiden. MPR kemudian menetapkan *B.J. Habibie* sebagai presiden RI menggantikan Soeharto. Presiden Habibie kemudian dilantik di *Istana Merdeka* pada tanggal itu juga dibawah

sumpah jabatan. Pengunduran diri Presiden Soeharto dari jabatannya ini menandai berakhirnya pemerintahan Orde Baru yang berkuasa sesama hampir 32 tahun. Pemerintahan kemudian digantikan oleh B.J. Habibie yang memerintah tanpa wakil dan membentuk kabinet yang diberi nama *Kabinet Reformasi Pembangunan* yang salah satu programnya adalah menyelenggarakan pemilu tahun 1999.

E. Timor Timur Dalam Sejarah Indonesia

1. Integrasi Timor Timur 17 Juli 1976

Wilayah Indonesia berdasarkan amanat dan semangat proklamasi adalah seluruh bekas jajahan Hindia Belanda. Sampai tahun 1976, Indonesia memiliki 26 propinsi. Namun sejak 17 Juli 1976 dengan integrasinya *Timor Timur,* maka wilayah RI menjadi 27 Propinsi. Sebelumnya wilayah Timor Timur adalah jajahan *Portugal,* namun dalam proses dekolonisasi wilayah Timor Timur memilih bergabung dengan RI.

Integrasi Timor Timur bermula ketika rezim *Salazar* jatuh dan digantikan Spinola sebagai presiden pada tanggal 17 April 1874. Spinola adalah seorang yang demokratis yang memperbolehkan berdirinya partai-partai politik baik di negeri induk maupun di wilayah seberang.

Atas kebijakan politik baru di Portugal, maka di Timor Timur muncul Tiga Partai Politik yakni :

a. UDT (Uniao Democratica Timorense)
b. Fretilin (Frente Revolutionare de Timor Leste Indepedente)
c. Podeti (Assiciacao Populer Democratica Timorense)

Muncul kemudian partai politik kecil dengan namaTabralista dan Partai Kota yang sehaluan dengan Apodeti (Moedjanto, 1993:164).

Partai-partai politik tersebut memiliki gagasan dan kepentingan yang berbeda berkaitan dengan status Timor Timur. *UDT* menginginkan bergabung dengan **Portugal***,* *Fretilin* menghendaki **kemerdekaan**, sedangkan *Apodeti* memilih bergabung dengan **Indonesia.** Dalam perkembangannya, Fretilin berubah menjadi partai yang berhalauan komunis. Pada mulanya, Fretilin dan UDT bersatu namun karena Fretilin berganti haluan komunis maka UDT pecah dengan Fretilin dan UDT berubah mnejadi *MAC (Movimento Anti Comunista),* dan kemudian bergabung dengan *Aliansi Aopdeti.*

Sebagai pimpinan Apodeti adalah *Arnoldo dos Rais Araujo* yang mengatakan bahwa bergabungnya Timor Timur dengan Indonesia adalah jalan terbaik mengingat Timor Timur dan Indonesia memiliki kesamaan baik secara historis, etnis, maupun geografis. Aliansi Apodeti meyakinkan juga bahwa bergabung dengan RI akan menciptakan stabilitas situasi di wilayah Timor Timur.

Ketika presiden *Spinola* hendak melakukan *dekolonisasi* atas wilayah Timor Timur, maka Portugal mengikutsertakan Indonesia sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Timor Timur. Hal ini dibuktikan dalam **Pertemuan London** antara *Indoensia* dengan *Portugal* pada tanggal 9 Maret 1975. Kemudian dalam pertemuan kedua di *Macao* Portugal juga mengundang seluruh partai politik di Timor Timur. Namun karena aksi boikot Fretilin, maka pertemuan tidak membuahkan hasil.

Fretilin kemudian menempuh jalan kekerasan untuk mecapai tujuannya, terlebih ketika **Lemos Pires** terpilih sebagai *Gubernur Timor Timur* yang mendukung gerakan Fretilin. Keadaan demikian memaksa Portugal dan RI untuk mengadakan pertemuan. Akhirnya pada tanggal 5 November 1975 diadakanlah pertemuan di *Roma* yang menghasilkan keputusan ***Memorandum of Understanding*** yang berisi pengakuan hak semua partai atas Timor Timur.

Setelah Pertemuan Roma, Fretilin dengan sokongan Lemos Pires tetap melakukan gerakan-gerakan sepihak. Akhirnya tindakan ini memancing kemarahan Aliansi Apodeti untuk melakukan perlawanan. Dengan bantuan sukarelawan asal Indonesia, maka Aliansi Apodeti berhasil mencerai beraikan kekuatan Fretilin. Bahkan Gubernur Lemos Pires melarikan diri.

Pada tanggal 28 November 1975, Fretilin secara sepihak memproklamirkan berdirinya *Republik Demokrasi Timor Timur* di kota *Dilli*. Diangkat sebagai presidennya adalah *Xavier Do Amaral*. Namun berselang 2 hari setelah Fretilin memproklamirkan diri, maka Aliansi Apodeti juga memproklamirkan bergabungnya Timor Timur dengan Indonesia di *Balibo*.

Tindak lanjut dari proklamasi oleh Aliansi Apodeti adalah dengan menegakkan kekuasaan di seluruh Timor Timur. Akhirnya pada pertengahan Desember 1975 hampir seluruh Timor Timur dapat dikuasai termasuk ibu kota Dilli. Aliansi Apodeti kemudian membentuk *PSTT (Pemerintahan Sementara Timor Timur) dengan pusat pemerintahan di Dilli*. Terpilih sebagai ketua dan wakil ketua yaitu *Arnaldo dos Reis Araujo* dan *Francisco Xavier Lopez da Cruz*. Untuk menambah kelengkapan pemerintahan, Aliansi Apodeti juga membentuk DPR Timor Timur yang dipimpin oleh *Guilherme Maria Goncalves* dan beranggotakan 30 orang.

Pada tanggal 30 Mei 1976, DPR Timor Timur yang didukung oleh seluruh anggota Aliansi Apodeti mengadakan Sidang MPR dengan agenda tunggal yaitu membahas Integrasi Timor Timur dengan Indonesia. Sidang kemudian memutuskan hal-hal sebagai berikut.

a. Menyampaikan usulan integrasi kepada pemerintah RI di Jakarta.
b. Membentuk komisi khusus untuk membuat rumusan integrasi.
c. Menentukan delegasi yang ditunjuk oleh pimpinan sidang.

Pada tanggal 7 Juni 1976, delegasi usulan integrasi menyampaikan kepada pemerintah RI di Jakarta, dan diterima baik oleh Presiden Soeharto. RI kemudian mengirimkan delegasi ke Timor Timur untuk mengetahui keadaan yang sesungguhnya di Timor Timur. Delegasi RI berjumlah 36 orang yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri *Amir Machmud* (Moedjanto, 1993:166).

Pada tanggal 29 Juni 1976, pemerintah RI menerima usulan integrasi yang diajukan oleh Aliansi Apodeti setelah menyimak dan mempertimbangkan laporan delegasi Indonesia. Sebagai tindak lanjut pemerintah kemudian membentuk *RUU Integrasi* yang kemudian diterima oleh DPR pada tanggal 17 Juli 1976, dan disahkan sebagai UU No. 7 Tahun 1976 tentang *Integrasi Timor Timur*. Maka pada *tanggal 17 Juli 1976* itulah Timor Timur secara resmi bergabung dengan RI sebagai *propinsi RI ke 27*. Dalam sidang umum MPR 1978, intergasi Timor Timur ditetapkan dalam ketetapan MPR No. VI/MPR/1978. Dengan demikian, maka secara perundang-undangan RI masuknya Timor Timur dalam wilayah RI adalah suatu yang sah.

2. Pemisahan Diri Timor Timur

Pemisahan diri *Timor Timur* atau *Timor Leste* dari RI, adalah kemenangan Fretilin yang selama ini bergerliya dihutan dan menyusun kekuatan untuk memisahkan dari RI. Meskipun sebenarnya kita patut bersyukur atas lepasnya Timor Timur dari wilayah Ri, selama ini Timor Timur telah banyak menyedot anggaran RI untuk pembangunan wilayah ini. Banyak militer Indonesia yang gugur di Timor Timur yang menunjukkan bahwa perjuangan kelompok yang menghendaki negara sendiri tidak mengenal lelah. Sekarang kita tidak perlu mencurahkan segala dana dan perhatian kepada Timor Timur.

Lepasnya Timor Timur dari wilayah RI, disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut, yakni upaya Portugal lewat Forum Internasional untuk membantu gerakan pemisahan diri dan situasi politik pemerintah RI yang tidak menguntungkan. Portugal lewat forum internasional berhasil membentuk opini internasional bahwa Indonesia melakukan invasi atas

Timor Timur. Dengan dukungan PBB akhirnya pejuang yang anti integrasi mendapat angin segar untuk memutuskan jalannya dalam memisahkan diri.

Pada masa pemerintahan Habibie, dimana pemerintah dituntut untuk mendukung perjuangan reformasi dan dalam rangka menegakkan HAM, maka menanggapi tuntutan referendum yang dilakukan oleh rakyat Timor Timur, maka pemerintah memberikan dua pilihan apakah otonomi khusus atau memisahkan diri dengan RI. Sebelumnya *Presiden Habibie* yakin bahwa Timor Timur akan memilih opsi pertama yakni tetap bergabung dengan RI dan dengan status *Otonomi Khusus.*

Pada awal tahun 1999, diadakan pembicaraan antara *Indonesia, Portugal,* dan *PBB.* Pembicaraan menghasilkan kesepakatan bahwa perlu diselenggarakan *Jejak Pendapat* untuk menuntaskan kasus Timor Timur. Dewan Keamanan PBB kemudian membentuk misi Perdamaian untuk Timor Timur yang diberi nama *UNAMET.*

Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan bersama, maka pada tanggal 30 Agustus 1999 diselenggarakanlah *Jejak Pendapat* untuk menyelesaikan masalah Timor Timur. Ternyata perhitungan *Presiden Habibie* meleset karena rakyat Timor Timur yang memilih untuk tetap bergabung dengan RI sebanyak 21,5%. Sedangkan sebanyak 78,5% memilih untuk memisahkan diri. Meskipun dalam hal ini masih terdapat keraguan bahwa apakah pilihan itu benar-benar atas keinginan hati nurani, atau karena tekanan-tekanan internasional. Dengan hasil yang demikian, MPR RI kemudian mengeluarkan ketetapan pada *tanggal 19 Oktober 1999 yang melegetimasi hasil Jejak Pendapat bahwa Timor Timur secara resmi berpisah dengan RI.*

BAB VI
KERJA SAMA REGIONAL DAN INTERNASIONAL

A. Konferensi Asia Afrika

Pada masa Kabinet Ali Sastroamijojo I 1953-1955, pemerintahan tidak berkiblat ke Barat, melainkan lebih mendekatkan diri kepada negara Asia-Afrika dan negara-negara Blok Sosialis. Kabinet Ali merancang upaya diplomatis yang diwujudkan dengan menggalang solidaritas negara-negara Asia-Afrika yang bertujuan untuk menghapus kolonialisme dan dalam rangka untuk meredakan ketegangan dunia sebagai dampak dari ancaman perang nuklir antara kekuatan Barat Amerika dengan kekuatan Timur Uni Sovyet.

Dalam rangka membendung ancaman Perang Dunia, Indonesia dalam perkembangan selanjutnya berhasil menyelenggarakan *Konferensi Asia Afrika (KAA)* di Bandung pada bulan April 1955. Bagi bangsa-bangsa Asia-Afrika, KAA merupakan titik kulminasi bagi solidaritas perjuangan untuk menghapuskan segala bentuk kolonialisme. KAA suatu kerja sama negara-negara yang senasib sepenangungan berupa saling mendukung terhadap perjuangan untuk merebut kemerdekaan. Tentunya KAA bagi Indonesia telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi dukungan internasional dalam pembebasan masalah Irian Barat. Secara terperinci akan dijelaskan rentetan-rentetan peristiwa yang mengawali dan menyudahi diselenggarakannya KAA.

1. Titik Tolak Konferensi Afrika

Setelah Perang Dunia II berakhir, maka muncullah dua negara adikuasa yang saling berseberangan yakni Amerika Serikat (AS) dan Uni Sovyet (US). Betapa tidak, AS berhaluan liberalis, sedangkan US berhaluan sosialis komunis. Hal ini dalam berbagai kebijakan baik dalam negeri maupun luar negeri selalu berseberangan karena dasar teori kenegaraannya yang berbeda. Kedua kekuatan ini memiliki sistem dan bentuk pemerintahan yang berbeda. Kedua negara adkuasa tersebut berlomba-lomba dalam mengembangkan sayapnya untuk meraih dukungan internasional. Karena kekhawatiran akan dominasi kekuatan lain, maka kedua negara tersebut berlomba dalam membuat persenjataan nuklir. Keadaan demikian kita kenal sebagai *Perang Dingin* antara *Blok Barat* dengan *Blok Timur,* yang menimbulkan kekhawatiran dunia akan terjadinya *Perang Dunia III.*

Dihadapkan pada dua kekuatan negara adikuasa tersebut, Indonesia memilih untuk berskap netral sesuai dengan politik luar negerinya yang *Bebas Aktif.* Sikap politik Indonesia tersebut didasarkan pada cita-cita proklamasi yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yang salah satunya adalah ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia. Konsep istilah aktif dimaksudkan bahwa Indonesia mendukung tujuan PBB dalam memelihara perdamaan dunia serta menyelesaikan masalah-masalah pertentangan, dengan tidak berpihak pada salah satu pihak.

Solidaritas bangsa-bangsa Asia-Afrika mulai sadar bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Ketika Perang Dunia II berakhir, negara-negara Asia-Afrika masih banyak yang belum memperoleh kemerdekaan secara penuh, seperti *Kongo, Aljajair, Afrika Selatan, Angola* dan *Mojambik* dan negara-negara Afrika lainnya. Sedangkan di Asia adalah India, Malaysia,

Singapura, dan bahkan Indnesia yang meskipun sudah merdeka pada tahun 1945, namun keberadaan Belanda di Indonesia adalah ancaman serius bagi kelangsungan pemerintahan RI.

Latar belakang sejarah yang sama inilah yang menimbulkan solidaritas AA untuk kemudian menyelenggarakan *Konferensi Asia Afrika.* Adapun beberapa landasan dilaksanakannya KAA ini dapat dilihat dari beberapa pikiran pokok sebagai berikut.

a. Kondisi geografis yang identik di mana kedua benua tersebut berbatasan satu sama lain.
b. Adanya perasaan senasib sepenanggungan sebagai negara-negara yang terjajah.
c. Untuk mengusir penjajahan diperlukan solidaritas bersama negara-negara AA.
d. Perlunya jalinan kerja sama yang baik negara-negara dunia ketiga yang tidak memihak Blok Barat dan Blok Timur, sehinga eksistensinya diakui oleh dunia internasional.

Sebenarnya sebelum Perang Dunia II, solidaritas bangsa-bangsa AA sudah mulai nampak. Hal ini dibuktikan ketika pada tanggal 15 Januari 1927 dalam *Kongres Liga Internasional Anti Penindasan dan Penjajaan* yang diselenggarakan di **Brussel Belgia,** yang mempertemukan para pemimpin AA, banyak mahasiswa Indonesia yang sedang studi di Barat ikut menghadiri kongres tersebut. Ini menunjukkan bahwa Indonesia sudah memiliki peran yang cukup berarti bagi perjuangan awal negara-negara AA.

Dalam perkembangannya, solidaritas bangsa-bangsa AA terus digalakan melalui forum-forum diskusi dan konferensi. Di Timur Tengah misalnya, terbentuk apa yang disebut *Pan-Arabisme* yang bertujuan untuk mengalang kekuatan negara-negara Timur Tengah. Kemudian di *New Dehli* atas prakarsa *Perdana Menteri India Sri Pandit Jawaharal Nehru* diselengarakan *Konferensi Antar Asia,* di mana wakil Indonesia *Agus Salim* juga ikut serta di dalamnya. Konferensi-konferensi itu pada dasarnya adalah menggalang solidaritas Asia-Afrika untuk mengusir penjajahan yang cenderung bertahan di wlayah Asia Afrika.

2. Colombo Plan

Sebelum diselenggarakan KAA di Bandung, maka didahului oleh adanya Konferensi Kolombo sebagai konferensi persiapan. Konferensi ini diselenggarakan di Kolombo, Sri Lanka pada tanggal 28 April sampai dengan 2 Mei 1954, yang mengahsilkan apa yang dsebut *Colombo Plan* atau *Rencana Kolombo.* Konferensi ini dihadiri oleh ima pimipinan pemerintahan yakni sebagai berikut.

Tabel 6.1. Peserta Konferensi kolombo

Indonesia	PM. Alisastro Amidjojo
Birma	PM. U Nu
India	PM. Sri Pandit Jawaharlal Nehru
Pakistan	PM. Mohamad Ali Jinah
Sri Lanka	PM. Sir John Kotelawala

Dalam Colombo Plan sebagai hasil dari Konferensi Kolombo salah satunya disepakati bahwa perlunya diselenggarakan KAA. Perdana Menteri juga sepakat bahwa KAA akan diselenggarakan di Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari Konferensi Kolombo, kemudian lima perdana menteri tesebut mengadakan pertemuan di Bogor dari tanggal 28 Desember sampai dengan 31 Desember 1954. Konferensi ini kemudian dikenal dengan *Konferensi Bogor*.

3. Konferensi Bogor

Seperti halnya dalam Konferensi Kolombo, maka dalam Konferensi Bogor juga dihadiri lima pimpinan pemerintahan negara yang sama. oleh akrena itu, Konferensi Bogor kemudian lebih dikenal dengan *Konferensi Panca Negara*. Konferensi Panca Negara ini merekomendasikan hal-hal sebagai berikut.

a. KAA diselenggarakan di Bandung dalam bulan April 1955.
b. Lima negara peserta konferensi pancanegara ditetapkan sebagai negara-negara sponsor.
c. KAA akan mengundang 25 negara Asia Afrika.
d. Menetapkan tujuan pokok KAA yang salah satunya adalah memajukan kerja sama antar bangsa-bangsa Asia Afrika dalam memajukan kepentingan bersama, serta memperokokoh hubungan persahabatan.

4. Pelaksanaan Konferensi Asia Afrika (KAA)

Setelah Konferensi Pnacanegara, maka dari tanggal 18-25 April 1955 diselenggarakanlah KAA di Bandung yang dihadiri oleh wakil dari *29 negara* termasuk 5 negara penggagas. Ke-29 negara tersebut adalah *: Indonesia, Burma, India, Pakistan, Sri Lanka, Vietnam Utara, Vietnam Selatan, Thailand, Filipina, Laos, Kamboja, Republik Rakyat Cina, Jepang, Yaman, Turki, Libanon, Yordania, Irak, Iran, Mesir, Afghanistan, Ethiopia, Ghana, Liberia, Libia, Nepal, Sudan, Siria, dan Saudi Arabia.*

KAA dibuka oleh Presiden Soekarno dengan memberikan pidato yang mengingatkan bahwa kolonialisnme belum mati. Adapun yang dihasilkan oleh KAA ini adalah memuat sepuluh prinsipnya yang dikenal dengan *Dasa Sila Bandung.* Adapun kesepuluh prinsip tersebut adalah sebagai berikut.

a. Menghormati hak-hak dasar manusia, tujuan-tujuan, serta asas-asas yang termuat dalam piagam PBB.
b. Menghormati kedaulatan dan integritas terotorial semua bangsa.
c. Mengakui persamaan semua ras dan bangsa, baik besar maupun kecil.
d. Tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam urusan negara lain.
e. Menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri, baik secara sendirian maupun kolektif sesuai dengan Piagam PBB.
f. Tidak menggunakan peraturan-peraturan pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus salah satu negara besar serta tidak melakukan tekanan terhadap negara lain.
g. Tidak melakukan tindakan-tindakan atau ancaman agresi ataupun penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara.
h. Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai, seperti perundingan, persetujuan, arbitrasi atau pneylesaian hukum atau cara damai lainnya, menurut pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan Piagam PBB.
i. Memajukan kepentingan bersama dan kerja sama.
j. Menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional.

KAA yang sebelumnya disangsikan oleh negara-negara kolonial Barat, ternyata telah berlangsung dengan baik dan menghasilkan suatu kesepakatan yang luhur. Konferensi ini juga merupakan pendorong bagi lahirnya *Gerakan Non Blok* sebagai respon terhadap munculnya dua negara adidaya. Bagi dunia internasonal, KAA memberi pengaruh yang relatif besar bagi perubahan hubungan tata dunia. Adapun pengaruh tersebut adalah sebagai berikut.

a. Meningkatnya solidaritas bangsa-bangsa Asia-Afrika.
b. Mendukung perjuangan bagsa-bangsa Asia-Afrika yang belum merdeka.
c. Negara Asia-Afrika dalam sidang umum PBB mendukung perjuangan Indonesia dalam membebaskan Irian Barat.
d. Mengurangi ketegangan Blok Barat dan Blok Timur.
e. Mengurangi adanya faham rasialitas dibeberapa negara.

B. Kebijakan Politik Luar Ngeri

Dalam menjalin hubungan internasional, Indonesia menerapkan politik *Bebas Aktif*. Bebas artinya terlepas dari pengaruh kekuatan manapun sehingga dalam menentukan arah kebijakannya berdasarkan pada kemampuan diri sendiri. Sedangkan aktif berarti ikut berperan aktif dalam mengupayakan kerjasama dan perdamaian dunia dengan tidak memihak salah satu pihak. Gagasan politik bebas aktif ini adalah hasil pemikiran Bung Hatta yang dituangkan dalam bukunya yang berjudul *"Mendayung di Antara Dua Karang"*. Maksudnya adalah bahwa Indonesia tidak berpihak kepada Barat maupun Timur. Sedangkan tujuan dari politik bebas aktif ini adalah demi kepentingan nasional dalam rangka meneruskan perjuangan anti kolonialisme dan imperialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya. Namun dalam perkembangannya politik bebas aktif tidak selalu berjalan mulus, melainkan banyak kebijakan-kebijakan RI yang menyimpang dari konsepsi itu.

Politik luar negeri Indonesia pertama kali dikemukakan oleh Hatta di depan *Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)* pada tanggal 2 September 1948, dan dalam pidatonya yang berjudul "*Mendayung di antara Dua Karang"*. Menurut Mochtar Kusumaatmaja, Bung Hatta-lah salah satu peletak dasar politik luar negeri Indonesia. Pernyataan Bung Hatta yang cukup menggelitik adalah *mestikah kita bangsa yang berjuang untuk kemerdekaan harus memilih pro Rusia atau Amerika? Sebagai bangsa independen, tidakkah ada pendirian yang mesti kita ambil dalam mengejar cita-cita?* Hatta kemudian menjawabnya, bahwa pendirian yang harus kita ambil adalah supaya bangsa Indonesia tidak menjadi ajang pertarungan politik internasional, melainkan kita harus tetap menjadi subyek yang menentukan nasib dan pandangan sendiri. Pernyataan ini merupakan dasar fundamental politik luar negeri Indonesia.

Dasar perjuangan yang telah menjadi semboyan yaitu *percaya akan diri sendiri dan berjuang atas kesanggupan sendiri*. Tetapi bukan berarti menutup diri. Bangsa Indonesia harus mengambil posisi menguntungkan atas dunia dalam mencapai tujuan bangsa. Walau tidak menyebut secara lugas politik bebas aktif, tetapi keterangan Bung Hatta tanggal 2 September 1948 yang berjudul "Mendayung Di antara Dua Karang" secara tegas mengemukakan peran politik luar negeri bebas aktif Indonesia.

Secara sistematis Hatta memberikan pokok-pokok tujuan politik luar negeri Indonesia sebagai berikut.

1. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara.

2. Memperoleh dari luar negeri barang-barang yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat, apabila barang-barang itu belum dihasilkan sendiri.
3. Perdamaian internasional, karena hanya damai Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat.
4. Persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan dari cita-cita yang tersimpul dalam Pancasila menjadi dasar filsafat negara kita.

Lebih lanjut Hatta menambahkan, bahwa bangsa Indonesia harus secara jitu menempatkan diri sebagai bangsa yang baru merdeka di tengah-tengah bangsa-bangsa di Dunia. Indonesia harus berpartisipasi aktif dalam upaya mewujudkan kemerdekaan dan perdamaian dunia. Bangsa Indonesia tidak perlu memasukkan dirinya dalam salah satu blok, tetapi bukan berarti menentang suatu blok. Bangsa Indonesia harus aktif mendukung atau memihak dalam masalah-masalah tertentu dengan tidak mengorbankan kepentingan dan kemerdekaan jangka panjang. Hal ini dapat diamati dari rentetan-rentetan peristiwa sebagai berikut.

1. Politik Luar Negeri Mercusuar

Politik mercusuar adalah politik luar negeri yang radikal dalam menyelesaikan masalah revolusi. Manifesto Politik RI yang ditetapkan presiden Soekarno dengan penetapan Presiden No.1 Tahun 1960, yang kemudian ditetapkan oleh MPRS sebagai GBHN, telah menyeret Indonesia dalam diplomasi internasional, tanpa memperhatikan prioritas kepentingan dan sumber-sumber kekuatan nasional. Manifesto politik memiliki program jangka pendek dan jangak panjang. Program *jangka pendek* adalah melanjutkan perjuangan anti imperialisme, ditambah dengna pertahanan kepribadian Indonesia di mata internasional. Sedangkan *jangka panjang* Manifol adalah menyangkut politik luar negeri dimana revolusi Indonesia bertujuan untuk *"melenyapkan imperialisme dimana-mana, dan mencapai dasar-dasar bagi perdamaian dunia yang kekal dan abad"*. Dalam hal berdiplomasi menurut Manipol harus tidak mengenal kompromi, harus radikal dan revolusioner.

Dengan Manifol, Indonesia bermaksud untuk menghimpun kawan-kawan yang hendak dikonfrontasikan terhadap *"musuh revolusi"*. Adapun yang menjadi penghalang revolusi harus disingkirkan. Dalam perkembangannya Indonesia cenderung condong ke Blok timur dengan menjalin hubungan yang erat dengan negara-negara komunis. Manifol dengan politik

Mercusuar juga telah menguras keuangan RI karena untuk tujuan kehormatan RI, pemerntah telah membangun dan mengadakan proyek-proyek raksasa yang tidak produktif.

Penyelewengan terhadap politik bebas aktif semakin kentara tatkala Indonesia melarutkan diri dalam politik poros. Pembentukan *Poros Jakarta, Pnom Penh, hanoi, Peking, Pyong Yang* sebagai poros anti imperialis dan kolonialis menandai bahwa Indonesia telah berpihak pada salah satu blok tidak sesuai dengan prnsip-prinsip politik bebas aktif.

2. Konfrontasi Terhadap Malaysia

Politik pemerintahan Soekarno yang memutuskan konfrontasi dengan Malaysia adalah salah satu bentuk penyelewengan politik bebas aktif. Tindakannya dilandasi oleh doktrin manipol yang menggariskan untuk melaukan konfrontasi terhadap musuh revolusi karena negara itu dianggap sebagai suatu proyek *"neokolonialisme Inggris"* yang membahayakan revolusi Indonesia. Ketegangan semakin meningkat ketika ada rencana pembetukan **Federasi Malaysia,** dimana negara dimana negara tersebut merupakan persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Srawak pada tahun 1961. Federasi Malaysia dianggap membahayakan keutuhan RI, terutama menyangkut wilayah-wilyaha yang berbatasan dengan Malaysia dan Singapura akan terjadi ketegangan-ketegangan, terlebih jika Inggris berambisi untuk meluaskan jajahannya. Tindakan Presiden Soekarno ini dapat difahami mengingat sampai sekarang pun Indonesia-Malaysia masih menyisakan permasalahan teritorial laut berkait setelah lepasnya *Pulau Sipadan dan Ligitan yang jatuh ke tangan Malaysa.* Berikut adalah rentetan-rentetan peristiwa yang mewarnai konfrontasi Indonesia Malaysia.

a. Upaya Diplomasi

Dalam situasi yang semakin memanas, maka dalam rangka meredakan ketegangan itu, *Filipina* mengambil inisiatif untuk membawa Indonesia dan Malaysia ke meja perundingan. Usulan Filipina itu diterima oleh kedua belah pihak yang sedang berseteru, sehingga kemudian diselenggarakan **Konferensi Tingkat Menteri** yang diselenggarakan di *Manila* dari tanggal 9-17 April 1963.

Konferensi Manila tersebut mendiskusikan masalah rencana pembentukan Federasi Malysia, gagasan rencana pembentukan konfederasi Indonesia, Malaysia, Filipina, dan mempermudah Konferensi Tingkat Menteri Luar Negeri yang akan dilaksanakan pada bulan Juni 1963. Akhirnya setelah melalui beberapa pertemuan tidak resmi ketiga negara, maka pada

tanggal 7 sampai 11 Juni 1963 diselenggarakanlah *Konferensi Menteri-Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia, dan Filipina.*

Konferensi berhasil mencetuskan keputusan bersama dan persetujuan penuh tentang bagaimana memecahkan permasalahan bersama yang timbul sebagai dampak dari rencana pembentukan Federasi Malaysia. Ketiga negara tersebut beritikad baik untuk menyelesaikan secara damai mengenai sumber sengketa seputar negara pembentukan Federasi Malaysia.

b. Pembentukan Federasi Malaysia

Meskipun telah diselenggarakan *Konferensi Manila*, namun pembentukan Federasi Malaysia secara sepihak tetap dilaksanakan. *Tengku Abdul Rahman, Perdana menteri Malaysia* tanpa persetujuan Indonesia dan Filipina telah menandatangani dokumen pembentukan Federasi Malaysia pada 9 Juli 1963 di London. Adapun rencana pembentukan Federasi Malaysia itu dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 1963. Dengan tindakan Perdana Menteri Malaysia tersebut, pemerintah RI merasa tersinggung dan dilecehkan dengan *pengertian bersama* sebagaimana tertuang dalam konferensi manila.

Meskipun RI telah dikecewakan oleh Malaysia, namun untuk menunjukkan itikad baik RI, maka Indonesia tetap menghadiri apa yang disebut *Musyawarah Mafhilindo (Malaysia, Filipina, Indonesia),* dalam rangka menyelesaikan permasalahan bersama pada tanggal 31 September sampai dengan 5 Agustus 1953. Musyawarah tersebut menghasilkan tiga dokumen yakni *Deklarasi Manila, Persetujuan Manila, dan Komunike Bersama (Notosusanto, 1990:136).*

Dalam hal pembentukan Federasi Mlaysia, musyawarah menyepakati agar melibatkan PBB. Peran PBB sangat dibutuhkan dalam rangka mempelajari keinginan wilayah-wilayah yang akan dimasukkan dalam Federasi. Menanggapi permohonan itu, Sekjen PBB kemudian menunjuk delapan anggota sekretariat untuk menjadi anggota dalam misi PBB tentang masalah Malaysia dibwah pimpinan *Lawrence Michelmore.* Namun sebelum misi PBB menyampaikan laporan peninjauannya, Federasi Malaysia sudah diproklamasikan pada tanggal 16 Sepetember 1963. Tindakan sepihak ini oleh pemerintah RI dianggap sebagai pelanggaran terhadap martabat PBB dan juga pelanggaran atas pernyataan bersama Manila. Peristiwa itulah yang menyebabkan konfrontasi Indonesia-Malaysia tidak dapat dihindarkan.

c. Konfrontasi dan Demonstrasi

Sehari setelah diproklomasikannya Federasi Malaysia, hubungan Indonesia-Malaysia mnejadi tegang. Rakyat Indonesia melakukan aksi demonstrasi menentang Federasi Malaysia. Namun kemudian dibalas oleh aksi demonstrasi yang ditujukan kepada Kedutaan Besar RI di Kualalumpur. Pada hari itu juga hubungan diplomatik RI-Malaysia putus. Kemudian pada tanggal 21 September 1963 RI memutuskan kerjasama atau hubungan ekonomi dengan Malaysia, Singapura, Sabah dan Srawak.

Pada akhir tahun 1963, RI menyatakan dukungan terhadap perjuangan rakyat Kalimantan Utara dalam melawan *"neukolonialisme Inggris"*. Sebagai tindak lanjut, presiden memaklumatkan *Dwikora (Dwi Komando Rakyat)* tanggal 3 Mei 1964 yang isinya adalah :

1.) Tingkatkan ketahanan revolusi Indonesia, dan
2.) Bantu perjuangan revolusi rakyat Malaya, Singapura, Brunai, Sabah, dan Serawak untuk mendekatkan diri, serta gagalkan Federasi Malaysia.

Sebagai tindak lanjut dari *Dwikora* pemerintah RI kemudian mengirim sukarlawan-sukarelawan untuk menyokong perjuangan kemerdekaan Kalimantan Utara melawan tentara Inggris.

d. Indonesia Keluar dari PBB

Dalam pidato presiden tertanggal 7 Januari 1965, presiden Soekarno secara resmi menyatakan bahwa Indonesia keluar dari anggota PBB. Adapun penyebab dari tindakan ini adalah karena ketidak setuju pemerintah RI terhadap kebijakan PBB terkait dengan berdirinya Federasi Malysia yang mendahului sikap politik PBB. Namun demikian PBB tidak mengambil tindakan apapun terhadap Federasi Malaysia dan tidak pula memperhatikan usulan-usulan Indonesia. Ketidak setujuan Indonesia terhadap PBB semakin memuncak dengan diterimanya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Dengan keluarnya Indonesia dari PBB, maka RI kehilangan satu forum untuk melakukan diplomasi dalam menyelesaikan persengketaannya dengan Malaysia. Kenyataan menunjukkan bahwa akibat dari sikap politik yang konfrontatif, Indonesia telah mendapatkan lebih banyak lawan ketimbang kawan. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan hakikat Pembukaan UUD 1945, yang merupakan landasan politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Dengan demikian, ajaran manifol presiden Soekarno yang revolusioner telah membawa bukan hanya pada dinamika politik dalam negeri saja, melainkan juga terhdap kebijakan politik luar negeri yang serba sulit.

e. Normalisasi Hubungan dengan Malaysia

Dalam rangka penyelesaian masalah Asia termasuk konfrontasi Indonesia-Malaysia, maka *komunike* Indonesia yang tertuang dalam *Doktrin Soekarno-Macapagal* terus melakukan upaya-upaya diplomasi, namun berkahir dengan kegagalan. Hal ini diakibatkan oleh semakin buruknya situasi konfrontasi Indonesia-Malaysia atas penolakan Indonesia dengan masuknya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Menjelang diresmikannya *Kabinet Ampera* di bawah pimpinan *Perdana Menteri Soeharto,* upaya-upaya pemulihan kembali hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia mulai direncanakan. Pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1966, pemerintah Indonesia-Malaysia menyelenggarakan *Perundingan Bangkok*. Dalam perundingan Bangkok tersebut, delegasi Indonesia dipimpin oleh *Adam Malik,* Menteri Luar Negeri RI, sedangkan delegasi Malaysia dipimpin oleh Menteri Luar Negeri *Tun Abdul Razak*.

Perundingan Bangkok tersebut menghasilkan kesepakatan apa yang disebut *Bangkok Agreement atau persetujuan Bangkok*. Adapun pokok-pokok Persetujuan Bangkok tersebut adalah sebagai berikut :

1.) Rakyat Sabah dan Serawak diberi kesempatan untuk menegaskan kembali keputusan yang mereka ambil berkaitan dengan kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia.
2.) Pemerintah kedua belah pihak menyetujui adanya pemulihan hubungan diplomatik.
3.) Konfrontasi dihentikan.

Pada tanggal 11 Agustus 1966, pemulihan hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia berdasarkan Persetujuan Bangkok secara resmi disahkan di Jakarta. Peresmian ini dilaksanakan di *Gedung Pancasila,* dimana Indonesia diwakili oleh *Adam Malik*, sedangkan Malaysia *Tun Abdul Razak*. Sejak peresmian itu hubungan diplomatik mulai dibuka kembali dan diawali dengan pembukaan kembali kedutaan besar kedua negara.

Dalam waktu yang hampir bersamaan, Indonesia juga mengakui kedaulatan *Republik Singapura*. Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia sudah mulai meninggalkan politik konfrontasi sebagai garis politik dan manipol. Selanjutnya nota pengakuan kedaulatan RI atas Singapura tersebut disampaikan kepada Perdana menteri Singapura *Lee Kuan Yew*. Singapura kemudian menyambut baik kebijakan politik luar negeri RI tersebut, dan menyetujui didakannya hubungan diplomatik kedua negara.

f. Indonesia Kembali Menjadi Anggota PBB

Ketika PBB menjawab surat pengunduran diri Indonesia dari keanggotaan PBB pada tanggal 26 Januari 1965, maka Sekjen PBB *U. Thant* menyampaikan penyesalannya terhadap sikap politik Indonesia. Namun demikian PBB tetap mengharapkan agar Indonesia suatu saat masuk kembali menjadi anggota PBB. Dengan keputusan itu berarti telah memberi peluang kepada Indonesia suatu saat untuk kembali menjadi anggota PBB.

Ketika Orde Baru mulai berkiprah yang ditandai dengan lahirnya *Supersemar*, maka sangat dirasakan kebutuhan akan keterlibatan Indonesia dalam forum internasional lewat PBB. Ketika Indonesia masih menjadi anggota, maka banyak negara-negara yang tergabung dalam PBB ikut membantu permasalahan Indonesia dalam perjuangan diplomasi, begitu pula dalam hal pembangunan melalui badan-badan PBB. Namun setelah Indonesia keluar dari PBB, maka Indonesia dikucilkan dari percaturan internasional. Ruang gerak Indonesia semakin sempit, terutama ruang gerak diplomasinya di forum internasional. Haluan politiknya yang condong ke negara komunis telah menyimpang dari dasar-dasar politik luar negeri bebas aktif.

Dengan semakin terkucilnya Indonesia dari forum internasional, maka pemerintah transisi Orde Baru merasa perlu untuk kembali menjadi anggota PBB. Pemerintah mulai melakukan upaya pengembalian keanggotaan PBB setelah DPRGR melakukan sidang paripurna pada tanggal 3 Juni 1966. Sidang paripurna merekomendasikan bahwa sangat mendesak bagi Indonesia untuk kembali menajdi anggota PBB. Rekomendasi itu kemudian diajukan kepada pemerintah dan segera ditanggapi oleh pemerintah. Bertolak dari itu maka pada tanggal 28 Desember 1966 Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Adapun yang menjadi wakil Indonesia untuk PBB adalah *Adam Malik, M. Yusuf, Ruslan Abdul Gani, L.N Polar dan Rusmin Nuryadin.* Dengan demikian Indonesia kembali memiliki forum yang sangat besar artinya bagi perjuangan dan pembangunan Indonesia.

C. Kerja Sama ASEAN

Menjelang berakhirnya konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1966, para pemimpin bangsa di Asia Tenggara merasakan perlu adanya organisasi yang menaungi kerja sama regional. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat kedudukan dan kestabilan sosial ekonomi di wilayah Asia Tenggara. Dengan demikian maka pada tanggal 5-8 Agustus 1967 diselenggarakanlah pertemuan *Menteri Lima Negara* yang berlangsung di *Bangkok*. Adapun yang hadir dalam pertemuan Bangkok itu adalah sebagai berikut.

1. Adam Malik : Indonesia
2. Tun Abdul razak : Malaysia
3. Narciso Ramos : Filipina
4. Thanat Khoman : Thailand
5. S. Rajaratnam : Singapura.

Dalam pertemuan Bangkok ini dideklarasikan apa yang disebut *Bangkok Declaration* pada tanggal 8 Agustus 1967. *Bangkok Declaration* adalah bentuk persetujuan kelima negara untuk membentuk sebuah organisasi kerja sama regional yang dikenal dengan nama *ASEAN (Asocation Of South East Asian Nation).* Adapun tujuan pemebentukan ASEAN ini adalah untuk mempercepat pembangunan ekonomi, stabilitas sosial budaya, dan kesatuan regional melalui usaha dengan semangat tanggung jawab bersama dan persahabatan, yang akan menjamin bebasnya kemerdekaan negara-negara anggota. Secara terperinci tujuan dari pembentukan ASEAN ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan Asia Tenggara.
2. Meningkatkan stabilitas regional Asia Tenggara.
3. Meningakatkan kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, tekonologi, ilmu pengetahuan, dan administrasi.
4. Saling mendukung kebjakan dalam negeri masing-masing anggota, dan
5. Memelihara kerjasama regional.

Dalam perkembangannya, ASEAN banyak berkiprah dalam kancah politik. Pada tanggal 27 Nopember 1971, Lima Menteri Luar Negeri ASEAN mengadakan pertemuan di *Kualalumpur, Malaysia.* Pertemuan itu mengahsilkan apa yang disebut *Deklarasi Kualalumpur* yang merupakan pernyataan bersama mengenai Asia Tenggara sebagai *Zone of Peace, freedom and neutrality, bebas dari segala bentuk campur tangan pihak luar.*

Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan itu, ASEAN kemudian membentuk organisasi berikut.

1. Konferensi Tingkat Tinggi para kepala pemerintahan
2. *Ministerial meeting*, Sidang Tahunan Para Menteri Luar Negeri
3. *Standing Commitee* dan panitia-panitia Ad Hoc, dan
4. Sekretariat Nasional ASEAN

Dalam KTT ASEAN pertama di *Bali* pada tahun 1976, masalah Asia Tenggara sebagai daerah damai, bebas dan netral, telah berhasil dicantumkan dalam *"Deklarasi*

Kesepakatan ASEAN" dan diterima sebagai program kegiatan kerangka kerja sama ASEAN. KTT pertama juga berhasil membentuk Sekretariat Tetap ASEAN yang berkedudukan di Jakarta dan sebagai Sekjen ASEAN perrtama adalah *Letjen HR Dharsono* dari Indonesia. Ia dilantik menjadi Sekjen ASEAN pada tanggal 7 Juni 1976.

Pada mulanya keanggotaan ASEAN berjumlah 5 negara yang merupakan negara-negara pengaggas. Namun dalam perkembangannya telah menarik perhatian negara-negara Asia Tenggara lainnya untuk masuk dalam keanggotaan ASEAN ini. Adapun keanggotaan ASEAN ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6.2. Negara-Negara ASEAN

Negara	Tahun masuk menjadi anggota ASEAN
1. Indonesia	
2. Malaysia	1-5 merupakan
3. Filipina	negara penggas ASEAN 8 Agustus 1967
4. Thailand	
5. Singapura	
6. Brunai Darusalam	7 Januari 1984
7. Vietnam	28 Juli 1995
8. Laos	23 Juli 1997
9. Myanmar	23 Juli 1997
10. Kamboja	16 Desember 1998

D. Gerakan Non-Blok (GNB)

1. Titik Tolak

Gagasan non blok dilatarbelakangi oleh perseteruan dua negara Adikuasa Amerika Serikat sebagai Blok Barat dan Uni Sovyet Blok Timur. Negara-negara dunia ke-3 mersa khawatir akan terjadinya Perang Dunia III, karena masing-masing blok berusaha meningkatkan pertahanan dan nuklirnya. Kedua blok juga berupaya untuk melebarkan sayapnya dalam mencari dukungan negara-negara berkembang. Akhirnya pada tahun 1960 terbentuklah apa yang disebut Gerakan negara-negara Non Blok atau *Gerakan Gerakan Non Blok*. Adapun tokoh-tokoh yang menjadi penggagas Gerakan Non Blok tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 6.3. Tokoh dan Negara Penggagas Gerakan Non Blok

Tokoh	Negara
Presiden Soekarno	Indonesia
Presiden Gamal Abdul Naser	Mesir
Perdana Menteri Sri Pandit Jawaharlal Nehru	India
Presiden Josep Broz Tito	Yugoslavia
Presiden Kwame Nkrumah	Ghana

Gagasan Gerakan Non Blok sudah digulirkan ketika dilangsungkannya KAA di Bandung. Gagasan ini muncul sebagai tanggapan terhadap semakin memanasnya situasi perang dingin dan dalam upaya penggalangan solidaritas negara-negara Asia-Afrika dalam melawan kolonialisme. Akhirnya pada tahun 1961 diselenggarakanlah pertemuan dalam rangka mempersiapkan KTT I GNB di *Kairo*. Pertemuan itu menampilkan prinsip-prinsip dasar diselenggarakannya Gerakan Non Blok. Kelima prnsip dasar GNB tersebut adalah sebagai berikut.

a. Tidak memihak Blok Barat dan Timur
b. Anti kolonialisme
c. Tidak ikut serta dalam aliansi Pertahanan Militer
d. Tidak ikut serta dalam aliansi bilateral dengan negara adidaya
e. Menolak dibentuknya pangkalan militer negara adidaya di negara-negara non blok.

2. Peran Indonesia dalam GNB

Peranan Indonesia dalam GNB cukup besar baik sebagai perintis maupun sebagai anggota dan penyelenggara. Indonesia adalah salah satu negara perintis GNB ketika KAA dilangsungkan di Bandung. Kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif telah menjadi pembuka bagi Indonesia untuk masuk dalam GNB. Sebagaimana telah dituliskan sebelumnya, Indonesia juga berperan dalam persiapan penyelenggaraan KTT I GNB yang menghasilkan lima prinsip dasar GNB.

KTT GNB dilaksanakan secara rutin setiap tiga tahun sekali dengan tempat penyelenggaraan secara bergiliran di negara-negara yang tergabung dalam GNB. KTT pertama diselenggarakan di *Beograd Yugoslavia* pada tahun 1961, dan KTT XIII di *Kualalumpur Malaysia* tahun 2003. Keterlibatan Indonesia dalam GNB juga dibuktikan dengan diselenggrakannya

KTT X di *Jakarta* pada tahun 1992, dan terlibat aktif dalam setiap penyelenggaraan KTT. Adapun ke-13 KTT GNB ini dapat dirinci secara garis besar sebagai berikut.

a. KTT I di *Beogard, Yugoslavia* tanggal 1-6 September 1961 yang dihadiri oleh 25 negara NB. KTT ini menghasilkan upaya meredakan ketegangan dunia dan membantu perjuangan kemrdekaan negara-negara yang belum merdeka.
b. KTT II di *Kairo, Mesir* pada tanggal 5-10 September 1964 yang dihadiri oleh 47 negara. KTT ini menghasilkan perlunya kerja sama ekonomi dan hubungan internsional.
c. KTT III di *Lusaka, Jambia* pada tanggal 8-10 September 1970 yang dihadiri oleh 53 negara. KTT ini menghasilkan perlunya meningkatkan kemakmuran negara-negara berkembang.
d. KTT IV di *Algeris, Aljajair* tanggal 5-9 September 1973 yang dihadiri oleh 85 negara. KTT ini menghasilkan perlunya upaya meredakan krisis Timur Tengah dan masalah rasial diAfrika Selatan.
e. KTT V di *Kolombo, Sri Lanka* tanggal 16-19 September 1976 yang dihadiri oleh 94 negara. KTT ini menghasilkan perlunya kerja sama ekonomi dan hubungan internsional.
f. KTT VI di *Havana, Kuba* tanggal 3-9 September 1979 yang dihadiri oleh 94 negara. KTT merekomendasikan agar PBB berperan aktif dalam perkembangan ekonomi negara berkembang, dan perlunya saling membantu diantara negara-negara non blok dalam bidang ekonomi.
g. KTT VII di *New Delhi, India* tanggal 7-12 September 1983 yang dihadiri oleh 110 negara. KTT menghasilkan upaya mendukung perjuangan rakyat Palestina dan menentang negara-negara agresor.
h. KTT VIII di *Harare, Jimbabwe* tanggal 1-6 September 1986 yang dihadiri oleh 110 negara. KTT ini menghasilkan rekomendasi perdamaian Iran-Irak dan dihapuskannya politik Apartheid di Afrika Selatan.
i. KTT IX di *Beogard, Yogolavia* tanggal 4-7 September 1989 yang dihadiri oleh 102 negara. KTT ini menghasilkan perlunya dialog Utara-Selatan untuk mengingkatkan kerjasama dalam bidang sosial ekonomi.
j. KTT X di *Jakarta, Indonesia* tanggal 1-6 September 1992 yang dihadiri oleh 108 negara. KTT ini menghasilkan perlunya dialog Utara-Selatan dan Selatan-Selatan, serta perlunya rekonsiliasi sejumlah negara yang dilanda konflik.

k. KTT XI di *Cartagena, Kolombia* tanggal 16-22 September 1995 yang dihadiri oleh 113 negara. KTT ini menghasilkan rekomendasi perlunya demokratisasi dan rekonstruksi dalam tubuh PBB.

l. KTT XII di *Durban, Afrika Selatan* tanggal 1-6 September 1998 yang dihadiri oleh 113 negara. KTT ini menghasilkan perlunya demokratissi dalam hubungan internasional.

m. KTT XIII di *Kualalumpur, Malaysia* tanggal 20-25 September 2003 yang dihadiri oleh 114 negara. KTT ini menghasilkan perlunya revitalisasi GNB dan menempatkannya dalam berbagai isu dunia, termasuk isu Perang Teluk II.

E. PBB dan Peran Indonesia

PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) secara resmi didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 dengan markas besarnya berpusat di New York. Organisasi PBB muncul sebagai tuntutan perlunya perdamaian dunia untuk menciptakan stabilitas internasional di segala bidang. Hal ini sebagai response terhadap situasi dunia yang mengalami kegoncangan yang diakibatkan oleh berkecamuknya Perang Dunia II 1939-1945. Dalam kondisi demikian, muncullah bebrapa tokoh yang mengaggas perlunya organisasi internasional.

Dalam suatu pertemuan para tokoh di *Samudra Atlantik,* muncullah gagasan perlunya perdamaian dunia. Pertemuan itu menghasilkan apa yang disebut *Atlantic Charter atau Piagam Atlantik* sebagai hasil pembicaraan antara *Presiden Amerika Serikat FD. Roosvelt dengan Perdana Menteri Inggris Winston Churcil.* Pertemuan itu ditindaklanjuti dengan diselenggarakannya *Konferensi Washington* yang dihadiri oleh *Amerika Serikat, Rusia, Inggris, dan Cina*. Konferensi di San Fransisco Amerika Serikat. Konferensi dilanjutkan di Yolta, dan terkahir diselenggarakan di San Fransisco Amerika Serikat. Konferensi dilanjutkan di Yalta, dan terakhir diselenggarakan di *San Fransisco Amerika Serikat.* Konferensi Fransisko yang dihadiri oleh 50 negara, menyetujui dijadikannya *Atlantic Charter* sebagai piagam PBB. Piagam ini kemudian disahkan menjadi piagam PBB pada tanggal 24 Oktober 1945.

PBB memiliki enam badan utama yaitu *Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional, dan Sekretariat*. *Majelis Umum* adalah badan tertinggi dalam organisasi PBB, dimana setiap negara anggota PBB menempatkan wakilnya dalam Majelis Umum (MU) tersebut. Dewan Keamanan (DK) terdiri dari 15 negara tetap dan tidak tetap. Anggota tetap DK adalah *Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia, dan Cina*, yang memiliki **Hak Veto** pada setiap kebijakan keamanan.

Sedangkan *Dewan Ekonomi dan Sosial (DES)* diwakili oleh 54 negara yang keanggotaannya dipilih melalui Sidang Umum PBB. Tugas pokoknya adalah meembahas masalah ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan kesehatan, dalam setiap sidang DES. Sementara *Dewan Perwalian* anggotanya terdiri dari anggota lain yang ditetapkan melalui sidang umum. Adapun tugas pokok DP ini adalah membimbing dan mengawasi negara-negara yang belum merdeka dan belum memiliki pemerintahan sendiri.

Kemudian *Mahkamah Internasional* merupakan badan pengadilan PBB yang berkedudukan di *Den Haag*, negeri Belanda, dan memiliki 15 hakim dengan masa jabatan sembilan tahun. Sedangkan *Sekretariat* adalah badan administrasi PBB yang dipimpin oleh seseorang *Sekreteriat Jenderal*. Sebagai organisasi internasional, maka PBB tidak terlepas dari peran seerta setiap anggota dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Dalam kesempatan ini akan diketengahkan peranan Indonesia dalam PBB.

Indonesia diterima menjadi anggota PBB yang ke-60, setelah PBB secara aklamasi menerima Indonesia sebagai anggota pada tanggal 27 September 1950. Tujuan Indonesia masuk menjadi anggota PBB adalah sesuai dengan amanat konstitusi yakni ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia. Hal ini didasarkan pula bahwa Indonesia yang mempunyai kedaulatan dengan menyatakan kemerdekaanya perlu membantu negara-negara lain yang belum memperoleh kemerdekaan. Namun Indonesia tidak langgeng menjadi anggota PBB karena pada tanggal 7 Januari 1965 Indonesia dengan bangga menyatakan diri keluar dari anggota PBB sebagai dampak dari politik konfrontasi yang dijalankan pemerintah Indonesia. Ketika Indonesia dikucilkan dunia dan perlunya forum internasional, maka pada masa awal Orde Baru Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB pada tanggal *28 September 1966*.

Sebagai bagian dari anggota PBB, maka Indonesia berkewajiban untuk ikut andil dalam melaksanakan program-program PBB, termasuk ikut serta dalam memelihara perdamaian dunia. Ketika di beberapa negara terajadi perang dan sengketa, maka Indonesia juga ikut serta dalam pasukan PBB mengirimkan pasukan keamanan yang tergabung dalam pasukan PBB. Berikut ini pasukan-pasukan yang dikirim oleh pemerintah RI bersama wilayah tujuannya sebagai berikut.

a. Pasukan Garuda I yang dikirim ke *Sinai* antara daerah Mesir dan Israel yang bergolak karena terjadi *Krisis Suez*. Hal ini terjadi karena Mesir menasionalisasi Terusan Suez yang berdampak pada perang antara Mesir, Inggris, dan Perancis. Pengiriman pasukan ini dilakukan pada tanggal 6 Januari 1957 dibawah pimpinan *Kolonel Hartoyo* yang berasal dari

Divisi Diponegoro dan Brawijaya dengan kekuatan 550 personel. Pasukan ini bergabung dengan pasukan multinasional di bawah *UNEF (United Nations Emergency Forces)*.

b. Pasukan Garuda II dikirim ke *Kongo* dalam rangka meredakan *Perang Saudara* di negeri tersebut setelah memperoleh kemerdekaannya dari *Belgia*. Pengiriman pasukan ini dilakukan pada tanggal 10 September dan berakhir masa tugasnya sampai bulan Mei 1961. pasukan ini dipimpin oleh *Kolonel Priyatna* yang anggotanya berasal dari berbagai kesatuan seperti *Divisi Siliwangi dan Detasemen Polisi Militer*. Kesatuan ini bergabung dengan pasukan multinasional di bawah *UNOC (United Nations Operation of Congo)*.

c. Pasukan Garuda III juga dikirim ke *Kongo* dan memperbesar pasukan Garuda II yang seharusnya masa tugasnya berakhir tahun 1961. pasukan Garuda II ini bertugas di Congo dari bulan Desember 1962 sampai bulan Agustus 1964. Ditunjuk sebagai pimpinan pasukan adalah *Brigjen Kemal Idris* dan dipilih sebagai komandan pasukan adalah *Kolonel Sarbinan Mochtar*.

d. Pasukan Garuda IV dikirim ke *Vietnam* yang sedang mengalami *Perang Saudara* antara kekuatan komunis dan anti komunis. Pertikaian ini melibatkan Amerika Serikat dan negara-negara lain sehingga dianggap membahayakan perdamaian dunia. Pasukan Garuda IV bergabung degan pasukan *Hongaria dan Iran dibawah ICCS (International Commision of Cnotrol and Supervision)*. Pasukan ini dipimpin oleh *Letjen HR. Dharsono* dengan komandan pasukan *Brigjen Wiyogo* dengan kekuatan pasukan sebanyak 290 personil. Adapun masa tugasnya mulai bulan Januari 1973 sampai Juli 1973. Setelah masa tugasnya berkhir, kemudian diganti oleh pasukan Garuda V dan VI. Nmun ketika seluruh Vietnam jatuh ke tangan *Vietkong* pada tahun 1975, maka pasukan Garuda VI dtarik oleh pemerintahan RI.

e. Pasukan Garuda VII dikirim ke Timur Tengah dalam rangka meredakan perang Israel-Mesir. Kemudian bergabung dengan pasukan multinasional dibawah UNEF. Pasukan ini diberangkatkan 25 Desember 1973 dan berakhir masa tugasnya pad atanggal 23 September 1974.

f. Pasukan Garuda VIII dikirim ke *Timur Tengah* menngantikan pasukan Garuda VII yang masa tugasnya samapi tanggal 17 Februari 1975. Pasukan Garuda VIII ini dipimpin oleh *Kolonel Sudirman,* dan mengangkat *Letkol Sutopo* sebagai komandan yang dikirim ke daerah konflik bersama-sama dengan pasukan multinasional PBB. Tahun 1975 sampai dengan tahun 1979, misalnya Indonesia masih mengirim pasukan msi-misi perdamaian di kawasan *Timur Tengah*. Kemudian pada tahun 1992, Indonesia juga mengirimkan pasukan

perdamaian ke *Bosnia, Herzegovine* dalam rangka meredam perang saudara yang juga dibawah kendali PBB.

Disamping memiliki kewajiban untuk berperan aktif dalam keanggotaan PBB, maka Indonesia juga mempunyai hak untuk diperhatikan kepentingannya oleh PBB. Dalam hal ini memang tidak dapat dipungkiri bahwa PBB telah banyak memberikan bantuan kepada Indonesia terutama dirasakan misalnya mengenai dukungannya dalam melakukan perundingan-perundingan dengan Belanda. PBB menjadi penengah dalam pertikaian kedua negara tersebut. Contoh konkritnya PBB telah membntuk KTN untuk memantau Perjanjian Renville, mengirmkan UNCI untuk membantu persengketaan, daan peranan PBB dalam *Perjanjian New York* yang berhasil mengembalikan *Irian Barat* kepada penagkuan Ibu Pertiwi.

F. Peranan Lembaga Internasional dalam Hubungan Internasional

Dalam hubungan antar bangsa-bansga di dunia, maka peranan lembaga internasional sangat dibutuhkan. Suatu negara tidak mungkin mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan negara lain. Dengan demikian, keberadaan lembaga-lembaga interanasional baik regional maupun global merupakan sarana pokok dalam hubungan internasional. Berikut beberapa lembaga internasional yang beperan dalam hubungan internasional.

1. Lembaga Intenasional di Bawah PBB

Selain memiliki enam badan utama, PBB juga memiliki badan-badan pendukung yang bekerja di bawah garis kebijakan PBB. Badan-badan tersebut adalah sebagai berikut.

a. FAO (Food and Agriculture Organization)

Lembaga ini dibentuk pada tanggal 16 Oktober 1945. Badan ini mengurusi masalah pangan dunia. Oleh akrena itu, tugas pokoknya adalah mengembangkan bidang pertanian untuk persediaan pangan dunia dan mengurusi masalah gizi.

b. IMF (International Monetary Fund)

Lembaga ini mengurusi masalah kebijakan moneter international yang dibentuk pada tanggal 27 Desember 1945.

c. UNESCO (United Nations Edicational Scientific and Cultural Organization)

Lembaga ini mengurusi masalah pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan. Badan ini dibentuk pada tanggal 4 Nopember 1946.

d. UNICEF (United Nations International Chlidrens Emergency Fund)

Lembaga ini dibentuk untuk mengurusi masalah anak-anak yang telantar baik akibat perang maupun akibat lainnya agar dapat hidup secara normal. Badan ini dibentuk pada tanggal 11 Desember 1946.

e. ILO (International Labour Organization)

Lembaga ini mengurusi masalah perburuhan international yang dibentuk pada tahun 1946.

f. WHO (World Healt Organization)

Lembaga ini mengurusi masalah kesehatan masyarakat international yang dibentuk pada tanggal 7 April 1948.

g. UNHCR (United Nations High Commision for Refugees)

Lembaga ini mengurusi masalah pengungsi baik karena bencana alam maupun korban perang. Badan ini dibentuk pad atanggal 1 Januari 1951.

2. OKI (Organisasi Konferensi Islam)

OKI dibentuk di *Karachi, Pakistan* pada bulan Desember 1970. Lembaga ini merupkan organisasi negara-negara yang penduduknya mayorita Islam. Adapun tujuan didirikannya OKI adalah untuk meningkatkan solidaritas negara-negara muslim. Solidaritas muslim mulai dirasakan sebagai suatu keperluan tatkala ada salah satu negara Islam yang belum memperoleh kedaulatan. Ketika *Yerusalem* jatuh ke tangan *Israel,* kemudian dtambah tindakan-tindakan Israel yang menghina Islam, seperti pembakaran Masjid Al Aqsa pada tanggal 21 Agustus 1969, maka spontan membanngkitkan kemarahan umat Islam dunia. Negara-negara Arab kemudian mengadakan pertemuan-pertemuan untuk membentuk organisasi negara-negaar Islam. Akhirnya dengan diselenggarakannya **Konferensi Jedah,** maka terbentuklah apa yang disebut OKI. Terpilih *PM. Malaysia Tengku Abdul Rachman sebagai Sekjen OKI yang pertama.*

Pada mulanya, anggota OK hanya terdiri dari 28 negara saja, namun nampaknya solidaritas muslim semakin meningkat, sehingga sekarang jumlah anggota OKI sebanyak 57

negara yang tersebar di beberapa benua termasuk Indonesia. Dalam hubungan internasional, Indonesia memanfaatkan OKI sebagai forum untuk meningkatkan kerjasama baik regional maupu global. Pada setiap penyeleggaraan KTT OKI, Indonesia selalu berpean aktif membantu mencarikan solusi masalah-masalah yang dihadapi negara-negara anggota OKI. Disitulah nampaknya politik bebas aktif Indonesia cukup berperan dan diperhitungkan oleh forum OKI. Buktinya Indonesia menjadi pengaggas dibentuknya *Komite Perdamaian Islam* dalam KTT OKI di *Thaif, Arab Saudi* pada tahun 1981. Indonesia juga ikut berperan dalam perdamaian Bangladesh-Pakistan, dan Indonesia juga turut mengecam kebijakan Israel terhadap Palestina.

3. Asia Pasific Economic Cooperation (APEC)

APEC didirikan oleh negara-negara *Asia Pasific* pada bulan Desember 1989 di *Canbera, Autralia.* Adapun tujuan dibentuknya lembaga ini adalah untuk memajukan kerjasama ekonomi negara-negara di kawasan Asia-Pasific. Lembaga ini diperlukan dalam rangka memutuskan kerja sama ekonomis dan mencegah upaya-upaya pihak tertentu untuk melakukan monopoli perekonomian.

Sewaktu APEC baru berdiri, keanggotaannya hanya meliputi negara *Asia-Pasific* termasuk *Indonesia.* Dalam hubungan internasional Indonesia memanfaatkan forum APEC sebagai pendukung kerja sama ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan tampilnya Indonesia sebagai ketua APEC untuk masa jabatan 1994-1995. Indonesia juga berhasil meneylenggarakan Konferensi APEC pada tahun 1994 di Bogor. Konferensi APEC itu dihadiri olel 18 negara anggota yakni : *Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunai Darusalam, RRC, Jepang, Korea Selatan, Hongkong, Taiwan, Papua Nugini, Australia, Selandia Baru, Chile, Mexsico, Kanada, dan Amerika Serikat.*

Keterlibatan Indonesia dalam berbagai forum internasional, adalah bentuk politik luar negeri RI yang bebas dan aktif. Keaktifan Indonesia dalam kerjasama *ASEAN, OKI, APEC, GNB, PBB*, sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Pancasila dan pembukaan UUD 1945. Namun yang perlu diingat adalah, mari bangsa ini bersama-sama belajar dari sejarah, agar masa depan bangsa lebih baik, meskipun harus dengan berkaca pada masa lampau yang buram. Sejarah adalah panorama kehidupan yang penuh warna. Maka mari kita bangun bangsa ini dengan memberikan warna-warna yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Syafii Maarif. 1985. *Masalah Kenegaraan*. Jakarta : LP3ES.

Ahmad Syafii Maarif. 2002. *Refleksi 50 tahun Indonesia Merdeka*. Yogyakarta : UNY.

Alfian. 1971. *Hasil Pemilihan Umum 1955 Untuk Dewan Perwakilan Rakyat*.
Biro Pusat Statistik, 1975. Statistik Indonesia. Jakarta : BPS.

Amin, SM. 1967. *Indonesia di bawah RezimDemokrasi Terpimpin*. Jakarta : Bulan Bintang.

Anderson, B. 1998. *Revolusi Pemuda : Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*. Jakarta: Rineka Cipta.

Depdiknas. 2003. *Standar Kompetensi Mata Pelajaran Pengetahuan Sosial Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah*. Jakarta : Depdiknas.

Dahm, B. 1969. *Sukarno and the Strunggle for Indonesia Independence*. Ithaca and London : Cornell University Press.

Feith, Herbert. 1964. *The Deline of Conctitutional Democracy in Indonesia*. Ithaca : University Press.

Feith, Herbert. 1970. *Indonesia Political Thinking :1945-196*. Ithaca and London : Cornell University Press.

Hatta, Moh. 1974. *Detik-Detik Sekitar Proklamasi 1945*. Jakarta: Yaperna.

Joeniarto. 2000. *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara.

Kahin, G.McT. 1963. *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Ithaca, New York : Cornell University Press

Leirisa, R.Z. 1986. *Sejarah Perekonomian Indonesia*. Jakarta : Depdikbud

Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. 1990. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta : Balai Pustaka.

Moedjanto, G. 1989. *Indonesia Abad ke 20 1 dan 2*. Yogyakarta : Kanisius.

Nasution, AH. 1963. *Menuju Tentara Rakyat*. Jakarta : Yayasan Penerbit Minang.

Reid, Anthony. 1974. *The Indonesian National Revolution 1945-1950*. Hawthorn Victoria : Longman.

Sartono Kartodirdjo. 1977. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid 1-6*. Jakarta : Gramedia

Siegel, J.T. 2000. *A New Criminal Type in Jakarta : Counter Revolution Today*, Alih Bahasa Noor Cholis. Yogyakarta : LKS.

Slamet Mulyana. 1986. *Nasionalisme Sebagai Modal Perjuangan Bangsa Indonesia.* Jakarta : Balai Pustaka.

Soekarno. 1960. *Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia,* Jakarta PP dan K.

Ricklef, M.C. 1993. *Sejarah Indonesia Modern.* Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Yahya Muhaimin. 1971. *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Nasionalisme erat kaitannya dengan sejauh mana seseorang memahami sejarah bangsanya sendiri. Pembelajaran yang dilakukan di perguruan tinggi maupun di sekolah tidaklah cukup untuk membahas tuntas perjalanan panjang sejarah bangsa. Oleh sebab itu, perlu banyak referensi yang mengantarkan kita untuk melihat Indonesia masa silam.

Sejarah Indonesia Masa Kemerdekaan merupakan bagian dari perjalanan sejarah Indonesia yang panjang. Kemerdekaan yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 bukan semata-mata lahir dari pembicaraan singkat di Rengasdengklok. Namun, kemerdekaan Indonesia merupakan hasil dari kerja keras para pahlawan bangsa. Perjuangan bangsa Indonesia tidak cukup hanya dengan perlawanan fisik bambu runcing saja, melainkan diimbangi dengan diplomasi yang dilakukan oleh pejuang revolusioner. Jadi, Perjuangan heroik maupun diplomasi menjadi dua mata sisi yang tidak dapat dipisahkan dan saling melengkapi bagi kemerdekaan Indonesia.

Buku karangan Dr. Aman, M.Pd yang berjudul *Sejarah Indonesia Masa Kemerdekaan 1945-1998* ini menguraikan secara runtut dan mendalam peristiwa seputar proklamasi sampai jatuhnya rezim Orde Baru. Perhatian penulis tidak hanya pada peristiwa yang terjadi, melainkan pihak-pihak yang terlibat dan sebab-akibat peristiwa juga diuraikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Buku ini menjadi pilihan yang tepat bagi dosen, guru, mahasiswa, siswa sekolah menengah, dan masyarakat secara luas yang ingin menambah wawasannya terkait sejarah Indonesia.

ISBN 602-258-312-7
9 786022 583127

PENERBIT OMBAK
Perumahan Nogotirto III, Jl. Progo B-15,Yogyakarta 55599
Tlp. 085105019945 / 082221483637; Fax. (0274) 620606
e-mail: redaksiombak@yahoo.co.id
www.penerbitombak.com Penerbit OmbakTiga